

**ANALISIS PENGARUH DIMENSI BUDAYA HOFSTEDE DAN
KEPRIBADIAN MACHIAVELLIANISME
TERHADAP NIAT MELAKUKAN PRAKTIK KORUPSI
DI PROVINSI MALUKU UTARA**



DISUSUN OLEH:

FAJRA FAJRIA RUSDIN

23919033

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2026

**ANALISIS PENGARUH DIMENSI BUDAYA HOFSTEDE DAN
KEPRIBADIAN MACHIAVELLIANISME
TERHADAP NIAT MELAKUKAN PRAKTIK KORUPSI
DI PROVINSI MALUKU UTARA**

TESIS

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat
Magister Strata-2 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



OLEH:

FAJRA FAJRIA RUSDIN

23919033

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 10 Februari 2026 Penulis



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fajra'.

Fajra Fajria Rusdin

TESIS
ANALISIS PENGARUH DIMENSI BUDAYA HOFSTEDE DAN
KEPRIBADIAN MACHIAVELLIANISME
TERHADAP NIAT MELAKUKAN PRAKTIK KORUPSI
DI PROVINSI MALUKU UTARA

Diajukan oleh
Fajra Fajria Rusdin
23919033

telah disetujui oleh:

Yogyakarta, 9 Februari 2026

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dekar Urumsah', with a horizontal line underneath the name.

Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 11 April 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

FAJRA FAJRIA RUSDIN

No. Mhs. : 23919033

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**PENGARUH DIMENSI BUDAYA HOFSTEDE DAN KEPERIBADIAN
MACHIAVELLIANISME TERHADAP NIAT MELAKUKAN PRAKTIK KORUPSI DI
PROVINSI MALUKU UTARA**

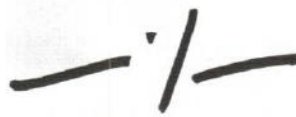
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa tercinta, yang telah banyak menghujani setiap perjuangan dan perjalanan study ini dengan cinta kasih, doa dan dukungan yang tidak terhingga. Berkat semua rasa yang paling indah, ikhlas dan tulus itu, Allah *subhana wata'ala* pun turun serta menjaga, meridhoi dan memudahkan segala usaha saya. Terimakasih karena telah menjadi bagian paling berharga dalam kehidupan saya dan menghantarkan saya sampai ke titik ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *subhana wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulisan tugas akhir tesis yang berjudul **“Pengaruh Budaya Hofstede dan Kepribadian Machiavellianisme Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara”** dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari doa, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Mama Yanti Syamsi dan Papa Rusdin Amirudin serta kakak dan adik saya (Suryadi Laode Taeni dan Febriyanti Musakina Rusdin) yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo M.T., IPU., ASEAN Eng selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., C.FrA., Cert.IPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia serta dosen pembimbing tesis yang telah memberikan banyak ilmu,

masukan, dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan penelitian ini.

5. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusum, M. B. A selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan tesis ini.
6. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Jurusan Magister Akuntansi, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Teman-teman seperjuangan, Magister Akuntansi Angkatan 28 yang senantiasa saling memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan tesis ini.
10. Teristimewa kepada kekasih hati Supratman Daeng Siki yang tetap setia menunggu, memberikan dukungan dan doa dalam titik tersulit yang dihadapi penulis ketika menyusun tesis ini. Terimakasih karena tetap percaya dan menaruh hati di tempat yang sama.
11. Serta segenap pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan doa, bantuan dan motivasi.

Penulis menyadari penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna menyempurnakan

tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 14 April 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fajra Fajria Rusdin', written over a horizontal line.

Fajra Fajria Rusdin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	i
BERITA ACARA UJIAN TESIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Sistematika Pembahasan	12
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>).....	14
2.1.1 Sikap Terhadap Perilaku (<i>Attitude Toward the Behavior</i>)	15
2.1.2 Persepsi Kontrol Perilaku (<i>Perceived Behavior Control</i>)	16

2.1.3 Norma Subjektif (<i>Subjective Norm</i>).....	17
2.2 <i>Fraud</i>	18
2.3 Niat Melakukan Praktik Korupsi	20
2.4 Praktik Korupsi Perusahaan Publik dan Non-Publik di Indonesia	25
2.5 Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara.....	29
2.6 Faktor-Faktor yang Mendasari Niat Melakukan Praktik Korupsi.....	32
2.6.1 Faktor Budaya	32
2.6.2 Faktor Kepribadian.....	43
2.7 Penelitian Terdahulu.....	46
2.8 Hipotesis Penelitian.....	58
2.8.1 Pengaruh Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara.....	58
2.8.2 Pengaruh Dimensi Budaya Ketidakpastian Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara.....	60
2.8.3 Pengaruh Dimensi Budaya Kolektivisme Terhadap Niat Melakukan Praktik Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara	62
2.8.4 Pengaruh Dimensi Budaya Maskulinitas Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara	65
2.8.5 Pengaruh Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara	67
2.8.6 Pengaruh Dimensi Budaya Pemuasan Diri Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara.....	68

2.8.7 Pengaruh Kepribadian Machiavellianisme Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi di Maluku Utara.....	70
2.8.8 Pengaruh Jenis Organisasi dalam Memoderasi Hubungan Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara.....	72
2.9 Kerangka Penelitian	75
BAB III: METODE PENELITIAN	76
3.1 Metode Penelitian.....	76
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	76
3.3 Metode Pengumpulan Data	77
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	77
3.4.1 Dimensi Budaya Hofstede.....	78
3.4.2 Kepribadian Machivellianisme	86
3.4.3 Niat Melakukan Praktik Korupsi	87
3.5 Metode Analisis.....	88
3.5.1 Alat Analisis Data.....	88
3.6 Model Pengukuran (<i>Measurement Model</i>).....	89
3.6.1 Uji Validitas.....	89
3.6.2 Uji Reliabilitas	90
3.7 Model Struktural (<i>Structural Model</i>)	91
3.7.1 Uji Kolinearitas	91
3.7.2 Uji Koefisien Determinan (R^2).....	92
3.7.3 Uji Ukuran Efek (f^2).....	92
3.7.4 Uji Blindfolding (Q^2)	93

3.7.5 Uji t-Test.....	93
3.8 <i>Multi Group Analysis</i> (MGA)	93
3.9 PLS-Predict.....	94
3.10 Design Penelitian	96
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	98
4.2 <i>Pilot Test</i>	98
4.1.1 Uji Validitas Tahap <i>Pilot Test</i>	98
4.1.2 Uji Reliabilitas Tahap <i>Pilot Test</i>	103
4.2 Hasil Pengumpulan Data	104
4.3 Deskripsi Responden.....	105
4.3.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	105
4.3.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Kelompok Usia	105
4.3.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	106
4.3.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Organisasi.....	107
4.3.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Domisili	107
4.4 Pengujian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	108
4.4.1 Pengujian Validitas Konvergen	108
4.4.2 Pengujian Validitas Diskriminan.....	112
4.4.3 Pengujian Reliabilitas.....	114
4.5 Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	115
4.5.1 Pengujian Kolinearitas	115
4.5.2 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	115

4.5.3	Pegujian Ukuran Efek (f^2).....	116
4.5.4	Pengujian <i>Blindfolding</i> (Q^2).....	117
4.6	PLS-Predict.....	118
4.7	Pengujian Hipotesis.....	119
4.8	Pengujian <i>Multigroup Anaysis</i> (MGA)	122
4.9	Pembahasan dan Implikasi.....	127
4.9.1	Pengaruh Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara	127
4.9.2	Pengaruh Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara	129
4.9.3	Pengaruh Dimensi Budaya Kolektivisme Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara	131
4.9.4	Pengaruh Dimensi Budaya Maskulinitas Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara	133
4.9.5	Pengaruh Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara	135
4.9.6	Pengaruh Dimensi Budaya Pemuasan Diri Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara	137
4.9.7	Pengaruh Kepribadian Machiavellianisme Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara	139
4.9.8	Pengaruh Jenis Organisasi dalam Memoderasi Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara	141

BAB V: PENUTUP.....	144
5.1 Kesimpulan.....	144
5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian.....	148
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	150
5.4 Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya	151
DAFTAR PUSTAKA.....	152
LAMPIRAN.....	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tren Koruspi di Indonesia	2
Gambar 1.2 Skor Indeks Persepsi Korupsi 2012-2023	4
Gambar 2.1 Diagram Struktur TPB	15
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian	75
Gambar 3.1 Panduan Interpretasi Hasil PLS- <i>Predict</i>	95
Gambar 3.2 Flowchart Design Penelitian	97
Gambar 4.1 Hasil Model Penelitian	122
Gambar 4.2 Model Jalur Berdasarkan Jenis Organisasi.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Kasus Korupsi Perusahaan Publik dan Non-Publik	
Tahun 2019-2023	26
Tabel 2.2 Jenis dan Jumlah Perkara Praktik Korupsi Tahun 2019-2023 ...	27
Tabel 2.3 Perbedaan antara Jarak Kekuasaan yang Rendah dan Tinggi ...	38
Tabel 2.4 Perbedaan antara Penghindaran Ketidakpastian yang Lemah	
dan Kuat.....	39
Tabel 2.5 Perbedaan antara Individualisme dan Kolektivisme	39
Tabel 2.6 Perbedaan antara Femininitas dan Maskulinitas	40
Tabel 2.7 Perbedaan antara Orientasi Jangka Panjang dan Jangka	
Pendek	41
Tabel 2.8 Perbedaan antara Pemuasan dan Pengendalian Diri	42
Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu.....	47
Tabel 3.1 Indikator Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan	79
Tabel 3.2 Indikator Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian	80
Tabel 3.3 Indikator Dimensi Budaya Individualisme vs Kolektivisme	82
Tabel 3.4 Indikator Dimensi Budaya Femininitas vs Maskulinitas	83
Tabel 3.5 Indikator Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang vs	
Jangka Pendek	84
Tabel 3.6 Indikator Dimensi Budaya Pemuasan vs Pengendalian Diri.....	85
Tabel 3.7 Indikator Kepribadian Machiavellianisme	87
Tabel 3.8 Indikator Niat Melakukan Praktik Korupsi	88
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas Konvergen pada Tahap <i>Pilot Test</i>	99
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Validitas Diskriminan pada Tahap <i>Pilot Test</i> ..	102
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Reliabilitas pada Tahap <i>Pilot Test</i>	103
Tabel 4.4 Rincian Kuesioner Penelitian	104

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	105
Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kelompok Usia.....	106
Tabel 4.7 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	106
Tabel 4.8 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Organisasi.....	107
Tabel 4.9 Klasifikasi Responden Berdasarkan Domisili.....	108
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas Konvergen Awal.....	110
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas Konvergen Final.....	110
Tabel 4.12 Hasil Pengujian <i>Heterotrait-Monotrait Rasio</i> (HTMT).....	112
Tabel 4.13 Hasil Pengujian <i>Cross Loading</i>	112
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Reliabilitas	114
Tabel 4.15 Hasil Pengujian Kolinearitas	115
Tabel 4.16 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).....	116
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Ukuran Efek (f^2).....	116
Tabel 4.18 Hasil Pengujian <i>Blindfolding</i> (Q^2).....	117
Tabel 4.19 Hasil Pengujian PLS- <i>Predict</i>	118
Tabel 4.20 Hasil Pengujian Hubungan Antar Konstruk	119
Tabel 4.21 Hasil Pengujian <i>Composite Invariance</i>	123
Tabel 4.22 Hasil Pengujian <i>Composite Equality (Mean)</i>	124
Tabel 4.23 Hasil Pengujian <i>Composite Equality (Variance)</i>	124
Tabel 4.24 Hasil Pengujian MGA (<i>Permutation Test</i>)	125
Tabel 4.25 Hasil Pengujian MGA <i>Welch-Satterthwaite Test</i>	126

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor budaya dan kepribadian terhadap niat individu melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara, yang didasarkan pada kerangka teori perilaku terencana. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner yang disebar secara daring dan luring kepada 260 responden. Responden dipilih dengan teknik *stratified random sampling* kepada setiap individu yang telah berada pada usia bekerja dan telah bekerja pada jenis organisasi sektor publik dan sektor non-publik. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan software SmartPLS dengan model PLS-SEM. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya nilai budaya Hofstede dan kepribadian machiavellianisme dapat memengaruhi niat individu melakukan praktik korupsi. Kecuali untuk nilai budaya hofstede seperti jarak kekuasaan dan pemuasan diri yang meskipun memiliki arah yang positif namun tidak didukung secara statistik. Penelitian lanjutan menggunakan analisis MGA mendukung temuan utama dimana individu yang bekerja baik di organisasi sektor publik dan sektor non-publik secara signifikan memiliki pengaruh dalam meningkatkan niat melakukan praktik korupsi.

Kata Kunci: Budaya Hofstede, Machiavellianisme, Niat, Praktik Korupsi.

ABSTACT

This study aims to analyze cultural and personality factors on the intention of individuals to commit corrupt practices in North Maluku Province, which is based on the theoretical framework of planned behavior. This study uses a quantitative approach through questionnaires distributed online and offline to 260 respondents. Respondents were selected using stratified random sampling techniques to each individual who was of working age and had worked in the types of public sector and non-public sector organizations. Furthermore, the collected data was analyzed using SmartPLS software with the PLS-SEM model. The main findings in this study show that Hofstede's cultural values and Machiavellianism personality can influence an individual's intention to commit corrupt practices. Except for Hofstede's cultural values such as power distance and self-satisfaction which, although they have a positive direction, are not statistically supported. Further research using MGA analysis supports the key finding that individuals working in both public and non-public sector organizations have a significant influence on increasing intent to engage in corrupt practices.

Keywords: Hofstede's Cultural Dimensions, Machiavellianism, Intention, Corrupt Practices.

BAB I

PENDAHULUAN

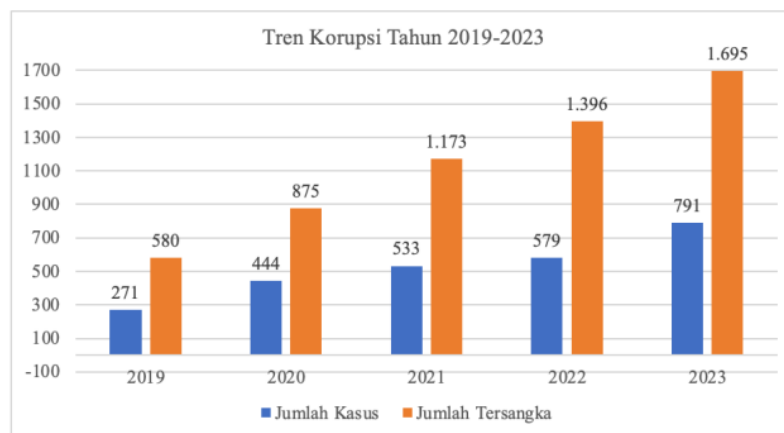
1.1 Latar Belakang

Praktik korupsi merupakan penyakit sosial yang paling berbahaya, seperti suatu virus yang sulit menemukan vaksinnnya di Indonesia, bahkan lebih dari dua dekade setelah reformasi tahun 1998, korupsi di Indonesia justru semakin meluas dan sulit untuk dikendalikan (Hannan & Syarif, 2023). Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, korupsi telah menjadi perhatian serius bagi para pembuat kebijakan, pemimpin negara dan manajer bisnis (Manara *et al.*, 2020).

Dalam hal ini, praktik korupsi tidak terjadi secara kebetulan. Sebaliknya, praktik tersebut direncanakan sejak awal, perencanaan strategi secara terstruktur untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan publik (Jawa *et al.*, 2024). Ilmi *et al.* (2022) menjelaskan bahwa praktik korupsi berpotensi menghambat perkembangan ekonomi, sosial dan pemerintah. Selain itu, tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara finansial, tapi juga melemahkan integritas institusi publik dan kepercayaan masyarakat.

Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada moral seseorang akan tetapi turut berdampak bagi moral negara (Mahsun, 2023). Di antaranya dapat menurunkan kualitas kehidupan masyarakat dengan menciptakan ketidakadilan, menyebabkan kemiskinan, menghambat pembangunan, melemahkan demokrasi dan mendorong munculnya ketimpangan antara kelompok masyarakat (Putra & Sihombing, 2024).

Temuan objektif *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berupa *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi di Indonesia Tahun 2023*, yang disajikan pada Gambar 1.1 yang menunjukkan grafik tren peningkatan kasus korupsi di Indonesia secara konsisten selama lima tahun terakhir.



Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (ICW) (2024)

Gambar 1.1: Tren Korupsi di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus dan tersangka praktik korupsi di Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2023, tercatat ada sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka. Lebih lanjut berdasarkan laporan tersebut, ICW menyebutkan potensi kerugian negara akibat praktik korupsi pada tahun yang sama mencapai Rp28,4 triliun yang disebabkan oleh berbagai tindakan, termasuk suap-menyuap, pungutan liar dan pencucian uang.

Berbagai tindakan praktik korupsi dapat terjadi diberbagai jenis organisasi yang berbeda seperti pada organisasi sektor publik maupun organisasi sektor swasta (Tampubolon *et al.*, 2024). Hal ini tercermin dalam laporan statistik Komisi

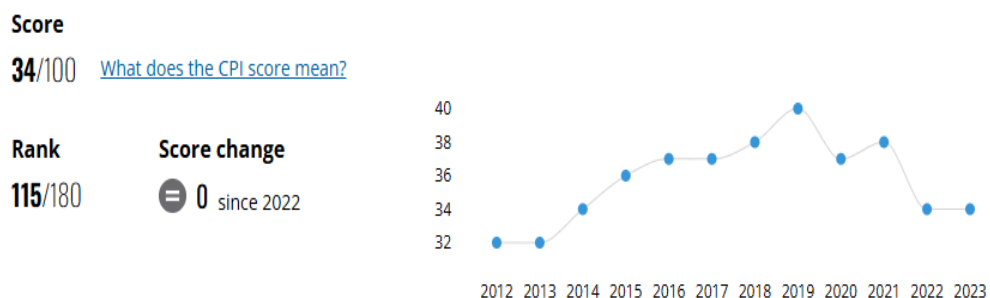
Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025, yang menunjukkan bahwa praktik korupsi melibatkan berbagai profesi dan jabatan. Dalam periode 2004–2025, tercatat sebanyak 483 kasus korupsi melibatkan sektor swasta. Sementara di sektor publik, tercatat sebanyak 437 kasus melibatkan pejabat Eselon I hingga IV, 363 kasus melibatkan anggota DPR dan DPRD, serta 171 kasus melibatkan Walikota/Bupati dan Wakil.

Secara khusus di Provinsi Maluku Utara, praktik korupsi juga melibatkan pejabat publik dan pejabat eksekutif perusahaan swasta. Seperti praktik korupsi di akhir tahun 2023 yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Beliau divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta karena terbukti melakukan praktik korupsi, termasuk suap dan gratifikasi (Lamaau, 2024). Selain itu, praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat eksekutif di perusahaan seperti Kristian Wuisan Direktur PT Birinda Perkasa Jaya. Divonis 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta karena terbukti melakukan suap atas berbagai proyek yang telah dikerjakan di Provinsi Maluku Utara (Ambari, 2023).

Berdasarkan Hasil Pemetaan Korupsi berdasarkan wilayah oleh ICW pada tahun 2023, Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang berkontribusi dalam peningkatan praktik korupsi di Indonesia, dengan 10 kasus praktik korupsi dan Rp 11 miliar nilai kerugian negara. Angka tersebut sangat berdampak pada penurunan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat (Belseran, 2024).

Sebagaimana yang di laporan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara tahun 2023, mencatat bahwasannya dalam segi infrastruktur Kabupaten Pulau Taliabu belum mendapatkan akses yang memadai untuk aliran listrik. Sedangkan dalam segi kesejahteraan masyarakat, tingkat pengangguran di Provinsi Maluku Utara tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,31% dibandingkan tahun 2022. BPS (2024) juga melaporkan bahwa meskipun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara menduduki peringkat pertama di Kawasan Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) yaitu sebesar 20,49%. Namun, tidak serta merta dapat meningkatkan pendapatan per kapitanya. Hal ini mengindikasikan adanya dampak signifikan akibat praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas praktik korupsi, salah satunya dengan membentuk lembaga-lembaga pengawasan yang independen. Namun hal ini tidak serta-merta menekan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia (Ilmi *et al.*, 2022). Dapat dilihat dari hasil pengukuran *Corruption Perception Index* (CPI) oleh *Transparency International*, yang mencerminkan tingkat persepsi terhadap praktik korupsi di Indonesia, ditampilkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2: Skor Indeks Persepsi Korupsi 2012-2023

Berdasarkan gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Tercermin dari penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) yang cukup drastis, yaitu dari 38 poin pada tahun 2021 menjadi 34 poin pada tahun 2022, dan stagnan hingga tahun 2023. Penurunan dan stagnasi ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan lebih fundamental tidak hanya bersifat teknis.

Montesdeoca *et al.* (2019) menyebutkan bahwasannya dalam beberapa tahun terakhir faktor yang mendasari tindakan tidak etis banyak diteliti melalui lensa psikologis. Dalam hal ini ialah pembentukan niat (*intention*) dalam diri seseorang untuk melakukan praktik korupsi (Çollaku *et al.*, 2024). Niat dapat dipahami melalui kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa perilaku aktual seseorang ditentukan oleh niat yang dimilikinya. Dengan demikian, niat dipandang sebagai representasi kesediaan individu untuk melakukan suatu tindakan, termasuk melakukan praktik korupsi. Penelitian ini, melibatkan faktor lain yaitu budaya dan kepribadian yang dapat berperan penting dalam membentuk niat tersebut sebelum kemudian terwujud dalam tindakan nyata.

Husted (2018) menyatakan bahwasannya nilai-nilai budaya diketahui memainkan peran penting dalam mempengaruhi tindakan seseorang melakukan praktik korupsi. hal yang sama disampaikan oleh Dominikus *et al.* (2024) bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia juga dipengaruhi oleh elemen budaya. Namun, nilai-nilai budaya sering diabaikan dalam penelitian tentang niat

melakukan praktik korupsi, padahal nilai-nilai budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan nait praktik korupsi di berbagai negara (Guritno *et al.*, 2021). Salah satunya ialah, budaya Hofstede yang diperkenalkan oleh Geert Hofstede tahun 1970-an.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian terkait dengan pengaruh dimensi budaya Hofstede terhadap praktik korupsi. Penelitian tersebut di antaranya oleh Guritno *et al.* (2021); Putra dan Sihombing (2024); Nainggolan (2022); Esmā dan Lajunen (2022); Boateng *et al.* (2024) serta Hohjin dan Chen (2020). Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwasannya dalam dimensi budaya Hofstede indikator *Individualism*, *Masculinity*, *Power Distance* dan *Uncertainty Avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap meningkatnya praktik korupsi.

Sejalan dengan hasil tersebut, penelitian oleh Amalia dan Handayani (2019) serta Baatour dan Saada (2021) menemukan pengaruh positif dimensi budaya *Long Term Orientation* dan *Indulgence* terhadap meningkatnya praktik korupsi. Sementara itu Farooq *et al.*(2020) dan Debski *et al.* (2018) menemukan bahwa dimensi Budaya Hofstede secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Selain budaya, Wijayanti *et al.* (2023) menyatakan kepribadian juga turut memengaruhi tindakan seseorang melakukan praktik korupsi, hal ini karena kepribadian sudah menjadi bagian dari individu dalam jangka waktu yang lama. Hal yang sama disampaikan oleh Triantoro *et al.* (2020) bahwasannya kepribadian

dapat berperan dalam menentukan apakah seseorang melakukan kecurangan atau tidak. Selain itu, kepribadian sendiri merupakan faktor internal yang memengaruhi seseorang berbuat curang. Salah satu faktor kepribadian yang dapat menjelaskan kecenderungan seseorang berbuat kecurangan ialah kepribadian machiavellianisme (Farhan *et al.*, 2019).

Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kepribadian machiavellianisme terhadap praktik korupsi di antaranya dilakukan oleh Triantoro *et al.* (2020), Basri *et al.* (2023) dan Utami *et al.* (2019). Menemukan bahwa semakin tinggi sifat machiavellian seseorang, semakin besar kemungkinan terjadinya kecurangan. Dengan demikian, kepribadian machiavellian disebutkan menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku manusia dalam meningkatkan *fraud intention*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu dan fenomena praktik korupsi yang telah diuraikan di atas menunjukkan kompleksitas budaya dan kepribadian yang dapat mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan praktik korupsi. Namun demikian, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Guritno *et al.* (2021) hanya menggunakan empat dimensi budaya Hofstede meliputi dimensi budaya *power distance*, *individualism*, *masculinity* dan *uncertainty avoidance*. Penambahan dua dimensi budaya lainnya berdasarkan pada hasil penelitian oleh Amalia dan Handayani (2019) serta Nainggolan (2022) yang menemukan bahwa dimensi budaya *long term orientation* dan *indulgence* memiliki korelasi positif terhadap praktik korupsi. Selain ke-enam dimensi budaya Hofstede, penelitian terdahulu oleh Triantoro *et al.* (2020) dan

Basri *et al.* (2023) menggunakan kepribadian machiavellianisme dalam mengukur pengaruhnya dengan praktik korupsi, dan ditemukan korelasi positif yang menandakan terdapat pengaruh kepribadian machiavellianisme terhadap praktik korupsi.

Meskipun, budaya Hofstede dan kepribadian machiavellianisme menunjukkan korelasi positif terhadap praktik korupsi. Namun, penelitian sebelumnya cenderung menguji budaya Hofstede dan kepribadian machiavellianisme secara terpisah. Sehingga, masih terbatas penelitian yang melakukan elaborasi antara dimensi budaya Hofstede dan kepribadian machiavellianisme dalam menganalisis pengaruhnya terhadap niat seseorang melakukan praktik korupsi.

Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat reaktif, yaitu meneliti praktik korupsi setelah praktik tersebut terjadi, seperti level of corruption (Debski *et al.*, 2018; Guritno *et al.*, 2021; Nainggolan, 2022), Corruption (Boateng *et al.*, 2024; Gayg & Lajunen, 2022; Manara *et al.*, 2020), dan Fraud (Basri *et al.*, 2023; Parawansa & Winarto, 2024; Setyaki & Andreas, 2022; Suryandari & Valentin, 2021). Padahal sebelum seseorang melakukan tindakan koruptif, terdapat proses psikologi dan kognitif yang membentuk niat untuk melakukan perilaku tersebut. Hal ini relevan dengan teori perilaku terencana, yang menjelaskan bahwa niat merupakan prediktor utama terhadap perilaku aktual seseorang (Ajzen, 1991). Sehingga, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar dapat mengidentifikasi faktor psikologis, sosial dan

budaya yang dapat membentuk perilaku koruptif, sebelum perilaku tersebut benar-benar terjadi.

Sehingga, penelitian ini penting untuk dilakukan, demi memberikan wawasan lebih mendalam mengenai bagaimana interaksi antara karakteristik individu dan norma-norma budaya memengaruhi niat seseorang untuk melakukan praktik korupsi. Fenomena tersebut menarik minat peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Dimensi Budaya Hofstede dan Kepribadian Machiavellianisme Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh dimensi budaya Hofstede terhadap niat melakukan korupsi di Provinsi Maluku Utara?
2. Apakah terdapat pengaruh kepribadian Machiavellianisme terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara?
3. Apakah jenis organisasi memoderasi pengaruh Dimensi Budaya Hofstede terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara?
4. Apakah jenis organisasi memoderasi pengaruh Kepribadian Machiavellianisme terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara?

1.3 Batasan Masalah

Untuk mendukung agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pengertian dan penafsiran, maka diperlukan adanya batasan masalah dalam penelitian ini, Adapun fokus penelitian ini membahas tentang pengaruh dimensi budaya Hofstede dan kepribadian Machiavellianisme terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara, yang diukur berdasarkan persepsi individu melalui instrumen kuesioner. Penelitian ini juga dibatasi pada ruang lingkup wilayah Provinsi Maluku Utara, sehingga hasil yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke wilayah lain di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dimensi budaya Hofstede terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepribadian Maschiavellianisme terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.
3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh dimensi budaya Hofstede terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara pada perusahaan publik dan non-publik.
4. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh kepribadian Machiavellianisme terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara pada perusahaan publik dan non-publik.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat untuk berbagai pihak, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami hubungan dimensi budaya hofstede dan kepribadian machiavellianisme terhadap niat melakukan perilaku koruptif. Penelitian ini juga dapat membuka khazanah keilmuan yang lebih mendalam, untuk mengenali budaya dan kepribadian sebagai hal mendasar dalam upaya pemberantasan korupsi di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam ranah praktis terhadap berbagai pihak, yaitu:

a. Sektor Publik

Memberikan dasar bagi perumusan kebijakan pencegahan korupsi yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan dimensi budaya hofstede dan kecenderungan kepribadian pegawai dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

b. Sektor Non-Publik

Membantu manajemen dalam memperkuat sistem etika dan tata kelola perusahaan dengan mempertimbangkan aspek budaya hofstede dan karakter individu yang berpotensi memengaruhi integritas karyawan.

c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Menjadi rujukan dalam penyusunan kurikulum pelatihan antikorupsi dan pembentukan karakter yang tidak hanya berfokus pada aturan hukum, tetapi juga mencakup pendekatan berbasis budaya dan psikologis.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang fenomena korupsi di Provinsi Maluku Utara, landasan teori, tabel penelitian terdahulu, uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji, serta kerangka model penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, serta pengujian dan pembahasan penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian yang dirasakan peneliti, dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

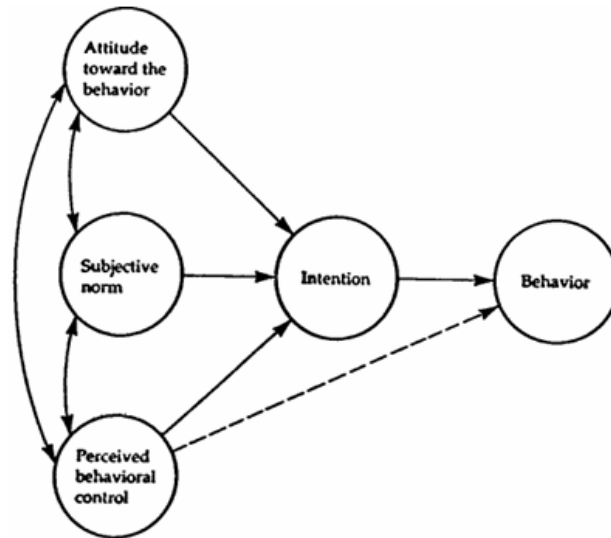
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*)

Teori Perilaku Terencana (TPB) adalah salah satu model sosial-psikologis yang cukup berpengaruh, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen tahun 1985 dan sejak saat itu telah memperoleh pengakuan secara luas (Koay *et al.*, 2024). TPB telah diakui sebagai kerangka teoritis yang efektif dalam menjelaskan dan memprediksi berbagai bentuk perilaku, sejumlah penelitian telah mengembangkan teori ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku tertentu, termasuk perilaku kecenderungan terhadap praktik korupsi (Wu & Hwang, 2013; Ajzen, 2020; Dian & Rinaldi, 2020).

TPB merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang disusun untuk mengatasi keterbatasan model awal dalam menjelaskan perilaku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali volisional individu (Ajzen, 1991). Faktor utama dalam TPB adalah niat (*intention*) individu untuk melakukan suatu perilaku, yang dipandang sebagai representasi dari faktor-faktor motivasional yang memengaruhi tindakan. Niat ini mencerminkan sejauh mana kesediaan individu untuk berusaha serta tingkat komitmen yang direncanakan dalam merealisasikan perilaku tersebut. Secara umum, semakin kuat niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan, semakin besar kemungkinan tindakan tersebut akan terwujud. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa niat hanya dapat diwujudkan apabila perilaku yang dimaksud berada dalam lingkup kendali volisional individu (Ajzen,

2012; Ajzen, 2020). Berikut merupakan Gambar 2.1 terkait bentuk diagram struktural dalam memahami teori ini.



Sumber: diadaptasi dari Ajzen (1991)

Gambar 2.1 Diagram Struktural TPB

Berdasarkan gambar 2.1 memuat pandangan Ajzen (1991) terkait Teori perilaku terencana (TPB) yang ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif terkait perilaku dan persepsi kontrol perilaku. Konsep ini dijelaskan lebih rinci pada bagian berikut.

2.1.1 Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward the Behavior*)

Teori perilaku terencana (TPB) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku terbentuk melalui formulasi *expectancy-value*, yaitu keyakinan individu mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu perilaku yang disebut *behavioral beliefs*. *Behavioral beliefs* merupakan probabilitas subjektif seseorang bahwa

melakukan suatu perilaku tertentu akan menghasilkan suatu konsekuensi atau memberikan pengalaman tertentu (Ajzen, 2020).

Sejalan dengan hal ini, Kumar *et al.* (2025) menyatakan bahwa sikap dapat dipahami sebagai kecenderungan individu untuk secara konsisten menampilkan perilaku tertentu, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Misalnya dalam konteks penggunaan kredit, sikap individu terbentuk dari penilaiannya terhadap konsekuensi yang mungkin timbul dari aktivitas kredit tersebut. Sehingga dalam kerangka TPB dijelaskan bahwa sikap tidak hanya memengaruhi kecenderungan individu terhadap suatu perilaku, tetapi juga berinteraksi dengan faktor lain seperti persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif.

2.1.2 Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavior Control*)

Konsep kontrol perilaku merujuk pada seperangkat keyakinan yang berkaitan dengan ada atau tidaknya sumber daya dan peluang yang dibutuhkan. Semakin banyak sumber daya dan peluang yang diyakini individu miliki, serta semakin sedikit hambatan atau kendala yang mereka perkirakan, maka semakin besar kontrol perilaku yang mereka rasakan (Ajzen, 1991). Dengan demikian kontrol perilaku yang dirasakan memainkan peran penting dalam menjelaskan hubungan antara niat dan perilaku aktual, yaitu semakin seseorang merasa memiliki kontrol atas suatu tindakan, semakin besar kemungkinan mereka akan berusaha dan bertahan untuk mencapainya (Ajzen, 2012).

Menurut Ajzen (2020) kontrol perilaku dan keyakinan individu dipengaruhi oleh faktor internal seperti sejauh mana individu memiliki informasi, pengetahuan,

keterampilan, kemampuan, serta faktor internal lainnya yang relevan sehingga mendorong mereka untuk mampu bertindak sesuai dengan niatnya. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya, dimana kontrol perilaku yang dirasakan dipengaruhi oleh sejauh mana individu dapat mengatasi hambatan eksternal yang berpotensi menghalangi pelaksanaan perilaku tersebut (Ajzen, 2020).

2.1.3 Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif merujuk pada persepsi individu mengenai adanya tekanan sosial yang mendorong untuk melakukan atau menghindari suatu perilaku tertentu. Secara konseptual, norma subjektif berdiri terpisah dari sikap individu terhadap perilaku tersebut. Dengan kata lain, seseorang bisa saja memiliki sikap positif terhadap suatu tindakan, namun tetap merasakan tekanan sosial untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, individu yang memiliki sikap negatif terhadap suatu perilaku dapat tetap merasakan desakan sosial untuk melaksanakannya (Ajzen, 1991).

Terdapat dua jenis norma subjektif yaitu *injunctive* dan *descriptive* norma subjektif *injunctive* merujuk kepada ekspektasi atau probabilitas subjektif bahwa individu atau kelompok rujukan tertentu (misalnya teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, dokter, atau atasan) akan menyetujui atau tidak menyetujui perilaku yang sedang dipertimbangkan. Sebaliknya, norma subjektif *descriptive* merujuk kepada persepsi individu mengenai sejauh mana orang-orang tersebut benar-benar melakukan perilaku dimaksud (Ajzen, 2020).

Dengan demikian, TPB merupakan kerangka teoritis yang relevan dalam memahami niat individu untuk terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini karena peran dimensi budaya Hofstede dan kepribadian Machiavellianisme, dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama dalam teori ini, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku.

2.2 *Fraud*

Fraud merupakan masalah yang sangat serius bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya, *fraud* dapat terjadi baik di sektor korporasi maupun sektor publik. Sejumlah skandal perusahaan di Amerika Serikat seperti Enron, WorldCom, Tyco International, dan Xerox pada awal tahun 2000-an merupakan contoh nyata dari *fraud* yang sangat merugikan (Utami *et al.*, 2019).

Silverstone dan Sheetz (2007) menyatakan bahwasannya *fraud* merupakan tindakan yang terjadi dalam konteks sosial dan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian, dunia usaha, serta individu. Tindakan ini sering kali muncul ketika adanya dorongan keserakahan yang bertemu dengan peluang untuk melakukan kecurangan. Sementara itu, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2024) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan yang disengaja dan menipu yang dilakukan oleh satu atau lebih orang di dalam atau di luar organisasi yang mengakibatkan kerugian finansial atau kerusakan reputasi.

Pengertian ini sejalan dengan definisi *fraud* menurut Mahsun (2023) yaitu kecurangan atau penipuan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah, dalam berbagai tindakan seperti pemalsuan dokumen, manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang dan biasanya dilakukan oleh individu, yang memiliki

akses atau kendali terhadap suatu sistem atau organisasi. Sedangkang Arifin (2020) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan ilegal yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja dan terencana yang menyebabkan orang atau kelompok tersebut mendapatkan keuntungan dan merugikan orang atau kelompok lain.

Disisi lain di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), *fraud* disebutkan sebagai pencurian (pasal 362), pemerasan dan pengancaman (pasal 368), penggelapan (pasal 372) serta perbuatan curang (pasal 378). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *fraud* ialah suatu tindakan yang bersifat ilegal, disengaja, dan merugikan, yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, dari dalam ataupun luar organisasi, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah.

Besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh *fraud*, baik dalam bentuk material maupun non-material, serta banyaknya korban yang terdampak, menjadikan *fraud* dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di tingkat global. Oleh karena itu, setiap negara perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko yang ditimbulkan oleh tindakan *fraud* (Amalia & Handayani, 2019). Menurut *The Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) (2024) mengklasifikasikan *fraud* ke dalam beberapa klasifikasi yang disebut “*The Fraud Tree*/Pohon kecurangan” yaitu:

1. Penyalahgunaan aset, meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta benda milik perusahaan atau pihak lain.

2. Manipulasi laporan keuangan, meliputi tindakan yang dilakukan pejabat atau eksekutif perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.
3. Korupsi termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan tidak sah dan pemerasan secara ekonomi.

Arifin (2020) juga menyatakan bahwa korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena sering kali melibatkan kerja sama dengan pihak lain atau dilakukan secara sistemik. Selain itu, korupsi berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi negara dan masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum yang berlaku (Mahsun, 2023). Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini akan berfokus pada praktik korupsi dan membahasnya secara lebih komprehensif sebagai salah satu bentuk *fraud* yang paling kompleks dan merugikan.

2.3 Niat Melakukan Praktik Korupsi

Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berawal dari potensi perilaku yang belum terwujud secara nyata, yang disebut sebagai intensi atau niat. Niat berfungsi sebagai pengarah perilaku individu dengan menghubungkan keyakinan dan preferensi terhadap tindakan tertentu (Kwarteng & Servoh, 2024). Menurut Pacherie & Haggard (2010) niat adalah suatu keadaan mental, yang berhubungan dengan kondisi otak tertentu. Niat sendiri memiliki dua ciri pembeda, yaitu niat dapat diakses oleh kesadaran dan niat memiliki keterkaitan tertentu dengan tindakan yang akan dilakukan kemudian.

Sementara itu, secara epistimologi korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang artinya busuk, rusak, bejat, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyimpang dari kesucian dan menyogok. Selanjutnya berkembang menjadi istilah korupsi dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.

Arifin (2020) menyatakan bahwa korupsi merupakan sesuatu yang jelek, jahat dan bersifat merusak, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok. Faktor lain dari korupsi ialah tindakan yang dirahasiakan, yaitu orang lain di luar pelaku atau kelompok pelaku tidak mengetahui tindakan tersebut. Sedangkan di dalam Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwasannya korupsi merupakan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan/sarana/jabatan untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2019) mendefinisikan korupsi sebagai praktik yang dilakukan oleh seseorang yang melibatkan penggunaan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Mahsun (2023) bahwa korupsi merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah. Maka, niat korupsi dapat dipahami sebagai keinginan seseorang untuk melakukan praktik korupsi.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) (2024) menyatakan bahwa sebanyak 48% *fraud* merupakan kontribusi dari kasus praktik korupsi, yang menghasilkan kerugian sebesar USD 200.000. Di Indonesia, berdasarkan hasil laporan tren korupsi oleh *Indonesia Corruption Watch/ICW* (2024), melaporkan bahwasannya kasus korupsi di Indonesia mencapai 1.965 kasus, dengan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 48,7 triliun yang didominasi oleh kasus kegiatan/proyek fiktif.

Tommie dan Aaron (2010) menjelaskan skema praktik korupsi umumnya melibatkan kolaborasi antara pihak internal (seperti karyawan perusahaan yang dirugikan) dengan pihak eksternal. Kerja sama antara pihak-pihak yang memiliki hubungan ini tidak diketahui oleh manajemen maupun auditor. Sehingga seiring waktu, tanpa adanya evaluasi atau pembaruan di perusahaan, pelaku mulai menyimpang dan terlibat dalam berbagai jenis praktik korupsi. Dalam hal ini Mahsun (2023) menyebutkan berbagai jenis-jenis praktik korupsi meliputi:

1. *Bribery* (Gratifikasi)

Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang berharga yang diterima atau diberikan dengan tujuan memengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan pihak pemberi.

2. *Kickbacks* (Komisi Tersembunyi)

Komisi tersembunyi merujuk kepada tindakan suap yang diberikan kepada orang yang telah memberikan bisnis atau proyek kepada pihak yang memberikan suap.

3. *Extortion* (Pemerasan)

Pemerasan merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, untuk meminta uang atau barang berharga sebagai imbalan agar tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak yang diperas.

4. *Conflict of Interest* (Konflik Kepentingan)

Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh menggunakan posisinya tersebut untuk kepentingan pribadi.

5. *Money Laundering* (Pencucian Uang)

Pencucian uang merupakan tindakan menyembunyikan sumber dana yang berasal dari tindakan ilegal atau tidak sah, melalui serangkaian transaksi keuangan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006. Disebutkan bahwa terdapat setidaknya enam dampak yang terjadi akibat praktik korupsi.

1. Korupsi dapat merusak demokrasi.
2. Korupsi dapat merusak aturan hukum.
3. Korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan.
4. Korupsi dapat merusak pasar.
5. Korupsi dapat merusak kualitas hidup orang banyak, karena sejatinya anggaran negara yang dikorupsi bisa digunakan untuk membiayai pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara memadai.

6. Terakhir, korupsi dianggap melanggar hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan hak-hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat namun terabaikan karena negara tidak memiliki cukup anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akibat korupsi (Hiariej, 2020).

Adapun perilaku koruptif kerap dipersepsikan memiliki tingkat utilitas subjektif yang tinggi ketika dianggap sebagai sarana instrumental untuk mencapai tujuan penting bagi individu. Sebagai contoh, apabila seseorang meyakini bahwa ia dapat memenangkan kontrak yang menguntungkan dengan menyuap seorang pejabat pemerintah, maka keyakinan tersebut akan meningkatkan kecenderungan untuk mengembangkan sikap yang mendukung terhadap tindakan suap (Bicchieri & Ganegoda, 2017)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya korupsi merupakan tindakan yang bersifat merusak, menyimpang dari aturan hukum, dan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok secara tidak sah. Praktik ini berlangsung secara tersembunyi dan sistematis, sehingga sulit terdeteksi apabila tidak ada pengawasan yang ketat. Hal ini karena sebelum perilaku korupsi terwujud, terdapat faktor penting yang mendasarinya, yaitu niat untuk melakukan korupsi. Praktik korupsi ini terjadi karena adanya niat yang kuat untuk melakukannya. Jenis-jenis korupsi seperti gratifikasi, komisi tersembunyi, pemerasan, dan konflik kepentingan menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan mekanisme.

2.4 Praktik Korupsi Perusahaan Publik dan Non-Publik di Indonesia

Di Indonesia, perusahaan terbagi menjadi dua jenis utama yaitu perusahaan publik dan perusahaan non-publik. Perusahaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda (Tirtasari & Hartomo, 2020). Pada perusahaan publik, umumnya dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, dengan struktur kepemilikan yang kurang fleksibel akibat pembatasan dalam transfer kepemilikan. Serta pemerintah memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan strategis. Sebaliknya, perusahaan non-publik cenderung lebih otonom dan fleksibel dalam menentukan arah kebijakan, serta menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan investasi karena tidak terlalu dibatasi oleh intervensi pemerintah (Fan *et al.*, 2011).

Pada perusahaan publik, jenis praktik korupsi seringkali ditemui dalam lingkungan pemerintahan pusat atau daerah. yang berkaitan dengan persoalan pelayanan publik. Seringkali terjadi dalam hal perizinan atau izin usaha dan penyalahgunaan wewenang (Aslam, 2021). Sementara, praktik korupsi yang melibatkan perusahaan non-publik dapat meliputi praktik penyuapan, penggelapan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Seringkali berpotensi mempengaruhi kebijakan pemerintah atau kepentingan publik untuk keuntungan pribadi atau perusahaan (Riauroikha *et al.*, 2023). Praktik korupsi di lingkungan korporat ini, meningkatkan dampak negatif korupsi terhadap kehidupan konsumen, investor, kreditor, karyawan dan anggota masyarakat lainnya (Barros *et al.*, 2021).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat jumlah kasus praktik korupsi yang melibatkan perusahaan publik dan non-publik, yang ditangani dalam kurun waktu 2019-2023 tertuang dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Kasus Korupsi Perusahaan Publik dan Non-Publik
Tahun 2019-2023

No	Kategori Perusahaan	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah Kasus	Persentase (%)
	Perusahaan Publik							
1	BUMN/BUMD	17	16	8	12	34	87	10.8
2	Kementerian/Lembaga	44	12	19	26	52	153	21.8
3	Pemerintah Provinsi	11	11	5	16	22	65	8.2
4	Pemkab/Pemkot	66	50	75	65	53	309	17.6
	Perusahaan Non-Publik							
1	Swasta	59	31	18	27	57	192	41.6
Total Kasus							806	100

Tabel 2.1 di atas menggambarkan praktik korupsi dalam perusahaan publik dan non-publik. Adapun perusahaan publik diwakilkan oleh instansi pemerintahan seperti BUMN/BUMD, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemkot masih menunjukkan angka yang signifikan. Dari total 806 kasus korupsi yang tercatat selama tahun 2019 hingga 2023, sebesar 76,3% berasal dari perusahaan publik, dengan distribusi terbesar pada sektor Pemerintah Daerah (Pemkab/Pemkot) sebanyak 309 kasus (17,6%) dan Kementerian/Lembaga sebanyak 153 kasus (21,8%). Sementara itu, pada perusahaan non-publik tercatat sebanyak 192 kasus (41,6%) atau sekitar 23,8% dari total keseluruhan kasus.

Meskipun berada di bawah angka perusahaan publik, hal ini tetap menunjukkan bahwa perusahaan non-publik tidak luput dari potensi praktik korupsi.

Selain jumlah kasus korupsi, KPK juga merilis jenis perkara yang melibatkan praktik korupsi. Hal ini tertuang dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jenis dan Jumlah Perkara Praktik Korupsi Tahun 2019-2023

No	Jenis Perkara	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah	Persentase (%)
1	Pengadaan Barang/Jasa/KN	18	27	30	14	62	151	24.5
2	Gratifikasi/Penyuapan	119	55	65	100	85	424	68.7
3	Pungutan/Pemerasan	1	0	0	1	1	3	0.5
4	Penyalahgunaan Anggaran	2	6	3	0	0	11	1.8
5	TPPU	5	3	7	5	8	28	4.5
Total Perkara							617	100

Tabel 2.2 di atas menggambarkan jenis praktik korupsi yang terjadi baik di perusahaan publik maupun non-publik dalam kurun waktu 2019-2023. Dari total 617 kasus, dapat dilihat bahwa jenis perkara korupsi yang paling dominan adalah gratifikasi dan penyuapan, yang mencakup 424 kasus atau sekitar 68,7% dari total keseluruhan kasus. Menurut Barros *et al.* (2019), praktik suap masih menjadi metode utama dalam menjalin hubungan transaksional ilegal antara pelaku usaha dengan pihak otoritas, baik dalam perizinan, proyek pengadaan, maupun pengaruh terhadap kebijakan publik.

Jenis perkara korupsi lain yang menonjol adalah pengadaan barang/jasa/kegiatan negara, dengan jumlah 151 kasus (24,5%). Kasus ini

umumnya terjadi di sektor publik, khususnya dalam perusahaan-perusahaan milik negara atau daerah (BUMN/BUMD). Hal ini karena proses pengadaan sering kali rawan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi tender dan pengaturan kontrak secara illegal (Widoyoko, 2018). Sedangkan jenis korupsi lain seperti pencucian uang (TPPU) mencatatkan 28 kasus (4,5%), diikuti oleh penyalahgunaan anggaran sebanyak 11 kasus (1,8%) dan pungutan/pemerasan yang relatif kecil, hanya 3 kasus (0,5%). Meskipun jumlahnya tidak sebesar jenis lainnya, praktik-praktik ini tetap memberikan dampak serius terhadap iklim investasi, kepercayaan publik, dan pembangunan nasional.

Adapun beberapa praktik korupsi yang melibatkan perusahaan sektor publik dan non-publik di Indonesia. Seperti, praktik korupsi PT. Angkasa Pura II yaitu Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II, Andra Yastrialsyah divonis 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100 juta atas kasus menerima suap sebesar USD 71.000 dan 96.000 dolar Singapura dari Direktur Utama PT. Inti Darman Mappangara. Uang suap diberikan agar PT. Inti menjadi pelaksana pekerjaan pemasangan Semi Baggage Handling System (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 188/K/Pid.Sus/2021). Selain itu, Korupsi PT. Garuda Indonesia yaitu Mantan Direktur Utama PT. Garuda, Emirsyah Satar terbukti menerima suap pengadaan pesawat dan mesin dari Airbus dan Rolls-Royce serta terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas tindakan suapnya tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus TPK/2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka praktik korupsi di Indonesia tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam tata kelola, tetapi juga mengindikasikan adanya

pengaruh yang lebih mendasar seperti budaya dan kepribadian membentuk perilaku dalam organisasi. Sehingga penelitian ini menyoroti nilai-nilai budaya dalam dimensi budaya Hofstede di organisasi dan kepribadian Machiavellianisme sebagai pendekatan penting dalam merumuskan kebijakan anti-korupsi yang berkelanjutan di Indonesia.

2.5 Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara terletak di wilayah timur Indonesia, mencakup bagian utara Kepulauan Maluku. Pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 secara resmi Maluku Utara menjadi provinsi dan melepaskan diri dari Provinsi Maluku. Awalnya, Provinsi Maluku Utara hanya terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota yang diambil dari provinsi induk, yaitu Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kota Ternate (Perkasa, 2025). Seiring berjalannya waktu, Provinsi Maluku Utara mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, wilayah ini telah berkembang menjadi 8 kabupaten dan 2 kota mencakup Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mencakup sektor pertambangan mineral, perikanan, rempah-rempah, hingga pariwisata. Lokasinya yang strategis, berbatasan langsung dengan Filipina dan Samudera Pasifik, menjadikan wilayah ini kaya akan

keanekaragaman hayati laut dan melimpahnya berbagai jenis ikan. Hal ini menjadikan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu daerah unggulan dalam produksi komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi, seperti tuna, cakalang, dan tongkol, yang menjadi andalan ekspor Indonesia (Ambari, 2023).

Selain itu, Provinsi Maluku Utara juga tercatat sebagai salah satu daerah pionir dalam produksi nikel sulfat, yakni jenis nikel yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik atau *Electric Vehicle* (EV). Keberhasilan ini turut memperkuat posisi Indonesia di kancah industri baterai kendaraan listrik global, menjadikannya semakin diperhitungkan dalam rantai pasok internasional (Shiddiq, 2023).

Tidak sampai di situ saja, Provinsi Maluku Utara terkenal sebagai penghasil rempah terbesar di Indonesia, hingga dijuluki sebagai *the spicy island*. Komoditas rempah utama di Provinsi Maluku Utara ialah cengkeh dan pala. Provinsi Maluku Utara juga dikenal sebagai kota seribu benteng karena beragamnya warisan budaya di wilayah tersebut, yang berpotensi menarik wisatawan dari berbagai daerah bahkan negara (Wirawan, 2024).

Meskipun demikian, Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tidak luput dari persoalan praktik korupsi. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertujuan untuk menilai integritas lembaga pemerintah daerah dan kementerian. Tercatat bahwa Provinsi Maluku Utara dengan skor 57,4 menjadikannya sebagai provinsi urutan terbawah di antara seluruh

provinsi. Artinya, Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan skor integritas terendah dan terkorup di Indonesia (Waas, 2025).

Hal ini, dapat tercermin dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Maluku Utara baik yang melibatkan perusahaan publik dan non-publik (swasta), seperti mantan Gubernur Provinsi Maluku Utara Thaib Armaiyn yang terjerat kasus korupsi. Thaib yang pernah menjabat selama dua periode dari 2002-2007 dan 2008-2013 sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara, kemudian dinyatakan bersalah karena menggunakan dana darurat bencana alam tahun 2004 sebesar Rp 6,9 miliar. Dana ini digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ia divonis dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Tidak hanya itu, Vaya Amalia Armaiyn, yang pada 2014 menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara, juga ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi proyek Rencana Tata Ruang Wilayah Maluku Utara dari dana APBD Maluku Utara sebesar Rp 2,3 miliar (Pardede, 2023).

Praktik korupsi lain juga melibatkan pejabat eksekutif di perusahaan pertambangan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Seperti Kristian Wuisan Direktur PT Birinda Perkasa Jaya. Divonis 2,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta karena terbukti melakukan suap atas berbagai proyek yang telah dikerjakan di Provinsi Maluku Utara, kepada mantan Gubernur Provinsi Maluku Utara yaitu Abdul Gani Kasuba. Selain itu Stevi Thomas, Direktur PT Trimegah Bangun Persada Tbk juga menjadi tersangka kasus suap kepada mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Suap diberikan untuk beberapa kebutuhan bisnis perusahaan yang bernaung dalam Harita Group di Provinsi Maluku Utara, yaitu

pinjam pakai kawasan hutan yang membutuhkan berkas dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara pada 2023. Serta, pengurusan pengubahan trase jalan lingkaran Obi yang menjadi proyek strategis nasional di Provinsi Maluku Utara. Lahan yang diinginkan itu sejatinya sudah bukan milik PT Trimegah Bangun Persada (Sawal, 2023; Nuralam, 2024).

Dari uraian di atas maka penelitian ini memiliki urgensi tersendiri dalam upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Maluku Utara. Dengan melihat praktik korupsi tidak hanya dari sisi kelembagaan dan hukum, tetapi juga dari sudut pandang yang lebih holistik dan mendalam. Meliputi kepribadian dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat setempat, yang dapat menjadi faktor memperbesar peluang terjadinya penyimpangan perilaku, seperti praktik korupsi.

2.6 Faktor-Faktor yang Mendasari Niat Melakukan Praktik Korupsi

2.6.1 Faktor Budaya

Secara epistemologi budaya berasal dari bahasa Latin “*colere*” yang berarti mengolah, mengerjakan terutama mengolah tanah atau bertani. Adapun dalam bahasa asing disebut “*culture*” yang sama artinya dengan kebudayaan dalam bahasa Indonesia, pengertian ini kemudian terus berkembang. Budaya selanjutnya diartikan sebagai segala daya upaya dan tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam (Koentjaraningrat, 1985). Definisi ini menandakan bahwa perkembangan kebudayaan seiring dengan proses evolusi manusia, sejak bertahun-tahun lamanya.

Kroeber dan Kluckhohn (1952) mendefinisikan budaya sebagai suatu konsep umum dalam dunia alam, khususnya sebagai bagian dari sifat alami manusia.

Budaya tidak hanya berfungsi untuk mengklasifikasikan berbagai fenomena, tetapi juga berperan dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi. Sedangkan, Parsons (1972) menyatakan bahwa tindakan individu sebagai anggota suatu sistem sosial harus berorientasi pada makna-makna dari sistem simbol budaya, atau apa yang kadang disebut sebagai pola-pola budaya.

Namun, budaya bukanlah kekuatan mistis yang bekerja dari jauh. Budaya sebenarnya terbentuk melalui tindakan nyata dari individu, baik sebagai orang perorangan maupun sebagai bagian dari kelompok. Budaya juga diserap dan dihayati oleh individu, serta menjadi bagian dari lingkungan mereka melalui interaksi dengan orang lain dan melalui berbagai hasil ciptaan manusia seperti bahasa, seni, adat, dan sebagainya. Budaya senriri terbentuk dari adanya tiga gejala kebudayaan yaitu *ideas*, *activities* dan *artifacts* (Honingman, 1959).

Koentjaraningrat (1985) menyebut ketiga gejala tersebut sebagai wujud kebudayaan, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Wujud kebudayaan *ideas*

Wujud kebudayaan *ideas* bersifat abstrak dan tidak dapat diraba, yang berlokasi dalam alam pikiran masyarakat. Jika masyarakat menyatakan ide-ide atau gagasan dalam bentuk tulisan, maka lokasinya berwujud dalam bentuk karangan dan buku hasil karya masyarakat tersebut. Adapun wujud kebudayaan *ideas* dikenal secara luas dengan istilah adat istiadat.

b. Wujud kebudayaan sistem sosial, merujuk kepada tindakan berpola dari manusia itu sendiri, bersifat kongkrit dapat dilihat, dan didokumentasikan karena terjadi di sekeliling kita. Sistem sosial ini terdiri dari berbagai

aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan dan bergaul satu dengan yang lain setiap waktu.

- c. Wujud kebudayaan fisik, berupa seluruh hasil dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia. Sehingga memiliki sifat yang kompleks karena dapat berupa benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan didokumentasikan.

Sementara itu Benedict (1971) menjelaskan bahwasannya memahami budaya tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa budaya itu bersifat lokal, diciptakan oleh manusia, dan sangat beragam. Budaya juga merupakan suatu sistem yang terintegrasi seperti individu, budaya memiliki pola pikir dan perilaku yang saling berkaitan dan cenderung konsisten. Setiap budaya memiliki tujuan khas yang berbeda dari budaya lain dan bentuk yang diambil oleh tindakan-tindakan ini hanya bisa dipahami dengan memahami tatanan emosional dan intelektual dari masyarakat tersebut.

Sejalan dengan Kessing dan Strathern (1998) menjelaskan bahwa budaya merupakan sistem kepercayaan umum yang membentuk budaya itu sendiri. Budaya dapat dianggap sebagai suatu sistem pemikiran. Mencakup pemanfaatan sumber daya alam, dan gaya hidup sehari-hari yang khas dari suatu kelompok masyarakat tertentu.

Disisi lain, Hofstede (1997) mendefinisikan budaya sebagai fenomena kolektif, namun dapat berlaku untuk kelompok yang berbeda-beda yang terdiri atas keragaman individu. Sedangkan, Rohlfer dan Zhang (2016) menjelaskan budaya merupakan keseluruhan yang kompleks, mencakup berbagai hal seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, nilai moral, hukum, adat istiadat, serta berbagai

kemampuan dan kebiasaan lain yang dipelajari dan dimiliki seseorang sebagai bagian dari masyarakat.

Budaya juga berada dalam suatu kontinum dari *tight* (ketat) hingga *loose* (longgar). Budaya *tight* dicirikan oleh keberadaan norma sosial yang kuat, aturan yang tegas, dan tingkat toleransi yang rendah terhadap perilaku yang menyimpang dari norma. Sebaliknya, budaya *loose* memiliki norma sosial yang lebih fleksibel, aturan yang longgar, serta toleransi yang tinggi terhadap perbedaan dan penyimpangan perilaku. Adapun tingkat ketat atau longgarnya suatu budaya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, lingkungan, ancaman sosial, serta nilai-nilai kolektif yang berkembang dalam kelompok tersebut (Wormley *et al.*, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan suatu sistem yang kompleks dan menyeluruh yang terbentuk dari hasil interaksi manusia dengan lingkungannya, serta berkembang melalui proses sejarah dan sosial yang panjang. Budaya mencakup ide-ide, nilai, norma, kebiasaan, serta hasil cipta manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai suatu sistem yang terintegrasi, budaya memengaruhi dan dipengaruhi oleh individu dalam masyarakatnya, serta menjadi landasan dalam membentuk identitas, perilaku, dan struktur sosial yang khas bagi setiap kelompok manusia.

2.6.1.1 Dimensi Budaya Hofstede

Dimensi budaya Hofstede diperkenalkan oleh Geert Hofstede yang merupakan seorang sosiolog dari Belanda, ia menjadi pionir yang membahas mengenai kerangka dimensi budaya. Pada tahun 1970-an kurang lebih secara

kebetulan ia memperoleh akses ke sebuah basis data, berupa hasil survei mengenai nilai-nilai dan sentimen terkait dari orang-orang di lebih dari 50 negara di seluruh dunia dan data tersebut mencakup lebih dari 100.000 kuesioner. Melalui kumpulan data survei tersebut, Hofstede mulai menganalisis budaya dari beberapa negara dan mengelompokkannya ke dalam beberapa dimensi budaya (Hofstede, 2011).

Hasil analisis empiris yang dilakukan Hofstede ini, di terbitkan dalam monograf pertamanya berjudul *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values* tahun 1980. Disebutkan empat dimensi budaya Hofstede yaitu:

- 1 *Individualism* (Individualisme) yaitu kecenderungan individu untuk menjaga diri sendiri dan keluarga terdekatnya, serta mengabaikan kebutuhan masyarakat luas.
- 2 *Uncertainty Avoidance* (Penghindaran Ketidakpastian) yaitu sejauh mana orang-orang dalam suatu masyarakat merasa terancam oleh situasi yang ambigu atau tidak pasti.
- 3 *Masculinity* (Maskulinitas) yaitu tingkat nilai-nilai maskulin yang khas seperti ketegasan, paternalisme, dan kurangnya kepedulian terhadap orang lain.
- 4 *Power Distance* (Jarak Kekuasaan) yaitu tingkat penerimaan oleh suatu masyarakat terhadap distribusi kekuasaan yang tidak merata.

Dimensi budaya kelima kemudian ditambahkan melalui studi empiris oleh Hofstede dan Bond (1988) yang disebut *confucian dynamism* (konfusianisme dinamis). Dimensi ini unik dan menarik karena berfokus pada orientasi waktu dan

nilai-nilai konfusianisme yang didasarkan pada pemikiran filsuf besar Tiongkok, yaitu skor yang tinggi pada dimensi ini mencerminkan kecenderungan suatu budaya terhadap pola pikir yang berorientasi ke masa depan (Robertson & Hoffman, 2000). Dimensi ini menurut Husted (1999), mengacu pada kelompok nilai yang berorientasi jangka panjang (*long-term orientation*) atau berorientasi jangka pendek (*short-term orientation*). Hal ini berkaitan dengan pilihan fokus upaya manusia apakah. masa depan atau masa kini dan masa lalu.

Minkov dan Hofstede (2011) melalui uji empiris terhadap basis data internasional berskala besar, khususnya *World Values Survey* (WVS) yang representatif secara nasional dan dikoordinasikan oleh Ilmuwan Politik Amerika, Ronald Inglehart. Menemukan satu dimensi budaya yang turut melengkapi temuan Hofstede, dimensi tersebut disebut "*indulgence versus restraint*". Dimensi ini berkaitan dengan pemuasan versus pengendalian keinginan dasar manusia yang berhubungan dengan menikmati hidup.

Selanjutnya Hofstede (2011) merangkum isi dari setiap dimensi dengan membandingkan budaya yang memiliki skor rendah dan tinggi, hal ini dilakukan karena hubungan tersebut bersifat statistik, artinya tidak setiap dimensi budaya berlaku sama untuk setiap negara. Adapun rangkuman isi dari setiap dimensi budaya hofstede sebagai berikut:

1. Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan

Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan adalah sejauh mana anggota yang kurang berkuasa dalam organisasi dan lembaga (seperti keluarga) menerima dan

mengharapkan bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Ini mencerminkan adanya ketimpangan (lebih banyak versus lebih sedikit), artinya tingkat ketimpangan dalam suatu masyarakat tidak hanya didukung oleh para pemimpin, tetapi juga diterima oleh para pengikutnya.

Tabel 2.3
Perbedaan antara Jarak Kekuasaan yang Rendah dan Tinggi

Jarak Kekuasaan Rendah	Jarak Kekuasaan
Kekuasaan harus sah dan tunduk pada kriteria baik dan buruk.	Kekuasaan dianggap fakta dasar, sah/tidaknya tidak relevan.
Korupsi jarang terjadi; skandal mengakhiri karier politik.	Korupsi sering terjadi; skandal ditutupi.
Pemerintahan pluralis berdasarkan suara mayoritas dan perubahan damai.	Pemerintahan otoriter berbasis kooptasi, perubahan melalui revolusi.
Bawahan berharap untuk diajak berkonsultasi.	Bawahan berharap diberi tahu apa yang harus dilakukan.
Distribusi pendapatan lebih merata.	Distribusi pendapatan sangat timpang.

2. Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian

Penghindaran Ketidakpastian tidak sama dengan penghindaran risiko, konsep ini berkaitan dengan sejauh mana suatu masyarakat mentoleransi ambiguitas atau ketidakjelasan. Hal ini menunjukkan sejauh mana suatu budaya membentuk anggotanya untuk merasa tidak nyaman atau nyaman dalam situasi yang tidak terstruktur seperti situasi yang baru, tidak dikenal, mengejutkan dan berbeda dari kebiasaan. Sehingga masyarakat cenderung menerapkan aturan yang ketat, menolak perbedaan pendapat, dan meyakini adanya satu kebenaran mutlak untuk menghindari ketidakpastian tersebut.

Tabel 2.4

Perbedaan antara Penghindaran Ketidakpastian yang Lemah dan Kuat

Penghindaran Ketidakpastian Lemah	Penghindaran Ketidakpastian Kuat
Perubahan pekerjaan dianggap biasa.	Tetap di pekerjaan meski tidak suka.
Tidak menyukai aturan, baik tertulis maupun tidak.	Kebutuhan emosional terhadap aturan, bahkan jika tidak ditaati.
Warga merasa mampu dan kompeten terhadap otoritas.	Warga merasa tidak kompeten terhadap otoritas.
Toleran terhadap orang dan ide yang menyimpang; yang berbeda dianggap menarik.	Tidak toleran terhadap perbedaan; yang berbeda dianggap berbahaya.
Dalam agama, filsafat, dan sains: cenderung relatif dan berdasarkan pengalaman.	Dalam agama, filsafat, dan sains: percaya pada kebenaran mutlak dan teori besar.

3. Dimensi Budaya Individualisme vs Kolektivisme

Individualisme di satu sisi berlawanan dengan Kolektivisme di sisi lain, ini adalah ciri masyarakat yang menggambarkan sejauh mana orang-orang terikat dalam kelompok. Masyarakat individualis cenderung mendorong kemandirian, ialah setiap orang bertanggung jawab atas diri sendiri dan keluarga inti. Sebaliknya, dalam masyarakat kolektivis, individu sejak lahir menjadi bagian dari kelompok erat seperti keluarga besar, yang saling melindungi dengan syarat adanya loyalitas penuh.

Tabel 2.5

Perbedaan antara Individualisme dan Kolektivisme

Individualisme	Kolektivisme
Pendapat pribadi diharapkan; satu orang satu suara.	Pendapat dan suara ditentukan oleh kelompok.
Pelanggaran norma menimbulkan rasa bersalah pribadi.	Pelanggaran norma menimbulkan rasa malu terhadap kelompok.

Individualisme	Kolektivisme
Hak privasi dijunjung tinggi.	Menjaga harmoni dan rasa kebersamaan lebih diutamakan.
Tugas lebih penting daripada hubungan pribadi.	Hubungan pribadi lebih penting daripada tugas.
Klasifikasi individu secara pribadi (sebagai individu).	Klasifikasi orang lain berdasarkan kelompok (<i>ingroup</i> vs <i>outgroup</i>).

4. Dimensi Budaya Femininitas-Maskulinitas

Femininitas-Maskulinitas dalam konteks ini, bukan merujuk pada sifat individu, tetapi pada ciri khas suatu masyarakat secara umum. Istilah ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai atau pandangan hidup dibagi antara laki-laki dan perempuan dalam suatu budaya. Setiap masyarakat bisa memiliki pendekatan yang berbeda. Nilai-nilai yang tegas dan kompetitif disebut maskulin, sementara nilai yang peduli dan rendah hati disebut feminin. Dengan kata lain maskulinitas adalah sebuah dimensi yang menekankan pada keberhasilan/kesuksesan materi dan sikap tegas; Sedangkan budaya feminin menekankan pada kualitas hidup, hubungan antarpribadi, dan kepedulian terhadap pihak yang lemah.

Tabel 2.6
Perbedaan antara Femininitas dan Maskulinitas

Femininitas	Maskulinitas
Banyak perempuan dalam posisi politik terpilih.	Hanya sedikit perempuan dalam posisi politik terpilih.
Ayah dan ibu sama-sama berurusan dengan fakta dan perasaan.	Ayah berurusan dengan fakta, ibu dengan perasaan.
Simpati terhadap yang lemah	Kekaguman terhadap yang kuat

Femininitas	Maskulinitas
Keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan.	Pekerjaan lebih diutamakan dibanding keluarga.
Pria dan wanita sebaiknya bersikap sederhana dan peduli.	Pria sebaiknya tegas dan ambisius, wanita bisa juga demikian.

5. Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang vs Jangka Pendek

Dimensi ini merujuk pada kelompok nilai dalam suatu masyarakat, nilai-nilai yang ditemukan pada kutub jangka panjang mencakup ketekunan, hemat, mengatur hubungan berdasarkan status, dan memiliki rasa malu; sedangkan nilai-nilai pada kutub sebaliknya (jangka pendek) mencakup membalas kewajiban sosial, menghormati tradisi, menjaga 'muka', serta kestabilan dan keteguhan pribadi.

Tabel 2.7

Perbedaan antara Orientasi Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Orientasi Jangka Panjang	Orientasi Jangka Pendek
Ada pedoman universal tentang apa yang baik dan jahat.	Apa yang baik dan jahat tergantung pada situasi.
Tradisi dianggap suci dan tidak boleh diganggu gugat.	Tradisi dapat disesuaikan dengan keadaan yang berubah.
Pertumbuhan ekonomi negara miskin lambat atau tidak ada.	Pertumbuhan ekonomi negara cepat hingga mencapai tingkat kemakmuran.
Ada pedoman universal tentang apa yang baik dan jahat.	Apa yang baik dan jahat tergantung pada situasi.
Diharapkan untuk bangga pada negara sendiri.	Berusaha belajar dari negara lain.

6. Dimensi Budaya Pemuasan vs Pengendalian Diri

Pemuasan vs Pengendalian Diri menggambarkan sejauh mana masyarakat mengizinkan pemenuhan keinginan dan kesenangan pribadi. Pada dimensi budaya pemuasan diri menggambarkan masyarakat yang mengizinkan

pemuasan kebutuhan dasar dan keinginan alami manusia secara relatif bebas, terutama yang berkaitan dengan menikmati hidup dan bersenang-senang. Sementara pada dimensi budaya pengendalian diri menggambarkan masyarakat yang menahan atau mengendalikan pemuasan kebutuhan tersebut, serta mengaturnya melalui norma sosial yang ketat.

Tabel 2.8
Perbedaan antara Pemuasan dan Pengendalian Diri

Pemuasan Diri	Pengendalian Diri
Persentase orang yang menyatakan diri mereka sangat bahagia lebih tinggi.	Lebih sedikit orang yang sangat bahagia.
Kebebasan berbicara dianggap penting.	Kebebasan berbicara bukanlah perhatian utama.
Di negara dengan cukup makanan, persentase orang gemuk lebih tinggi.	Di negara dengan cukup makanan, lebih sedikit orang gemuk.
Menjaga ketertiban di negara bukanlah prioritas utama.	Jumlah petugas polisi per 100.000 penduduk lebih tinggi.
Waktu luang dianggap sangat penting.	Waktu luang dianggap kurang penting.

Alipour dan Yaprak (2024) menjelaskan bahwa penerapan dimensi budaya hofstede dapat membantu menjelaskan perilaku individu akibat budaya sosial yang ada di sekelilingnya. Selain itu Farooq *et al.* (2020) budaya memiliki dampak yang kuat terhadap cara berpikir seseorang, dan keputusan mereka bervariasi seiring dengan perubahan nilai-nilai budaya di berbagai negara. Dimensi budaya hofstede ini memengaruhi hasil ekonomi suatu negara yang pada gilirannya berdampak pada berbagai tindakan yang dilakukan.

2.6.2 Faktor Kepribadian

Secara epistemologi sebagian besar para psikolog setuju bahwa kata “kepribadian” berasal dari bahasa Latin *persona*, yang merujuk pada topeng teater yang dikenakan oleh aktor Romawi dalam drama Yunani. Aktor-aktor Romawi kuno ini mengenakan topeng (*persona*) untuk menampilkan peran atau penampilan palsu. Hal ini bukanlah definisi yang dapat diterima, karena istilah “kepribadian”, merujuk pada sesuatu yang lebih dari sekadar peran yang dimainkan seseorang. Namun demikian, para ahli teori kepribadian belum mencapai kesepakatan tentang satu definisi tunggal dari kepribadian (Feist & Feist, 2008).

Allport (1937) menjelaskan bahwa kepribadian merupakan suatu entitas yang nyata dan memiliki fungsi. Ia tidak dapat disamakan dengan perilaku atau aktivitas semata, dan bukan pula sekadar gambaran yang muncul dari tindakan seseorang di mata orang lain. Kepribadian juga merupakan aspek mendasar yang melatarbelakangi perilaku tertentu dan tertanam dalam diri individu.

Seorang psikolog bernama Arnold's (1969) mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan potensi, aktivitas, dan kebiasaan manusia yang diorganisasikan oleh individu, dalam upaya aktif mencapai cita-cita dirinya (Shields & Kappas, 2006). Sejalan dengan definisi tersebut Echavarria (2025) menyebutkan bahwa kepribadian, diarahkan pada realisasi apa yang dikejar oleh seseorang sebagai tujuan hidupnya. Serta Rojas-Saffie *et al.* (2024) menyatakan kepribadian adalah disposisi stabil seseorang terhadap operasi psikisnya. Dengan kata lain, kepribadian mencerminkan bagaimana seseorang secara khas menggunakan pikiran dan

perasaannya dalam menjalani hidup, dan kecenderungan ini menjadi bagian dari identitas dirinya yang stabil.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kepribadian merupakan suatu struktur psikologis yang kompleks dan stabil, yang mencakup pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak yang khas pada diri seseorang, serta diarahkan pada tujuan hidup dan cita-cita dirinya. Oleh karena itu, penelitian tentang kepribadian terhadap praktik korupsi sangat penting dalam menelaah dinamika individu, karena kepribadian menjadi inti dari identitas, motivasi, dan arah hidup seseorang dalam bertindak dan berperilaku.

2.6.2.1 Kepribadian Machiavellianisme

Gagasan *Machiavellianism* pertama kali diperkenalkan oleh Niccolò Machiavelli, seorang filsuf politik asal Italia yang hidup pada abad ke-16. Dalam karya terkenalnya *Il Principe (The Prince)*, Machiavelli menguraikan strategi dan taktik yang dapat digunakan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Kepribadian Machiavellian menggambarkan individu yang cenderung memanfaatkan segala cara demi mencapai tujuannya, termasuk manipulasi, tipu daya, dan kontrol terhadap orang lain (Triantoro *et al.*, 2020).

Hal ini tergambar dalam kisah Ferdinand seorang Raja Spanyol yang melakukan tindakan besar dan beberapa di antaranya luar biasa, seperti menyerang Granada yang membuat para bangsawan kerajaan sibuk dengan perang itu, sehingga mereka hanya memikirkan konflik tersebut dan tidak memikirkan untuk melakukan perubahan. Selain itu, dengan dalih agama ia menggunakan kekejaman yang tampak saleh, yakni mengusir orang Moor dari kerajaannya dan merampas

harta mereka. Ia juga menyerang Afrika dengan dalih yang sama, melancarkan ekspedisi ke Italia, dan Prancis, ia senantiasa merancang proyek-proyek besar yang membuat rakyatnya terus menerus bingung, takjub, dan sibuk menanti hasilnya. Sehingga tidak ada waktu bagi siapa pun untuk menetap dan merencanakan perlawanan terhadapnya. Dengan demikian ia berhasil menjadi raja paling masyhur dan terhormat di dunia Kristen (Machiavelli, 1921).

Wijayanti *et al.* (2023) menjelaskan bahwa individu dengan kepribadian machiavellian umumnya memiliki ambisi kuat yang ingin dicapai dalam situasi tertentu, dan dorongan ambisius yang berlebihan ini membuat mereka cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan tersebut. Sejalan dengan Kurniawan dan Anjarwati (2020) bahwa kepribadian mendorong seseorang untuk mengarahkan sebagian besar tindakannya melalui upaya memperoleh kekuasaan serta memanfaatkan atau memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi.

Kepribadian *Machiavellian* umumnya memiliki kecenderungan untuk mengabaikan norma-norma sosial seperti kehormatan, kesopanan, dan kepercayaan dalam berperilaku. Individu dengan ciri kepribadian ini sering menunjukkan sikap manipulatif dan memprioritaskan kepentingan pribadi di atas nilai-nilai moral. Serta senang mengendalikan, mempengaruhi, memperdaya, dan mengeksploitasi orang lain demi keuntungan sendiri (McLaughlin, 1970).

Dalam psikologi kepribadian, *dark triad* merujuk pada tiga kepribadian gelap dan manipulatif, dimana salah satu kepribadian tersebut ialah kepribadian *machiavellian*. Kepribadian ini digambarkan sebagai pribadi yang memesona, namun pada kenyataannya cenderung arogan, licik, dan akan menyusun siasat

untuk menghadapi situasi apa pun demi keuntungan pribadi, tanpa peduli siapa yang mungkin dirugikan (Goncalves & Campbell, 2014).

Dengan demikian, meneliti kepribadian machiavellian menjadi penting dalam memahami kecenderungan individu terhadap tindakan tidak etis, seperti praktik korupsi. Karakteristik manipulatif, haus kekuasaan, serta kecenderungan untuk mengabaikan nilai-nilai moral dan norma sosial menjadikan individu dengan kepribadian ini berpotensi tinggi terlibat dalam penyimpangan perilaku demi kepentingan pribadi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan antara kepribadian dan budaya terhadap praktik korupsi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan pendekatan dan temuan yang beragam. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian		Metode, Sampel, Alat Analisis & Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
1	Guritno <i>et al.</i> (2021)	• <i>Power Distance</i> (PDI) • <i>Individualism</i> (IDV) • <i>Masculinity</i> (MAS) • <i>Uncertainty Avoidance</i> (UAI)	• <i>Level of Corruption in Developing Country</i> (LoC)	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 59 negara berkembang • Analisis Data: Analisis regresi linier berganda dan analisis regresi kuantil (QR) • Teori: <i>Hofstede's cultural dimensions</i> dan <i>corruption</i>	• PDI (+) → LoC (tidak didukung) • IDV (+) → LoC (didukung) • MAS (+) → LoC (didukung) • UAI (+) → LoC (didukung)
2	Putra dan Sihombing (2024)	• <i>National Culture</i> diproksikan dengan <i>Individualism</i> (IDV) • <i>Institutional Quality</i> (IQ)	• <i>Corruption Risk</i> (CR)	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 92 negara • Alat ukur: Partial Least Square-Structural Equation Model (PLS_SEM) • Teori: <i>Corruption</i>, <i>National Culture</i> dan <i>Institutional quality</i>	• IDV (+) → CR (didukung) • IDV (+) → IQ (didukung) • IQ (+) → CR (didukung) • IQ (+) → CPI (didukung)

Tabel 2.9 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian		Metode, Sampel, Alat Analisis & Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
3	Nainggolan (2022)	• <i>Power Distance</i> (PDI) • <i>Uncertainty Avoidance</i> (UAI) • <i>Individualism</i> (IDV) • <i>Masculinity</i> (MAS) • <i>Long Term Orientation</i> (LTO) • <i>Indulgence</i> (IDG)	• Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	• Metode: Kualitatif • Sampel: 76 negara • Analisis Data: Analisis menggunakan teknik hermeneutika. • Teori: Budaya dan Korupsi	• PDI (+) → IPK (didukung) • UAI (+) → IPK (tidak didukung) • IDV (-) → IPK (didukung) • MAS (+) → IPK (tidak didukung) • LTO (+) → IPK (didukung) • IDG (+) → IPK (didukung)
4	Gayg dan Lajunen (2022)	• <i>Culture Values</i> • <i>Schwartz Value</i> • <i>Eysenck personality factors</i> (EPQ) • <i>Intelligence quotient</i> (IQ) • GDP per capita	• <i>Corruption Perception Index</i> (CPI)	• Metode: Kuantitatif dengan pendekatan desain ekologis. • Sampel: 35 negara untuk EPQ, 46 negara untuk nilai budaya Hofstede, 30 negara untuk dimensi nilai Schwartz, dan 64 negara untuk IQ • Analisis Data: linier berganda dan moderasi • Teori: <i>Hofstede culture</i>, <i>Schwartz culture</i>, <i>National personality</i>, <i>Intelligence</i>, <i>Corruption</i> dan teori Atribusi	Culture Value: • IDV (-) → CPI (didukung) • PDI (+) → CPI (didukung) • MAS (+) → CPI (didukung) • GDP * IDV → CPI (didukung) • GDP * PDI → CPI (tidak didukung) Schwartz Value: • Hierarchy (+) → CPI (didukung) • Mastery (+) → CPI (didukung) • Harmony (+) → CPI (didukung) • EPQ (+) → CPI (tidak didukung) • Intelligence → CPI (didukung) • GDP * Hierarchy → CPI (didukung) • GDP * IQ → CPI (didukung)

Tabel 2.9 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian		Metode, Sampel, Alat Analisis & Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
5	Amalia dan Handayani (2019)	• <i>Power Distance</i> (PDI) • <i>Uncertainty Avoidance</i> (UAI) • <i>Individualism</i> (IDV) • <i>Masculinity</i> (MAS) • <i>Long Term Orientation</i> (LTO) • <i>Indulgence</i> (IDG)	• <i>Fraud Risk</i>	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 81 negara • Analisis data: Regresi Linier Berganda • Teori: Budaya Hofstede dan Fraud	• PDI (+) → Fraud Risk (didukung) • UAI (-) → Fraud Risk (tidak didukung) • IDV (-) → Fraud Risk (didukung) • MAS (+) → Fraud Risk (tidak didukung) • LTO (-) → Fraud Risk (didukung) • IDG (-) → Fraud Risk (didukung)
6	Boateng <i>et al.</i> (2024)	• <i>National Governance</i> (NG) • <i>National Culture</i> (NC)	• <i>Corruption Perception Index</i> (CPI)	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 52 African countries • Analisis data: Regresi regresi linier berganda • Teori: Teori Formal Institutional, and Informal Institutions dan <i>Corruption</i>	National Governance: • VOICE (+) → CPI (tidak didukung) • POL (+) → CPI (tidak didukung) • GOV (+) → CPI (tidak didukung) • REG (+) → CPI (tidak didukung) • RULE (+) → CPI (tidak didukung) National Culture • PDI (+) → CPI (didukung) • UAI (+) → CPI (didukung) • IDV (-) → CPI (didukung) • MAS (+) → CPI (didukung) • NC & GC → CPI (didukung)

Tabel 2.9 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian		Metode, Sampel, Alat Analisis & Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
7	Farooq <i>et al.</i> (2020)	• <i>National Culture</i> (NC) • <i>Capital Structure</i> (CS)	• <i>Firm Financial Performance</i> (FFP)	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 7.623 perusahaan non-keuangan dari 13 negara ekonomi di Asia • Teori: <i>Stewardship theory</i>, <i>Resource dependency theory</i>, <i>stakeholder theory</i> dan <i>Hofstede culture theory</i>	• NC (+) → CS (didukung) • CS (+) → FFP (didukung) • NC (+) → FFP (didukung)
8	Im dan Chen (2020)	• <i>Hofstede Culture</i> (HC) • <i>GLOBE Culture</i> (GC) • <i>Trust</i>	• <i>Favoritism, Nepotism/Cronysm</i> (FNC)	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 57 negara • Analisis: Regresi linear hirarkies dan PLS-SEM • Teori: <i>Hofstede culture</i>, <i>Trust</i> dan <i>Budaya</i> dan hubungannya dengan <i>favoritism</i>	• CLV (+) → FNC (didukung) • UAI (+) → FNC (didukung) • PDI (+) → FNC (didukung) • LTO (-) → FNC (tidak didukung) • GC (+) → FNC (didukung) • Trust → FNC (didukung)
9	Debski <i>et al.</i> (2018)	• <i>Female Participation in Society</i> (FPiS) • <i>Hofstede Culture</i> (HC)	• <i>Level of Corruption</i> (LoC)	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 177 countries • Analisis data: Regresi linear berganda • Teori: <i>Hostede Culture</i> dan <i>Corruption</i>	• FPiS (+) → LoC (didukung) • HC*FPiS → LoC (didukung)

Tabel 2.9 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian		Metode, Sampel, Alat Analisis & Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
10	Wijayanti <i>et al.</i> (2023)	• <i>Machiavellianism Personality</i> (MCP) • <i>Altruism personality</i> (ALT) • <i>Religiusity</i> • <i>Whistleblowing System</i> (WBS) • <i>Accounting Firm Size</i> (AFZ)	• <i>Fraud Intention</i>	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 211 Reponden • Analisis data: Data diuji menggunakan SEM-PLS • Teori: Fraud hexagon theory, Fraud intention, <i>Machiavellian personality</i> dan <i>Altruism</i>	• MCP (+) → <i>Fraud Intention</i> (tidak didukung) • ALT (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • Religiusity (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • WSB*MCP → <i>Fraud Intention</i> (tidak didukung) • WSB*ALT → <i>Fraud Intention</i> (tidak didukung) • WSB * <i>Religiusity</i> → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • AFZ*MCP → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • AFZ*ALT → <i>Fraud Intention</i> (didukung)
11	Triantoro <i>et al.</i> (2020)	• <i>Whistleblowing system</i> (WSB) • <i>Machiavellianism Personality</i> (MCP)	• <i>Fraud Intention</i>	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 75 partisipan • Analisis data: Menggunakan one-two way ANOVA • Teori: <i>Fraud</i>, <i>Wistleblowing system</i> dan <i>Machiavellian personality</i>	• WSB (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • MCP (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • WSB * MCP → <i>Fraud Intention</i> (didukung)

Tabel 2.9 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian		Metode, Sampel, Alat Analisis & Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
12	Manara <i>et al.</i> (2020)	<i>Machiavellianism</i> (MCP) <i>Ethical Leadership</i> (EL) <i>Intuitive Thinking Style</i> (ITS)	<i>Corruption</i>	- Metode: Kuantitatif - Sampel: 321 partisipan - Analisis Data: Menggunakan one-way ANOVA - Teori: <i>Ethical leadership, Machiavellianism, Intuitive thinking style</i> dan <i>Corruption</i>	- EL (-) → <i>Corruption</i> (didukung) - EL*MCP → <i>Corruption</i> (tidak didukung) - EL*ITS → <i>Corruption</i> (didukung) - EL*MCP*ITS → <i>Corruption</i> (tidak didukung)
13	Basri <i>et al.</i> (2023)	<i>Morality</i> <i>Machiavellianism Personality</i> (MCP) <i>Education</i>	<i>Fraud</i>	- Metode: Kuantitatif - Sampel: 251 responden - Analisis data: Menggunakan PLS SEM - Teori: <i>Fraud, Morality</i> dan <i>Machiavellianism</i>	<i>Morality</i> (+) → <i>Fraud</i> (didukung) - MCP (+) → <i>Fraud</i> (didukung) - Edu*<i>Morality</i> → <i>Fraud</i> (didukung) - Edu*MCP → <i>Fraud</i> (didukung)
14	Utami <i>et al.</i> (2019)	<i>Diamond Fraud</i> <i>Machiavellianism Personality</i> (MCP)	<i>Fraud Intention</i>	- Metode: Kuantitatif - Sampel: 419 responden - Analisis Data: Menggunakan one-way ANOVA - Teori: <i>Fraud Diamond, Machiavelliansm</i> dan <i>Fraud Intention</i>	<i>Pressure</i> (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) <i>Opportunity</i> (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) <i>Rationalization</i> (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) <i>Capability</i> (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) - MCP (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) <i>Diamond Fraud</i> & MCP → <i>Fraud Intention</i> (tidak didukung)

Tabel 2.9 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian		Metode, Sampel, Alat Analisis & Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
15	Mulyadi <i>et al.</i> (2023)	• <i>Law Enforcement</i> (LE) • <i>Pressure</i> • <i>Religious Beliefs</i> • <i>Rationality</i> • <i>Machiavellianism Traits</i> (MCT)	• <i>Fraud Intention</i>	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 200 Responden • Alat ukur: Partial Least Square (PLS) • Teori: Atribusi Teori dan <i>Fraud Intention</i>	• LE (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • <i>Pressure</i> (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • <i>Rationality</i> (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • MCT (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • <i>Religious Beliefs</i> (+) → <i>Fraud Intention</i> (tidak didukung)
16	Maharani <i>et al.</i> (2024)	• <i>Machiavellianism Personality</i> (MCP) • <i>Organization Ethical Culture</i> (OEC) • <i>Whistleblowing System</i> (WBS) • <i>Spiritual Intelligence</i> (SI)	• <i>Fraud Intention</i>	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 200 responden • Analisis Data: Menggunakan PLS SEM • Teori: <i>Machiavelliansm</i>, <i>Organization Ethical Culture</i> dan <i>Fraud Hexagon</i>	• MCP (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • OEC (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • WBS (+) → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • SI*MCP → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • SI*OEC → <i>Fraud Intention</i> (didukung) • SI*WBS → <i>Fraud Intention</i> (didukung)

Tabel 2.9 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian		Metode, Sampel, Alat Analisis & Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
17	Setyaki dan Andreas (2022)	• <i>Machiavellianism Personality</i> (MCP) • <i>Gender</i> • <i>Personality Type</i> (PT) • <i>Academic Environmental</i> (AE)	• <i>Academic Fraud Behavior</i> (AFB)	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 91 Responden • Analisis Data: Analisis regresi linear berganda • Data: Primer • Teori: <i>Ethical egoism theory, Machiavellian attitude, Gender, Personality Type, Academic Fraud dan Academic Environmental Pressures</i>	• MCP (+) → AFB (didukung) • Gender (+) → AFB (didukung) • PT (+) → AFB (didukung) • AE*MCP → AFB (didukung) • AE*Gender → AFB (didukung) • AE*PT → AFB (didukung)
18	Suryandari dan Valentin (2021)	• <i>Hexagon Fraud</i> • <i>Love of Money</i> (LoM) • <i>Machiavellianism Personality</i> (MCP) • <i>Religiusitas</i>	• <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa (FP-DD)	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 203 Responden • Analisis Data: Menggunakan PLS SEM • Teori: Teori Hexagon dan Teori Atribusi	• <i>Pressure</i> (+) → FP-DD (didukung) • <i>Rasionalization</i> (+) → FP-DD (didukung) • <i>Capability</i> (+) → FP-DD (didukung) • <i>Arogansi</i> (+) → FP-DD (didukung) • <i>Opportunity</i> (+) → FP-DD (tidak didukung) • <i>Kolusi</i> (+) → FP-DD (tidak didukung) • <i>LoM</i> (+) → FP-DD (tidak didukung) • <i>MCP</i> (+) → FP-DD (didukung) • <i>Religiusitas*Hexagon Fraud</i> → FP-DD (tidak didukung) • <i>Religiusitas*MCP</i> → FP-DD (tidak didukung) • <i>Religiusitas*LoM</i> → FP-DD (didukung)

Tabel 2.9 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel Penelitian		Metode, Sampel, Alat Analisis & Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
19	Parawansa dan Winarto (2024)	• <i>Love of Money</i> (LoM) • <i>Machiavellianism Personality</i> (MCP) • <i>Islamic Work Ethics</i> (IWE)	• <i>Fraud Accounting</i>	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 66 Responden • Analisis Data: Menggunakan PLS SEM • Teori: <i>Fraud</i> Hexagon dan <i>Fraud Accounting</i>	• LoM (+) → <i>Fraud Accounting</i> (didukung) • MCP (+) → <i>Fraud Accounting</i> (didukung) • IWE*LoM → <i>Fraud Accounting</i> (tidak didukung) • IWE*MCP → <i>Fraud Accounting</i> (tidak didukung)
20	Carré <i>et al.</i> (2020)	• <i>Machiavellianism Personality</i> (MCP) • <i>Psychopathy</i> • <i>Narcissism</i>	• <i>Legal Profit</i> (LP) • <i>Illegal Profit</i> (ILP)	• Metode: Kuantitatif • Sampel: 734 responden • Teori: <i>Machiavellian</i>, <i>Triad Dark</i> dan <i>Perceiving opportunities for legal and illegal profit</i>	• MCP (+) → Pencapaian ILP (didukung) • MCP (+) → Pencapaian LP (tidak didukung) • Psychopathy (-) → Pencapaian ILP dan LP (didukung) • Narcissism (-) → Pencapaian ILP dan LP (didukung)

Tabel di atas telah menguraikan beberapa penelitian terdahulu, yang mengkaji secara empiris pengaruh dimensi budaya Hofstede ataupun kepribadian machiavellianisme terhadap praktik korupsi. Terdapat berbagai macam variabel lain yang dapat ditemukan misalnya variabel independen seperti *Institutional Quality*, *Schwartz Value*, EPQ (*Eysenck Personality Questionnaire*), *National Governance*, *GLOBE Culture*, *Female Participation in Society*, *Altruistic Personality*, *Religiosity*, *Personality Type*, *Whistleblowing System*, *Ethical Leadership*, *Law Enforcement*, *Morality*, *Diamond Fraud*, *Hexagon Fraud*, *Love of Money*, *Psychopathy*, *Narcissism* dan Gender. Maupun variabel moderasi seperti GDP (*Gross Domestic Product*), *Accounting Firm Size*, *Intuitive Thinking Style*, *Trust*, *Education*, *Academic Environmental* dan *Islamic Work Ethics*.

Selain keberagaman variabel dalam setiap penelitian terdahulu, semua penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dari metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian terkait kepribadian machiavellianisme metode yang digunakan umumnya bersumber dari data primer berupa kuesioner dan sampel penelitian meliputi individu. Sedangkan penelitian terkait budaya Hofstede umumnya menggunakan data sekunder dengan sampel penelitian berskala negara. Sementara itu, teori yang digunakanpun beragam misalnya teori *formal dan informal institutional*, teori *fraud hexagon*, teori *fraud diamond*, teori *ethical leadership* serta teori atribusi.

Dengan keberagaman variabel dan metode yang digunakan, hasil penelitian pun turut beragam. Di antaranya, penelitian oleh Amalia dan Handayani, (2019); Nainggolan, (2022); Gayg dan Lajunen, (2022); Boateng *et al.* (2024) yang

menemukan bahwa dimensi *power distance* berpengaruh terhadap praktik korupsi. Namun penelitian oleh Guritno *et al.* (2021) menemukan bahwa dimensi *power distance* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik korupsi. Penelitian lain oleh Guritno *et al.* (2021); Gayg dan Lajunen, (2022); Boateng *et al.* (2024); Im dan Chen, (2020) menemukan bahwasannya dimensi *masculinity* memiliki pengaruh terhadap praktik korupsi, namun penelitian oleh Amalia dan Handayani (2019) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh dimensi budaya *masculinity* terhadap praktik korupsi.

Selanjutnya, dimensi budaya *Uncertainty Avoidance* dalam penelitian oleh Guritno *et al.* (2021); Boateng *et al.* (2024); Im dan Chen, (2020) ditemukan memiliki pengaruh terhadap praktik korupsi. Namun, penelitian oleh Amalia dan Handayani, (2019); Nainggolan, (2022) ditemukan tidak terdapat pengaruh dimensi budaya *Uncertainty Avoidance* terhadap praktik korupsi. Penelitian lain terkait dimensi *Long Term-Short Term Orientation* yang dilakukan oleh Amalia dan Handayani, (2019; Nainggolan, (2022); Im dan Chen, (2020) bahwasannya dimensi LTO menunjukkan masyarakat yang lebih korup, sementara STO tidak. Kemudian penelitian oleh Farooq *et al.* (2020; Debski *et al.* (2018) menemukan bahwasannya secara keseluruhan dimensi budaya Hofstede berpengaruh terhadap praktik korupsi, serta dapat memperkuat hubungan *female participation in society* terhadap praktik korupsi.

Disisi lain dalam penelitian terkait kepribadian machiavellianisme yang dilakukan oleh Triantoro *et al.* (2020; Basri *et al.* (2023; Utami *et al.* (2019; Mulyadi *et al.* (2023; Maharani *et al.* (2024) menemukan bahwasannya kepribadian

machiavellianisme berpengaruh terhadap *fraud intention* dan praktik korupsi secara lebih khusus. Menurut Wijayanti *et al.* (2023); Basri *et al.* (2023); Maharani *et al.* (2024); Parawansa dan Winarto, (2024) variabel moderasi seperti *whistleblowing system, education, islamic work ethics, academic environmental* dan *accounting firm size* dapat memperkuat hubungan kepribadian *machiavellianism* terhadap *fraud intention*. Selain itu penelitian oleh Carré *et al.* (2020) menunjukkan bahwa kepribadian *Machiavellianism* berpengaruh terhadap pencapaian keuntungan yang ilegal.

2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan adalah sejauh mana anggota yang kurang berkuasa dalam organisasi dan lembaga (seperti keluarga) menerima dan mengharapkan bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata (Hofstede, 2011). Menurut Guritno *et al.* (2021) dalam masyarakat dengan dimensi jarak kekuasaan yang tinggi, keberadaan hierarki dianggap sebagai suatu kebutuhan, bukan sekadar kemudahan. Sebaliknya, masyarakat dengan dimensi jarak kekuasaan rendah lebih menekankan pentingnya kesetaraan hak bagi semua orang, dibandingkan dengan pengutamaan hak istimewa bagi mereka yang memiliki kekuasaan lebih besar. Selain itu tingginya dimensi jarak kekuasaan menandakan bahwasannya ketidaksetaraan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, adapun pihak yang berkuasa berhak atas berbagai hak istimewa, dan warga negara tidak dipandang setara di hadapan hukum (Gayg & Lajunen, 2022).

Berdasarkan hasil survei dimensi budaya Hofstede (diakses: www.geerthofstede.com), Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki dimensi jarak kekuasaan yang tinggi dengan skor 78/100. Sehingga Indonesia cenderung dipersepsi sebagai negara dengan tingkat praktik korupsi yang tinggi (Nainggolan, 2022). Menurut Amalia dan Handayani (2019) praktik korupsi dapat terjadi karena di dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi, posisi atasan memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dan orang dengan kedudukan yang lebih tinggi harus selalu dipatuhi serta ditaati. Hal ini sejalan dengan fenomena praktik korupsi yang terjadi di Indonesia, terkhusus di Provinsi Maluku Utara.

Dalam konteks daerah tersebut, berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik mencerminkan kuatnya dominasi kekuasaan serta lemahnya kontrol sosial dan institusional. Struktur sosial yang hierarkis menyebabkan bawahan enggan mempertanyakan kebijakan atau tindakan atasan, bahkan ketika tindakan tersebut menyimpang atau merugikan publik (Mihret, 2014).

Penelitian oleh Boateng *et al.* (2024; Amalia dan Handayani, (2019); Gay dan Lajunen, (2022), menunjukkan bahwasannya jarak kekuasaan memiliki pengaruh terhadap praktik korupsi. Karena ketimpangan distribusi kekuasaan dianggap sesuatu yang normal dan dapat diterima. Sehingga, posisi subordinat menerima superioritas manajer senior dan pejabat pemerintah yang mendorong munculnya budaya favoritisme dan nepotisme, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat korupsi.

Dalam konteks ini, *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana budaya jarak kekuasaan memengaruhi niat individu dalam

melakukan praktik korupsi. Budaya hierarkis yang menekankan kepatuhan terhadap atasan dapat membentuk norma subjektif yang mendorong individu untuk menerima, membenarkan, bahkan merasionalisasi tindakan koruptif. Sehingga, dimensi budaya jarak kekuasaan dapat memengaruhi keyakinan perilaku seseorang yang mendasari niatnya untuk melakukan praktik korupsi.

Dengan demikian, sebagai hasil dari diskusi di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut ini:

H1.a: Dimensi budaya jarak kekuasaan berpengaruh positif terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

2.8.2 Pengaruh Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian berkaitan dengan sejauh mana suatu masyarakat mentoleransi ambiguitas atau ketidakjelasan (Hofstede, 2011), maupun situasi yang tidak terstruktur (Im & Chen, 2020). Minkov dan Hofstede (2011) menjelaskan bahwa dimensi ini menunjukkan seberapa besar keinginan masyarakat terhadap adanya aturan yang jelas dan harus dipatuhi bersama. Artinya, masyarakat mengharapkan orang lain mengikuti aturan, tetapi bukan berarti setiap orang dalam masyarakat itu punya tingkat kepatuhan yang sama terhadap aturan tersebut.

Dimensi budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi menunjukkan kebutuhan akan kepastian dan struktur, biasanya dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis. Pada masyarakat dengan dimensi budaya penghindaran ketidakpastian yang rendah, ketidakpastian dianggap sebagai hal yang normal dan

setiap hari dijalani sebagaimana adanya (Im & Chen, 2020). Menurut Guritno *et al.* (2021) dimensi budaya dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi berusaha meminimalkan ambiguitas dengan menerapkan aturan, regulasi, dan norma sosial yang mengecam perilaku menyimpang. Sementara, dimensi budaya dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang rendah lebih menerima penyimpangan dan kekacauan.

Berdasarkan hasil survei dimensi budaya Hofstede (diakses: www.geerthofstede.com), Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki dimensi penghindaran ketidakpastian yang moderat dengan skor 48/100. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menghargai keberadaan struktur dan aturan, namun tetap mampu beradaptasi dalam situasi yang tidak pasti atau berubah-ubah.

Penelitian oleh Nainggolan (2022) menunjukkan tingkat persepsi korupsi tidak secara langsung dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya budaya penghindaran ketidakpastian suatu negara. Baik negara dengan skor tinggi maupun rendah dalam dimensi ini memiliki peluang yang sama untuk dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi atau rendah.

Namun, penelitian oleh Amalia dan Handayani, (2019); Guritno *et al.* (2021); Boateng *et al.* (2024) bahwasannya tingginya tingkat penghindaran terhadap ketidakpastian menunjukkan bahwa individu dalam masyarakat tersebut cenderung merasa gelisah atau tidak aman ketika menghadapi situasi yang tidak jelas atau tidak terstruktur. Sehingga hal ini, akan akan mendorong terjadinya korupsi, karena individu lebih memilih mempertahankan cara-cara lama mereka

daripada mengambil risiko menghadapi ketidakpastian. Selain itu, praktik korup yang berkelanjutan disebabkan oleh pejabat publik yang cenderung menolak reformasi karena takut akan masa depan yang tidak pasti yang muncul jika melakukan perubahan. Banyaknya aturan yang terbentuk justru tidak dapat meminimalisaasi risiko kecurangan. Oleh karena itu, kondisi ini sering kali dikaitkan dengan tingginya tingkat korupsi.

Hal ini didukung dengan *attitude toward the behavior* dalam teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku terbentuk melalui keyakinan individu akan menghasilkan suatu konsekuensi dari perilakunya (Ajzen, 2020). Dengan demikian, individu yang berada dalam budaya penghindaran ketidakpastian cenderung memiliki keyakinan bahwa praktik korupsi lebih mudah dilakukan, dibandingkan menghadapi ketidakpastian secara sah. Sehingga mendorong niat melakukan tindakan tidak etis seperti praktik korupsi.

Dengan demikian, sebagai hasil dari diskusi di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut ini:

H1.b: Dimensi budaya penghindaran ketidakpastian berpengaruh positif terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

2.8.3 Pengaruh Dimensi Budaya Kolektivisme Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Dimensi Budaya kolektivisme menggambarkan individu yang sejak lahir menjadi bagian dari kelompok erat seperti keluarga besar, yang saling melindungi dengan syarat adanya loyalitas penuh. Sementara, masyarakat individualis

cenderung mendorong kemandirian, yaitu setiap orang bertanggung jawab atas diri sendiri dan keluarga inti (Hofstede, 2011).

Menurut Guritno *et al.* (2021) dalam masyarakat individualis, terdapat rasa “Saya” yang kuat. Artinya bahwa identitas pribadi seseorang dianggap terpisah dari orang lain. Sementara itu, dalam masyarakat kolektivis, terdapat rasa “kita” yang kuat, artinya terdapat ketergantungan praktis dan psikologis yang saling terkait antara individu dengan kelompoknya.

Berdasarkan hasil survei dimensi budaya Hofstede (diakses: www.geerthofstede.com), Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat individualisme yang rendah dengan skor 14/100. Artinya mayoritas masyarakat Indonesia lebih mengedepankan nilai-nilai kolektivisme, yaitu kepentingan kelompok, keluarga, atau komunitas lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Dalam konteks ini, Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari Indonesia juga menunjukkan karakteristik masyarakat kolektivis yang kental. Fearon (2003) menjelaskan bahwasannya budaya tersebut menekankan pentingnya hubungan kekerabatan, gotong royong, dan kepatuhan terhadap tokoh adat maupun pemimpin komunitas.

Penelitian oleh Putra dan Sihombing, (2024; Nainggolan, (2022); Gayg dan Lajunen, (2022); Im dan Chen, (2020); Amalia dan Handayani, (2019) menunjukkan adanya pengaruh positif antara dimensi budaya kolektivisme terhadap praktik korupsi. Sehingga, masyarakat dengan budaya kolektivisme cenderung memiliki indeks persepsi korupsi lebih rendah, artinya korupsi di negara

tersebut dipersepsi lebih buruk dibandingkan negara dengan budaya individualisme.

Hal ini disebabkan oleh karakter masyarakat kolektivis yang menjunjung tinggi hubungan kelompok yang erat dan kohesif. Dalam budaya ini, individu merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kelompoknya sebagai bentuk timbal balik atas rasa memiliki dan loyalitas yang diberikan kelompok. Loyalitas tersebut sering kali mendorong individu untuk membela dan menjaga kepentingan kelompok, bahkan ketika tindakan yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai etika. Karena tindakan tersebut dilakukan secara kolektif dan tersembunyi di balik solidaritas kelompok, maka sering kali sulit terdeteksi atau diidentifikasi secara individu (Amalia & Handayani, 2019; Yeganeh, 2014). Selain itu, dalam masyarakat kolektif terdapat praktik “pemberian hadiah” yang batasnya tidak jelas, sehingga berpotensi terjadi praktik korupsi (Guritno *et al.*, 2021).

Hal ini menjadi relevan dengan teori perilaku terencana, di mana norma subjektif memiliki pengaruh yang kuat karena individu cenderung menyesuaikan tindakannya dengan harapan kelompok. Apabila korupsi dianggap hal yang lumrah atau dipandang sebagai bentuk kewajiban demi menjaga solidaritas serta kepentingan bersama, maka tekanan sosial tersebut akan memperbesar kecenderungan individu untuk berniat melakukan tindakan korupsi.

Dengan demikian, sebagai hasil dari diskusi di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut ini:

H1.c: Dimensi budaya kolektivisme berpengaruh positif terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

2.8.4 Pengaruh Dimensi Budaya Maskulinitas Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Dimensi Budaya Maskulinitas merujuk pada ciri khas suatu masyarakat secara umum, dimana setiap masyarakat bisa memiliki pendekatan yang berbeda. Nilai-nilai yang tegas dan kompetitif disebut maskulin, sementara nilai yang peduli dan rendah hati disebut feminin. (Hofstede, 2011). Menurut Guritno *et al.* (2021) dalam masyarakat yang maskulin, orang cenderung berfokus pada pencapaian pribadi, kesuksesan materi dan pentingnya status. Sementara itu dalam masyarakat yang feminin, orang lebih memperhatikan kualitas hidup, kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung, memastikan adanya waktu luang dan mencari kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil survei dimensi budaya Hofstede (diakses: www.geerthofstede.com), Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat *masculinity* yang moderat dengan skor 46/100. Artinya, nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia berada di antara orientasi maskulin dan feminin. Di satu sisi, masyarakat masih menghargai pencapaian, keberhasilan, dan pengakuan status sosial. Namun di sisi lain, terdapat pula perhatian terhadap kualitas hidup, keharmonisan, dan kepedulian terhadap sesama. Fenomena ini relevan dengan apa yang terjadi di Provinsi Maluku Utara, yaitu masyarakat lokal menunjukkan rasa bangga terhadap pencapaian, status sosial, serta simbol-simbol keberhasilan seperti jabatan dan kekayaan. Namun pada saat yang sama, kehidupan komunal, solidaritas antar warga, serta perhatian terhadap keseimbangan hidup dan nilai kekeluargaan tetap dijaga (Ibrahim *et al.*, 2023).

Menurut Nainggolan (2022) negara dengan budaya feminin dan negara dengan budaya maskulin tidak terdapat arah yang jelas. Tidak dapat disimpulkan bahwa negara dengan budaya feminin memiliki kecenderungan korupsi yang lebih tinggi, daripada negara dengan budaya maskulin. Namun, penelitian oleh Amalia dan Handayani (2019); Im dan Chen (2020); Yeganeh (2014) menunjukkan bahwa kejahatan keuangan dan korupsi banyak terjadi pada negara yang memiliki profil maskulinitas tinggi. Hal ini karena masyarakat maskulin memiliki ambisi besar agar dapat meraih kesuksesan materi sangat tinggi, dan mentoleransi praktik-praktik yang dipertanyakan. Dengan demikian, "tujuan akhir" dianggap lebih penting daripada "cara" yang digunakan untuk mencapainya.

Sehingga teori perilaku terencana merupakan kerangka yang relevan, karena dimensi budaya maskulinitas dapat memengaruhi niat seseorang untuk melakukan praktik korupsi melalui orientasi nilai yang dipegang masyarakat. Dalam budaya maskulin, sikap terhadap perilaku cenderung dipengaruhi oleh ambisi, keinginan akan status, dan pencapaian materi. Hal ini dapat mendorong seseorang melihat korupsi sebagai jalan cepat untuk mencapai kesuksesan.

Dengan demikian, sebagai hasil dari diskusi di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut ini:

H1.d: Dimensi budaya maskulinitas berpengaruh positif terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

2.8.5 Pengaruh Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Dimensi budaya orientasi jangka panjang merujuk pada kelompok nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang mencakup ketekunan, hemat, mengatur hubungan berdasarkan status dan memiliki rasa malu. Sedangkan dimensi budaya orientasi jangka pendek mencakup nilai-nilai budaya seperti menunaikan kewajiban sosial, menghormati tradisi, menjaga 'muka', serta kestabilan dan keteguhan pribadi (Hofstede, 2011; Guritno *et al.*, (2021).

Secara sederhana menurut Amalia dan Handayani (2019) dimensi budaya orientasi jangka panjang menggambarkan masyarakat yang memprioritaskan nilai-nilai berkaitan dengan masa depan, seperti ketekunan dan hidup hemat. Negara-negara dengan budaya orientasi jangka panjang cenderung memiliki masyarakat yang memikirkan secara matang setiap keputusan yang diambil saat ini, karena mereka meyakini bahwa keputusan tersebut akan membawa konsekuensi penting di masa depan.

Berdasarkan hasil survei dimensi budaya Hofstede (diakses: www.geerthofstede.com), Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat orientasi jangka panjang yang tinggi dengan skor 62/100. Artinya, masyarakat Indonesia cenderung menghargai nilai-nilai yang berfokus pada masa depan, seperti kesabaran, ketekunan, serta sikap hemat dan hati-hati dalam bertindak. Dengan demikian hal yang sama juga relevan dengan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara, hal ini tercermin dalam cara masyarakat menjaga hubungan

sosial, memelihara kearifan lokal, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam (Setyaningrum, 2022).

Penelitian oleh Mihret (2014); Amalia dan Handayani (2019) menunjukkan bahwasannya kejahatan keuangan meningkat pada negara yang memiliki orientasi jangka pendek, sementara negara dengan orientasi jangka panjang mencerminkan masyarakat yang fokus pada penanaman dan pemeliharaan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebaikan di masa depan seperti kegigihan dan penghematan.

Hal ini sejalan dengan dengan *perceived behavior control* di dalam teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa seseorang dengan seperangkat keyakinan dapat melakukan kontrol atas suatu tindakan yang akan dilakukan (Ajzen, 2012). Sehingga, masyarakat dengan budaya orientasi jangka panjang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan saat ini, karena diyakini bahwa setiap tindakan yang diambil sekarang akan membawa pengaruh signifikan terhadap kondisi di masa mendatang.

Dengan demikian, sebagai hasil dari diskusi di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut ini:

H1.e: Dimensi budaya orientasi jangka panjang berpengaruh negatif terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

2.8.6 Pengaruh Dimensi Budaya Pemuasan Diri Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Dimensi Budaya Pemuasan Diri menggambarkan sejauh mana masyarakat mengizinkan pemenuhan keinginan dan kesenangan pribadi. Pada dimensi budaya pemuasan diri yang tinggi masyarakat cenderung menjadikan pemenuhan

kebutuhan dasar dan keinginan alami manusia secara relatif bebas, terutama yang berkaitan dengan menikmati hidup dan bersenang-senang. Sebaliknya jika bernilai rendah menggambarkan masyarakat yang menahan atau mengendalikan pemuasan kebutuhan tersebut, serta mengaturnya melalui norma sosial yang ketat (Hofstede, 2011).

Menurut Guritno *et al.* (2021) pada masyarakat yang memiliki dimensi budaya pemuasan diri tinggi mencerminkan sikap positif dan pandangan bahwa seseorang bebas bertindak sesuai keinginannya. Sebaliknya, dalam masyarakat yang menahan diri, pemenuhan kebutuhan dikendalikan oleh norma sosial yang ketat dan waktu luang dianggap kurang penting.

Berdasarkan hasil survei dimensi budaya Hofstede (diakses: www.geerthofstede.com), Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pemuasan diri yang rendah dengan skor 36/100. Artinya bahwa masyarakat Indonesia cenderung menahan diri (*restraint*), hal ini menunjukkan tingkat pesimisme yang lebih tinggi dan norma sosial membatasi atau mengatur pemuasan terhadap keinginan pribadi (Minkov & Hofstede, 2011).

Penelitian oleh Nainggolan (2022) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki budaya menahan diri (*restraint*) cenderung menerapkan pengaturan perilaku dan pembatasan terhadap kesenangan pribadi yang lebih ketat melalui norma sosial. Kondisi ini berimplikasi pada tingkat korupsi yang relatif lebih rendah, karena individu dihadapkan pada kontrol sosial yang kuat terhadap perilakunya. Sebaliknya, pada masyarakat dengan tingkat pemuasan diri (*indulgence*) yang tinggi, individu lebih berorientasi pada pencapaian kebahagiaan

dan kesejahteraan pribadi. Orientasi tersebut dapat mendorong individu untuk menghalalkan berbagai cara demi mencapai tujuan tersebut, sehingga meningkatkan niat untuk melakukan perilaku yang tidak etis dan korup (Amalia & Handayani, 2019).

Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku terbentuk melalui formulasi *expectancy-value*, yaitu keyakinan individu mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu perilaku (Ajzen, 2020). Sehingga seseorang dengan budaya pemuasan diri yang tinggi cenderung memiliki sikap lebih permisif terhadap perilaku, yang dapat memberikan kepuasan pribadi termasuk perilaku tidak etis, apabila dipersepsikan mampu meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan.

Dengan demikian, sebagai hasil dari diskusi di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut ini:

H1.f: Dimensi budaya pemuasan diri berpengaruh positif terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

2.8.7 Pengaruh Kepribadian Machiavellianisme Terhadap Motivasi Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Kepribadian Machiavellianisme pertama kali diperkenalkan oleh Niccolò Machiavelli, seorang filsuf politik asal Italia yang hidup pada abad ke-16 (Wijayanti *et al.*, 2023). Menurut Kurniawan dan Anjarwati (2020) bahwasannya kepribadian machiavellian dipahami sebagai suatu pola perilaku individu yang bersifat manipulatif cenderung mendapatkan keuntungan lebih besar melalui tindakannya.

Umumnya mereka bertindak secara tidak etis, dengan bersedia melakukan apa pun, termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan, demi mencapai tujuan pribadi.

Menurut Suryandari dan Valentin (2021) kepribadian machiavellian dapat memberikan dampak negatif terhadap suatu profesi. Hal ini disebabkan karena mereka yang memiliki sifat tersebut cenderung berpikiran manipulatif dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, Seseorang dengan kepribadian Machiavellian cenderung memusatkan tindakannya pada upaya memperoleh kekuasaan serta memanipulasi orang lain demi keuntungan diri sendiri (Triantoro *et al.*, 2020).

Kepribadian ini juga menggambarkan perilaku yang mementingkan diri sendiri demi menjaga posisi yang aman dan menguntungkan, sehingga mereka cenderung memiliki hubungan sosial yang terbatas, karena kurang memperhatikan nilai moral dan loyalitas yang rendah (Parawansa & Winarto, 2024). Dengan demikian seseorang dengan kepribadian machiavellian memiliki potensi untuk melakukan *fraud* khususnya praktik korupsi.

Beberapa penelitian terdahulu oleh Maharani *et al.* (2024); Basri *et al.* (2023); Triantoro *et al.* (2020) menunjukkan bahwasannya kepribadian machiavellianisme berpengaruh terhadap praktik korupsi, karena individu dengan tingkat Machiavellian yang tinggi cenderung bersifat egois dan lebih mudah mengambil keputusan yang tidak etis.

Selain itu, menurut Wijayanti *et al.* (2023); Suryandari dan Valentin, (2021); Parawansa dan Winarto, (2024) bahwasannya individu dengan kepribadian machiavellian cenderung lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Sikap ini tidak selalu ditunjukkan melalui tindakan yang

merugikan orang lain seperti perilaku egois, komunikasi yang buruk, dan kurangnya loyalitas.

Berdasarkan teori perilaku terencana maka seorang machiavellian lebih mungkin melakukan tindakan korupsi karena dorongan internal yang berasal dari karakter manipulatif, egois dan rendahnya komitmen terhadap nilai-nilai moral. sikap terhadap perilaku menjadikannya cenderung memandang korupsi sebagai sarana yang wajar untuk mencapai tujuan pribadi.

Dengan demikian, sebagai hasil dari diskusi di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut ini:

H2: Kepribadian machiavellianisme berpengaruh positif terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

2.8.8 Pengaruh Jenis Organisasi dalam Memoderasi Hubungan Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Praktik korupsi yang terjadi pada organisasi publik merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam lingkungan pemerintahan. Para pejabat publik yang seharusnya menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat, justru kerap memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan ini bertentangan dengan tujuan utama pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat luas (Aiman, 2024; Kassem & Higson, 2017).

Praktik korupsi juga terjadi di organisasi swasta, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) menyebutkan praktik korupsi di sektor swasta dapat meliputi praktik seperti suap, penggelapan, dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan

lainnya yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau korporasi, yang pada akhirnya dapat merugikan perekonomian dan persaingan usaha yang sehat (Hiariej, 2020). Hal ini sejalan dengan fenomena praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara yang melibatkan pejabat publik dan eksekutif swasta.

Dalam penelitian ini, dimensi budaya Hofstede diposisikan sebagai faktor eksternal yang dapat membentuk persepsi, sikap, dan tindakan individu dalam lingkungan kerja baik di sektor publik maupun non-publik. Termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan niat melakukan praktik korupsi (Farooq *et al.*, 2020). Sehingga, lingkungan kerja yang terbentuk oleh budaya tertentu dapat menciptakan kondisi yang secara tidak langsung mendorong atau memaklumi perilaku koruptif.

Di sisi lain, kepribadian machiavellianisme dipahami sebagai faktor internal yang mencerminkan karakter individu yang manipulatif, oportunistik, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pribadi tanpa memperhatikan norma moral dan etika (Triantoro *et al.*, 2020). Manara *et al.* (2020) menyatakan bahwa individu dengan kecenderungan machiavellian tinggi cenderung melihat orang lain sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi, dan tidak segan untuk menggunakan cara-cara tidak etis, termasuk korupsi, demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Namun demikian, kecenderungan niat melakukan praktik korupsi akan berbeda antara organisasi publik dan swasta. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sistem kontrol internal, mekanisme akuntabilitas dan budaya organisasi yang tumbuh di tengah perusahaan. Sehingga berpotensi memengaruhi faktor

budaya hofstede maupun kepribadian machiavellianisme terhadap niat berperilaku koruptif.

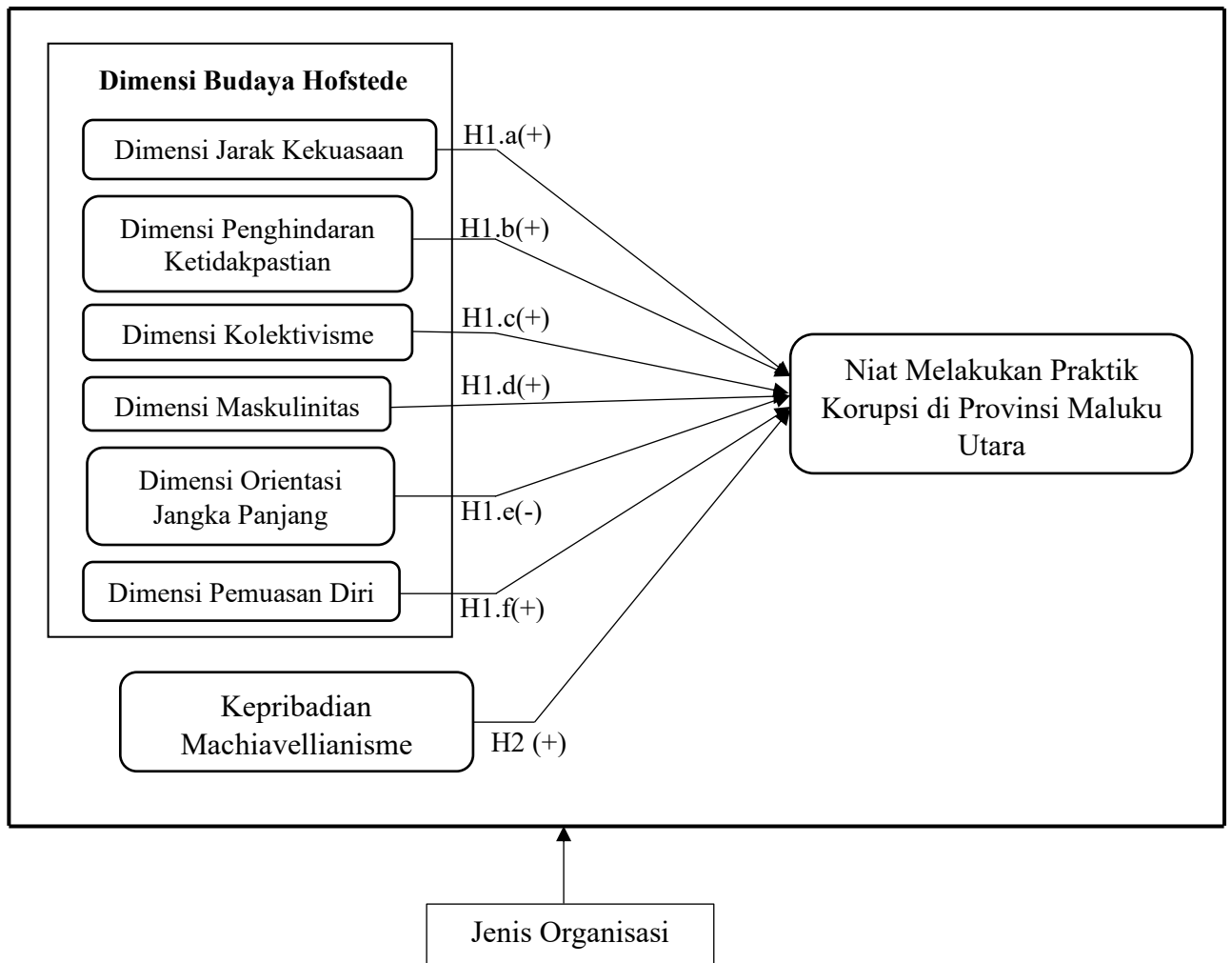
Dengan demikian, sebagai hasil dari diskusi di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut ini:

H3: Jenis Organisasi memoderasi pengaruh dimensi budaya hofstede terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

H4: Jenis Organisasi memoderasi pengaruh kepribadian machiavellianisme terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara

2.9 Kerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan pada bagian sebelumnya, untuk mengetahui pengaruh dimensi budaya Hofstede dan kepribadian machiavellianisme terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara, maka dibuatlah ilustrasi seperti Gambar 2.1.



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari survei dengan teknik kuesioner. Kuesioner akan ditujukan kepada individu atau karyawan yang bekerja pada perusahaan publik dan non-publik di Provinsi Maluku Utara, kuesioner tersebut akan di sebarakan secara online melalui *Google Form* maupun secara offline melalui kunjungan langsung peneliti terhadap responden.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Selain itu, populasi juga terdiri dari atas semua unit penelitian atau unit analisis yang akan diformulasikan pernyataan ilmiahnya (Walizer & Wienir, 1978; Djaali, 2020). Sementara, sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang diambil sebagai objek penelitian. Dimana sampel yang baik harus mengandung dua kriteria yaitu kecermatan (*accuracy*) dan ketepatan (*precision*), agar dapat mewakili populasi yang ada (Prasetyo & Jannah, 2012).

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh individu di Provinsi Maluku Utara. Sementaram sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *stratified random sampling* yang membagi sampel kedalam dua atau lebih atribut yang relevan, kemudian mengambil sampel secara acak dari masing-masing strata (Saunders *et al.*, 2016). Penelitian ini menggunakan pembagian strata berdasarkan jenis organisasi tempat

individu bekerja, yaitu organisasi sektor publik dan organisasi sektor non-publik, dengan sampel yang telah memasuki usia produktif bekerja yaitu rentang usia 17-60 tahun.

Dalam menentukan ukuran sampel minimum, umumnya digunakan acuan perbandingan antara jumlah observasi dan jumlah variabel yang dianalisis. Ukuran sampel yang disarankan adalah $5 \times n$ *observed variable* (indikator) (Hair *et al.*, 2019). Penelitian ini melibatkan 41 indikator yang tersebar dalam tiga variabel, yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Berdasarkan pedoman tersebut, jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah $41 \times 5 = 205$ responden. Namun demikian, peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 260 responden, dengan pertimbangan agar data yang diperoleh dapat lebih merepresentasikan populasi yang diteliti.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner merupakan istilah yang merujuk kepada suatu metode pengumpulan data, dimana setiap orang diminta untuk merespon seperangkat pertanyaan yang sama (Saunders *et al.*, 2016). Selain itu, kuesioner umumnya dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif dalam jumlah besar dan dapat didistribusikan secara langsung maupun melalui media digital (Sekaran & Bougie, 2016). Data hasil kuesioner kemudian dimanfaatkan untuk mengetahui pengaruh dimensi budaya Hofstede dan kepribadian machiavellianisme terhadap motivasi praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional merupakan pernyataan tentang prosedur yang digunakan untuk mendefinisikan variabel penelitian. Variabel penelitian ditujukan kepada konstruk atau properti yang sedang diteliti. Meliputi karakteristik, sifat atau atribut yang dapat diukur

dan diberi nilai. Adapun jenis variabel diantaranya yaitu variabel dependen, independen, moderasi atau interaksi, *extraneous* serta intervening (Cooper & Schindler, 2011). Selanjutnya diperlukan pengukuran variabel dengan menetapkan angka atau simbol secara konsisten (Sekaran & Bougie, 2016).

Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel berupa skala *likert* sebagai instrumen yang paling banyak digunakan dalam berbagai dimensi topik penelitian. Skala ini terdiri atas serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang masing-masing disertai dengan rentang pilihan respons yang simetris, sehingga memungkinkan responden untuk menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuannya (Khamboonruang, 2025). Skala *likert* memuat data yang rinci serta analisis statistik yang lebih kuat sehingga memungkinkan diperolehnya ukuran yang lebih komprehensif terhadap sikap atau opini partisipan (Koo & Yang, 2025). Adapun kategori penilaian diurutkan secara hierarkis sesuai yang diinginkan, dari kategori terendah (1) berhubungan dengan pernyataan “sangat tidak setuju”. hingga kategori tertinggi (5) berhubungan dengan pernyataan “sangat setuju”.

3.4.1 Dimensi Budaya Hofstede

3.4.1.1 Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan

Dimensi budaya jarak kekuasaan mengacu pada sejauh mana anggota yang kurang berkuasa dalam institusi dan organisasi di suatu negara, mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata (Hofstede, 2011). Masyarakat dengan karakteristik toleransi terhadap budaya jarak kekuasaan yang tinggi cenderung menerima ambiguitas, sementara yang lain cenderung menghindari ketidakpastian

melalui kebijakan, aturan, dan undang-undang yang jelas untuk membimbing suatu tindakan (Mihret, 2014).

Penelitian oleh Gayg dan Lajunen (2022) menemukan bahwa dimensi budaya jarak kekuasaan yang tinggi berpengaruh positif terhadap praktik korupsi. Kondisi ini terjadi karena adanya ambiguitas serta celah dalam aturan yang dapat dimanfaatkan oleh para elit dan pejabat. Dengan dorongan niat yang kuat, mereka cenderung menyalahgunakan ketidakjelasan regulasi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi, khususnya dalam bentuk keuntungan ekonomi. Maka diajukan lima item pertanyaan untuk mengetahui pengaruh dimensi budaya jarak kekuasaan terhadap niat melakukan praktik korupsi. Merujuk pada Yoo *et al.* (2011), Tabel 3.1 merepresentasikan item pertanyaan terkait dengan dimensi budaya jarak kekuasaan.

Tabel 3.1
Indikator Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan

No.	Indikator	Sumber
1	Pimpinan sebaiknya membuat keputusan sendiri tanpa perlu banyak bertanya pada karyawan.	Yoo <i>et al.</i> (2011)
2	Pimpinan sebaiknya tidak terlalu sering meminta pendapat karyawan.	
3	Pimpinan sebaiknya menjaga jarak dalam bergaul dengan karyawan.	
4	Pimpinan sebaiknya tidak memberikan tugas pengambilan keputusan kepada karyawan.	
5	Pimpinan dapat memaksakan keputusannya untuk diikuti oleh karyawan.	

3.4.1.2 Dimensi Budaya Peghindaran Ketidakpastian

Dimensi budaya penghindaran ketidakpastian mengacu pada sejauh mana individu dalam suatu budaya merasa terancam oleh peristiwa yang tidak pasti atau tidak diketahui,

serta sejauh mana masyarakat menciptakan aturan, menganut kebenaran mutlak, dan menolak untuk melawan alam demi menghindari risiko (Hofstede, 2011). Masyarakat dengan dimensi budaya ketidakpastian yang tinggi lebih menyukai keadaan dengan penuh kepastian sehingga memerlukan banyak kejelasan serta aturan yang terstruktur (Amalia & Handayani, 2019).

Penelitian oleh Boateng *et al.* (2024) menemukan bahwasannya dimensi budaya penghindaran ketidakpastian berpengaruh positif terhadap praktik korupsi. Hal ini karena masyarakat atau seseorang merasa berada dalam ketidakpastian pada situasi yang dihadapi di masa yang akan datang dan sulit diprediksi. Sehingga, individu lebih memilih menggunakan cara-cara tidak etis daripada mengambil risiko menghadapi ketidakpastian yang ada. Misalnya, dalam kondisi ketidakpastian mengenai peluang diterima bekerja di suatu perusahaan. Individu dapat menunjukkan kecenderungan untuk melakukan tindakan tidak etis seperti memberikan suap, sebagai upaya memperoleh kepastian terhadap hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, budaya dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi mendorong niat seseorang untuk melakukan korupsi.

Maka diajukan lima item pertanyaan untuk mengetahui pengaruh dimensi budaya penghindaran ketidakpastian terhadap niat melakukan praktik korupsi, merujuk pada Geert *et al.* (2010). Tabel 3.2 merepresentasikan item pertanyaan terkait dengan dimensi budaya penghindaran ketidakpastian.

Tabel 3.2
Indikator Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian

No	Indikator	Sumber
1	Ketidakpastian dalam proses hukum membuat orang memilih jalan cepat dengan memberi suap atau hadiah.	(Geert <i>et al.</i> , 2010)

No	Indikator	Sumber
2	Aturan yang tidak pasti (tidak jelas) membuat orang jadi merasa tidak terlalu bersalah saat melanggar aturan.	
3	Ketidakpastian dalam penegakan aturan membuat orang sulit menolak ajakan melanggar aturan dari atasan.	
4	Orang tetap mengikuti aturan meski tahu ada hal yang tidak transparan di dalamnya.	
5	Sebagian orang cenderung mengikuti atasan/pimpinan yang melanggar aturan karena ketidakpastiaan dalam penegakkan aturan.	

3.4.1.3 Dimensi Budaya Individualisme vs Kolektivisme

Dimensi budaya individualisme vs kolektivisme merupakan keterkaitan dengan preferensi kerangka sosial antara individualisme atau kolektivisme. Semakin tinggi nilai individualisme orang hanya peduli pada diri sendiri dan keluarga dekatnya. Sementara semakin rendah nilai individualisme maka masyarakat cenderung lebih kolektif, dimana individu sejak lahir menjadi bagian dari kelompok erat seperti keluarga besar, yang saling melindungi dengan syarat adanya loyalitas penuh (Hofstede, 2011).

Penelitian oleh Guritno *et al.* (2021) menemukan bahwa semakin tinggi nilai dimensi individualisme pada suatu masyarakat maka masyarakat tersebut cenderung lebih bersih dari niat melakukan korupsi. Namun sebaliknya, semakin kolektif suatu masyarakat maka akan semakin tinggi tingkat korupsinya. Sehingga diajukan enam item pertanyaan untuk mengetahui pengaruh dimensi budaya individualisme terhadap niat melakukan praktik korupsi, merujuk pada Yoo *et al.* (2011). Tabel 3.3 merepresentasikan item pertanyaan terkait dengan dimensi budaya individualisme vs kolektivisme.

Tabel 3.3
Indikator Dimensi Budaya Individualisme vs Kolektivisme

No	Indikator	Sumber
1	Kepentingan bersama harus diutamakan daripada kepentingan pribadi.	Yoo <i>et al.</i> (2011)
2	Kesejahteraan pribadi juga penting, namun setelah mempertimbangkan kesejahteraan kelompok.	
3	Keberhasilan kelompok lebih penting daripada keberhasilan individu.	
4	Seseorang harus tetap bersama kelompoknya meski ada kesulitan	
5	Tujuan pribadi sebaiknya dicapai, setelah mempertimbangkan pencapaian tujuan kelompok.	
6	Loyalitas kepada kelompok penting meski tujuan pribadi terabaikan.	

3.4.1.4 Dimensi Budaya Femininitas vs Maskulinitas

Dimensi budaya femininitas vs maskulinitas merupakan tingkat dari nilai-nilai maskulin seperti ketegasan, kinerja, keberhasilan, dan kompetisi. lebih diutamakan daripada nilai-nilai seperti kualitas hidup, menjaga hubungan pribadi yang hangat, pelayanan, kepedulian pada yang lemah, dan solidaritas (Hofstede, 2011). Sederhananya, budaya maskulin menekankan pada keberhasilan materi, sedangkan budaya feminin menekankan pada kualitas hidup (Taras *et al.*, 2023).

Penelitian oleh Im dan Chen (2020) menunjukkan bahwa masyarakat dengan dominasi dimensi maskulinitas memiliki pengaruh positif terhadap praktik korupsi. Hal ini disebabkan oleh orientasi pada pencapaian materi yang dapat mendorong terjadinya perilaku bisnis yang tidak etis atau koruptif. Selain itu, tuntutan untuk meraih kesuksesan karier dan pencapaian materi menimbulkan tekanan tersendiri bagi individu, yang mana tekanan tersebut dapat berpotensi memunculkan niat individu untuk melakukan *fraud*.

Sehingga diajukan empat item pertanyaan untuk mengetahui pengaruh dimensi budaya maskulinitas terhadap niat melakukan praktik korupsi, merujuk pada Yoo *et al.* (2011). Tabel 3.4 merepresentasikan item pertanyaan terkait dengan dimensi budaya maskulinitas vs femininitas.

Tabel 3.4
Indikator Dimensi Budaya Femininitas vs Maskulinitas

No	Indikator	Sumber
1	Laki-laki sering dipandang lebih membutuhkan karir profesional daripada perempuan.	Yoo <i>et al.</i> (2011)
2	Laki-laki dianggap lebih logis sedangkan perempuan dianggap intuitif (menggunakan perasaan) saat menyelesaikan masalah.	
3	Laki-laki dianggap lebih memiliki sikap tegas yang dapat menyelesaikan masalah sulit.	
4	Beberapa pekerjaan dianggap lebih baik dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan.	

3.4.1.5 Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang vs Jangka Pendek

Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang vs Jangka Pendek menjelaskan bagaimana suatu masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang berkaitan dengan peristiwa di masa lalu sekaligus menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Masyarakat dengan orientasi jangka pendek cenderung memelihara norma-norma serta tradisi yang telah lama ada, dan umumnya memandang perubahan sosial dengan rasa curiga. Sebaliknya, masyarakat dengan orientasi jangka panjang menerapkan pendekatan yang lebih pragmatis, mendukung perbaikan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya pendidikan modern sebagai sarana untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik (Hofstede, 2011).

Penelitian oleh Nainggolan (2022) menemukan bahwasannya masyarakat dengan dimensi budaya orientasi jangka pendek, cenderung lebih korup. Daripada dimensi budaya orientasi jangka panjang. Hal ini karena kecenderungan masyarakat berorientasi jangka panjang untuk lebih pragmatis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan, sehingga terkadang dapat membenarkan tindakan-tindakan tidak etis atau kompromi moral demi tujuan jangka panjang yang dianggap lebih besar atau bermanfaat di masa depan.

Sehingga diajukan enam item pertanyaan untuk mengetahui pengaruh dimensi budaya orientasi jangka panjang terhadap niat melakukan praktik korupsi, merujuk pada Yoo *et al.* (2011). Tabel 3.5 merepresentasikan item pertanyaan terkait dengan dimensi budaya orientasi jangka panjang vs jangka pendek.

Tabel 3.5
Indikator Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang vs Jangka Pendek

No	Indikator	Sumber
1	Saya melakukan pengelolaan uang dengan cermat dan digunakan secara bijaksana.	Yoo <i>et al.</i> (2011)
2	Saya tetap berusaha menyelesaikan masalah meskipun menghadapi tantangan.	
3	Saya tetap tenang dan berusaha meskipun menghadapi rintangan.	
4	Saya memiliki kebiasaan membuat rencana jangka panjang.	
5	Saya dapat mengorbankan kesenangan hari ini demi kesuksesan di masa depan.	
6	Saya bekerja keras demi kesuksesan di masa depan.	

3.4.1.6 Dimensi Budaya Pemuasan vs Pengendalian Diri

Dimensi budaya pemuasan vs pengendalian diri menggambarkan sejauh mana masyarakat mengizinkan pemenuhan keinginan dan kesenangan pribadi. Pada dimensi budaya pemuasan diri masyarakat mengizinkan pemuasan kebutuhan dasar dan keinginan alami manusia secara relatif bebas, terutama yang berkaitan dengan menikmati hidup dan bersenang-senang. Sementara pada dimensi budaya pengendalian diri menggambarkan masyarakat yang menahan atau mengendalikan pemuasan kebutuhan tersebut, serta mengaturnya melalui norma sosial yang ketat (Hofstede, 2011).

Penelitian oleh Amalia dan Handayani (2019) menemukan bahwasannya masyarakat dengan budaya pemuasan diri yang tinggi, lebih fokus terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan sehingga dapat melakukan apa saja untuk mencapai hal tersebut. Sehingga, dapat memunculkan niat untuk melakukan *fraud*. Maka diajukan enam item pertanyaan untuk mengetahui pengaruh dimensi budaya pemuasan diri terhadap niat melakukan praktik korupsi, merujuk pada Urban dan Ratsimanetrimanana (2015); Gerlack dan Eriksson (2021). Tabel 3.6 merepresentasikan item pertanyaan terkait dengan dimensi budaya pemuasan vs pengendalian diri.

Tabel 3.6
Indikator Dimensi Budaya Pemuasan vs Pengendalian Diri

No	Indikator	Sumber
1	Saya merasa kehidupan saat ini terasa membahagiakan secara keseluruhan.	(Urban dan Ratsimanetrimanana, 2015; Gerlack & Eriksson, 2021)
2	Saya merasa memiliki kebebasan dan kendali penuh dalam menjalani kehidupan.	
3	Saya memiliki kebebasan melakukan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup.	
4	Saya sering meluangkan waktu untuk bersenang-senang.	

No	Indikator	Sumber
5	Orang lain tidak bisa menghalangi saya untuk melakukan apa yang saya inginkan.	

3.4.2 Kepribadian Machiavellianisme

Kepribadian Machiavellian menggambarkan individu yang cenderung memanfaatkan segala cara demi mencapai tujuannya, termasuk manipulasi, tipu daya, dan kontrol terhadap orang lain (Triantoro *et al.*, 2020). Kepribadian ini termasuk kedalam salah satu kejahatan kepribadian gelap dan manipulatif, dimana kepribadian ini digambarkan sebagai pribadi yang memesona, namun pada kenyataannya cenderung arogan, licik, dan akan menyusun siasat untuk menghadapi situasi apa pun demi keuntungan pribadi, tanpa peduli siapa yang mungkin dirugikan (Goncalves & Campbell, 2014).

Penelitian oleh Maharani *et al.* (2024) menemukan bahwasannya kepribadian machiavellianisme berpengaruh terhadap praktik korupsi, hal ini karena individu dengan tingkat Machiavellian yang tinggi akan cenderung bersifat egois dan lebih mudah mengambil keputusan yang tidak etis. Sehingga diajukan enam item pertanyaan untuk mengetahui pengaruh kepribadian machiavellianisme terhadap praktik korupsi, merujuk pada Murphy, (2012); Suryandari dan Valentin, (2021); Parawansa dan Winarto, (2024). Tabel 3.7 merepresentasikan item pertanyaan terkait dengan kepribadian machiavellianisme.

Tabel 3.7
Indikator Kepribadian Machiavellianisme

No	Indikator	Sumber
1	Orang umumnya tidak mau bekerja keras kecuali jika terpaksa.	(Murphy, 2012; Suryandari & Valentin, 2021; Parawansa & Winarto, 2024)
2	Orang cenderung percaya jika diberi ucapan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.	
3	Orang cenderung menyembunyikan kesalahan kerja untuk menjaga kepercayaan pimpinan.	
4	Orang cenderung kesulitan untuk maju dan berkembang tanpa melakukan jalan pintas.	
5	Kepercayaan penuh pada orang lain berisiko menimbulkan kesulitan.	
6	Semua orang memiliki sisi jahat dan itu akan terlihat ketika mereka memiliki kesempatan.	

3.4.3 Niat Melakukan Praktik Korupsi

Niat melakukan praktik korupsi merupakan keinginan seseorang untuk melakukan praktik korupsi. Praktik korupsi sendiri merupakan sesuatu yang jelek, jahat dan bersifat merusak, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok (Arifin, 2020). Selain itu, menurut Tommie dan Aaron (2010) skema korupsi umumnya melibatkan kolaborasi antara pihak internal (seperti karyawan perusahaan yang dirugikan) dengan pihak eksternal. Kerja sama antara pihak-pihak yang memiliki hubungan ini tidak diketahui oleh manajemen maupun auditor. Sehingga seiring waktu, tanpa adanya evaluasi atau pembaruan di perusahaan, pelaku mulai menyimpang dan terlibat dalam berbagai jenis praktik korupsi.

Sehingga diajukan enam item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur konstruk ini, yang dikembangkan oleh Çollaku *et al.* (2024); Said *et al.* (2018). Tabel 3.8 merepresentasikan item pertanyaan terkait dengan praktik korupsi.

Tabel 3.8
Indikator Niat Melakukan Praktik Korupsi

No	Indikator	Sumber
1	Seseorang dapat memiliki keinginan untuk mengubah laporan keuangan.	(Çollaku <i>et al.</i> , 2024; Said <i>et al.</i> , 2018)
2	Seseorang dapat memiliki kecenderungan memanipulasi laporan keuangan terlihat lebih baik.	
3	Seseorang dapat memiliki kesempatan untuk menggunakan/meminjam uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi.	
4	Seseorang dapat memiliki keinginan menambahkan jam kerja lebih dari yang sebenarnya untuk klaim lembur.	
5	Seseorang dapat memiliki keinginan menggunakan aset perusahaan untuk keperluan pribadi.	
6	Seseorang dapat memiliki keinginan untuk mengambil beberapa aset kantor tanpa izin atasan.	

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Alat Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah smartPLS, bertujuan untuk mengolah data yang diperoleh dari kuesioner, yang dirancang untuk mengidentifikasi pengaruh dimensi budaya hofstede dan kepribadian machiavellianisme terhadap niat melakukan praktik korupsi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, kemudian untuk menguji hipotesis penelitian ini diuji secara kuantitatif. Pengujian model dilakukan menggunakan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM).

PLS-SEM merupakan model statistik yang menggabungkan pendekatan hubungan ketergantungan (*dependence*) dan hubungan saling ketergantungan (*interdependence*). Model ini digunakan untuk menganalisis hubungan kompleks antar variabel laten dan

variabel terukur secara simultan (Hair *et al.*, 2019). Selain itu, PLS-SEM juga merupakan metode yang bersifat “kausal-prediktif” sehingga dengan karakteristik ini, PLS-SEM mampu mengatasi dikotomi yang tampak antara penjelasan (*explanation*) dan prediksi (*prediction*). Sehingga hasil dari model ini juga sangat sesuai untuk menghasilkan prediksi terhadap data di luar sampel (*out-of-sample prediction*) (Sarstedt *et al.*, 2017).

Implementasi PLS-SEM terdiri dari dua bagian utama, yaitu model pengukuran (*measurement model*) yang merepresentasikan bagaimana indikator-indikator mengukur konstruk laten. Serta, model struktural (*structural model*) yang menggambarkan hubungan antar konstruk laten.

3.6 Model Pengukuran (*Measurement Model*)

3.6.1 Uji Validitas

Uji Validitas merupakan suatu bentuk pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu alat ukur mampu merepresentasikan secara tepat konstruk teoritis yang menjadi fokus dalam penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Adapun dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan diuji meliputi variabel dimensi budaya Hofstede, variabel kepribadian maschiavellianisme dan variabel niat melakukan praktik korupsi.

3.6.1.1 Validitas Konvergen

Validitas konvergen merupakan indikator dalam model pengukuran reflektif yang digunakan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam suatu konstruk saling berkorelasi dan secara bersama-sama mampu menjelaskan varians yang terkandung dalam item-item tersebut. Secara empiris dievaluasi menggunakan ukuran *Average*

Variance Extracted (AVE), Berdasarkan *rule of thumb*, nilai AVE yang memenuhi standar minimal adalah 0,50 atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk tersebut secara rata-rata mampu menjelaskan minimal 50% varians dari indikator-indikator yang membentuknya (Hair *et al.*, 2019).

3.6.1.2 Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu konstruk dapat dibedakan secara empiris dari konstruk-construct lain dalam model. Prinsip dasarnya adalah memastikan bahwa indikator-indikator suatu konstruk secara eksklusif merepresentasikan konstruk tersebut, serta memiliki korelasi yang rendah dengan konstruk lain (Hair *et al.*, 2019).

Dalam pendekatan PLS-SEM, metode yang direkomendasikan untuk menilai validitas diskriminan adalah *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT). HTMT memberikan estimasi terhadap korelasi sebenarnya antara dua konstruk jika pengukuran dilakukan secara sempurna (yakni, jika reliabilitasnya sempurna). Adapun batas nilai HTMT sebesar 0,90 untuk model yang memuat konstruk-construct yang secara konseptual serupa. Dengan demikian, nilai HTMT di atas 0,90 menunjukkan tidak terpenuhinya validitas diskriminan. Apabila konstruk-construct yang dibandingkan secara konseptual lebih berbeda, maka nilai ambang batas yang lebih konservatif yaitu 0,85 direkomendasikan (Henseler *et al.*, 2015).

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan suatu bentuk pengujian metodologis yang bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi dan kestabilan alat ukur dalam merepresentasikan suatu

konstruk, sekaligus menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas suatu instrumen pengukuran (Sekaran & Bougie, 2016). Adapun reliabilitas kuesioner tercermin dari kemampuannya menghasilkan hasil yang konsisten di berbagai waktu, situasi, serta pada responden atau sampel yang berbeda (Saunders *et al.*, 2019).

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian. Diantaranya reliabilitas diukur menggunakan metode *cronbach's alpha*, yaitu salah satu ukuran diagnostik yang paling umum digunakan untuk menilai konsistensi internal suatu skala secara keseluruhan. Namun, metode ini tidak memberikan bobot terhadap indikator-indikator individual dalam perhitungannya. Sehingga *composite reliability* merupakan metode yang dapat mengatasi keterbatasan ini dengan memberikan bobot terhadap masing-masing indikator berdasarkan nilai *loading*-nya, oleh karena itu dianggap sebagai pendekatan reliabilitas yang lebih disarankan. Adapun nilai *reliability* yang dianggap memenuhi standar reliabilitas secara umum adalah sebesar 0,70 atau lebih (Hair *et al.*, 2019).

3.7 Model Struktural (*Structural Model*)

3.7.1 Uji Kolinearitas

Jika konstruk prediktor dalam model struktural menunjukkan adanya kolinearitas, hal ini dapat menimbulkan masalah dalam interpretasi hasil PLS-SEM. Oleh karena itu, langkah pertama dalam menilai model struktural adalah melakukan uji kolinearitas di antara konstruk prediktor. Nilai kolinearitas didasarkan pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yaitu jika $VIF = 1$ maka tidak terdapat masalah kolinearitas (Hair *et al.*, 2019).

3.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Jika kolinearitas bukan merupakan masalah, maka kriteria awal yang perlu dievaluasi adalah koefisien determinasi (R^2). R^2 merupakan ukuran kemampuan prediktif dalam sampel (*in-sample predictive power*). Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, adapun 0 menunjukkan tidak adanya hubungan sedangkan 1 menunjukkan hubungan sempurna. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar daya penjelas dari model struktural PLS. Oleh karena itu, semakin baik kemampuan prediksi terhadap konstruk endogen (Hair *et al.*, 2019). Sebagai pedoman umum, nilai R^2 sebesar:

- 0,75 dianggap substantial (kuat).
- 0,50 dianggap *moderate* (sedang).
- 0,25 dianggap *weak* (lemah) (Cohen, 1988).

3.7.3 Uji Ukuran Efek (f^2)

Ukuran efek menggambarkan perubahan nilai f^2 ketika satu konstruk eksogen tertentu dihilangkan dari model. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah menghapus suatu konstruk prediktor dari model struktural memberikan dampak substantif terhadap konstruk endogen (Hair *et al.*, 2019). Adapun berdasarkan pedoman umum nilai f^2 dikategorikan sebagai berikut:

- 0,02 = efek kecil.
- 0,15 = efek sedang.
- 0,35 = efek besar.
- $\leq 0,02$ = tidak ada efek (Cohen, 1988).

3.7.4 Uji Blindfolding (Q^2)

Uji Blindfolding (Q^2) digunakan untuk mengukur kemampuan prediktif model atau yang dikenal sebagai relevansi prediktif (*predictive relevance*). Nilai Q^2 diperoleh melalui prosedur blindfolding dengan menghilangkan sebagian data secara sistematis, kemudian memprediksi kembali nilai-nilai yang dihilangkan menggunakan parameter yang diestimasi dari data yang tersisa. Proses ini diulang hingga seluruh data bergiliran dihilangkan dan diprediksi ulang (Hair *et al.*, 2019).

Sebagai acuan, nilai $Q^2 \geq 0$ menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang memadai terhadap konstruk endogen, sedangkan nilai $Q^2 \leq 0$ mengindikasikan tidak adanya relevansi prediktif. Adapun metode dianggap lebih unggul untuk menghitung Q^2 , yaitu *cross-validated redundancy*, karena mempertimbangkan estimasi dari jalur struktural dalam proses prediksi (Cohen, 1988).

3.7.5 Uji t-Test

Uji t-Test digunakan untuk menilai besaran dan signifikansi koefisien jalur (*path coefficients*) dalam model struktural. Proses ini dilakukan melalui metode *bootstrapping*, yang memanfaatkan standar error untuk menghitung nilai t dan p dari masing-masing koefisien jalur. Suatu koefisien jalur dinyatakan memiliki pengaruh signifikan jika nilai t -statistic ≥ 1.96 dan nilai signifikansi atau p values $\leq 0,05$ (Hair *et al.*, 2019).

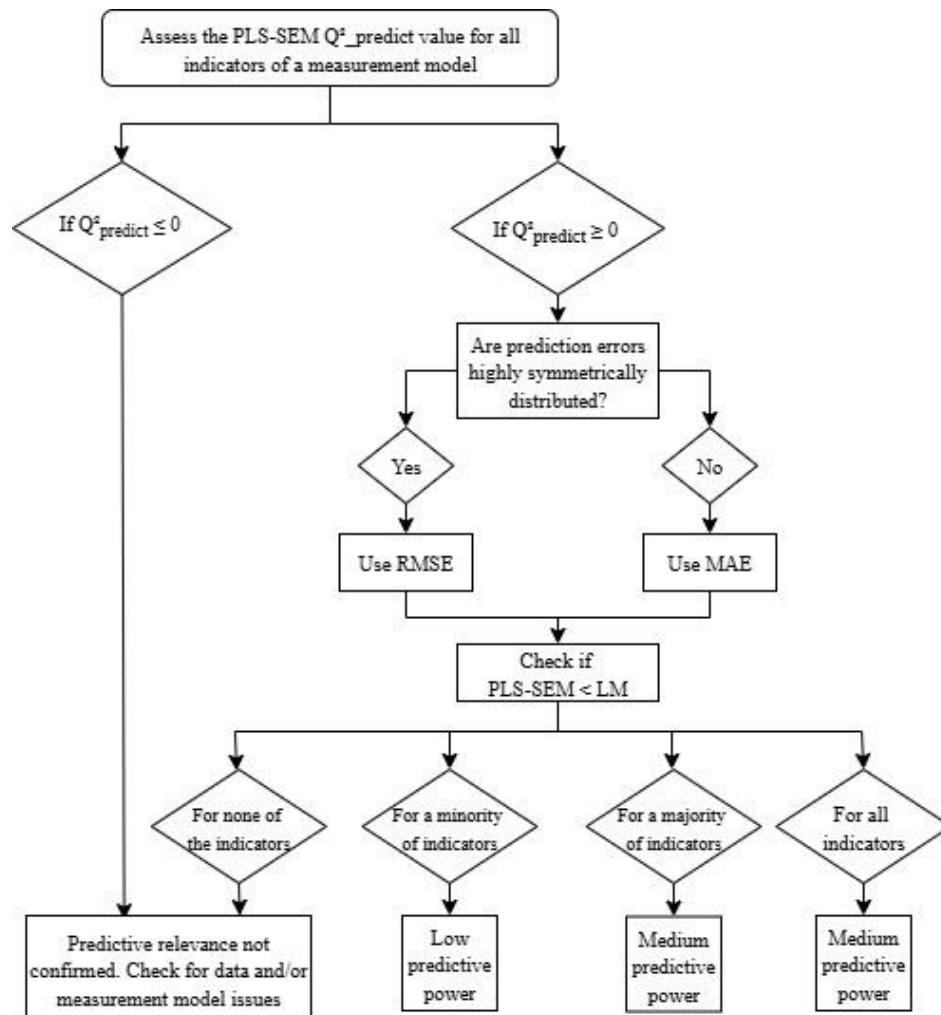
3.8 Multi-Group Analysis (MGA)

Uji *Multi-Group Analysis* (MGA) merupakan bagian dari analisis lanjutan untuk menguji perbedaan efek lintas kelompok terhadap model struktural yang dibangun dalam PLS-SEM. MGA memungkinkan peneliti untuk menguji variasi antara dua kelompok atau lebih dalam model yang identik, selama kelompok tersebut sudah diketahui

sebelumnya (Cheah *et al.*, 2020). Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis organisasi sebagai kelompok yang terpisah, yaitu organisasi publik dan organisasi swasta.

3.9 PLS-Predict

PLS-Predict adalah prosedur yang digunakan dalam model PLS-SEM untuk mengevaluasi kemampuan prediktif dari suatu model. Secara khusus, PLS-Predict bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu model yang dikembangkan dapat memiliki kekuatan prediksi (*predictive power*) dari nilai-nilai data baru (*out-of-sample prediction*), bukan hanya menjelaskan data yang ada (Shmueli *et al.*, 2016). Dalam menilai tingkat kesalahan prediksi dapat mengikuti *rule of thumb* dengan memilih statistik prediksi untuk mengevaluasi kekuatan prediktif dari model penelitian. Prediksi statistik yang populer digunakan mencakup: *Mean Absolute Error* (MAE), *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dan *Root mean squared error* (RMSE). RMSE sendiri sering menjadi metrik default (Shmueli *et al.*, 2019). Selanjutnya pada gambar 3.1 menunjukkan proses untuk menginterpretasikan hasil PLS-predict.



Sumber: Shmueli et al. (2019)

Gambar 3.1 Panduan Interpretasi Hasil PLS-predict

Keterangan:

1. PLS-SEM < LM (*Linear Regression Model*) untuk tidak satu pun indikator:
Jika analisis PLS-SEM (dibandingkan dengan LM) menghasilkan error prediksi yang lebih rendah dalam hal RMSE (atau MAE) untuk tidak satu pun indikator, maka model tidak memiliki daya prediktif.
2. PLS-SEM < LM untuk sebagian kecil indikator:

Jika sebagian kecil dari indikator konstruk dependen menghasilkan error prediksi PLS-SEM yang lebih rendah dibandingkan tolok ukur LM yang sederhana, ini menunjukkan bahwa model memiliki daya prediktif rendah.

3. PLS-SEM < LM untuk sebagian besar indikator:

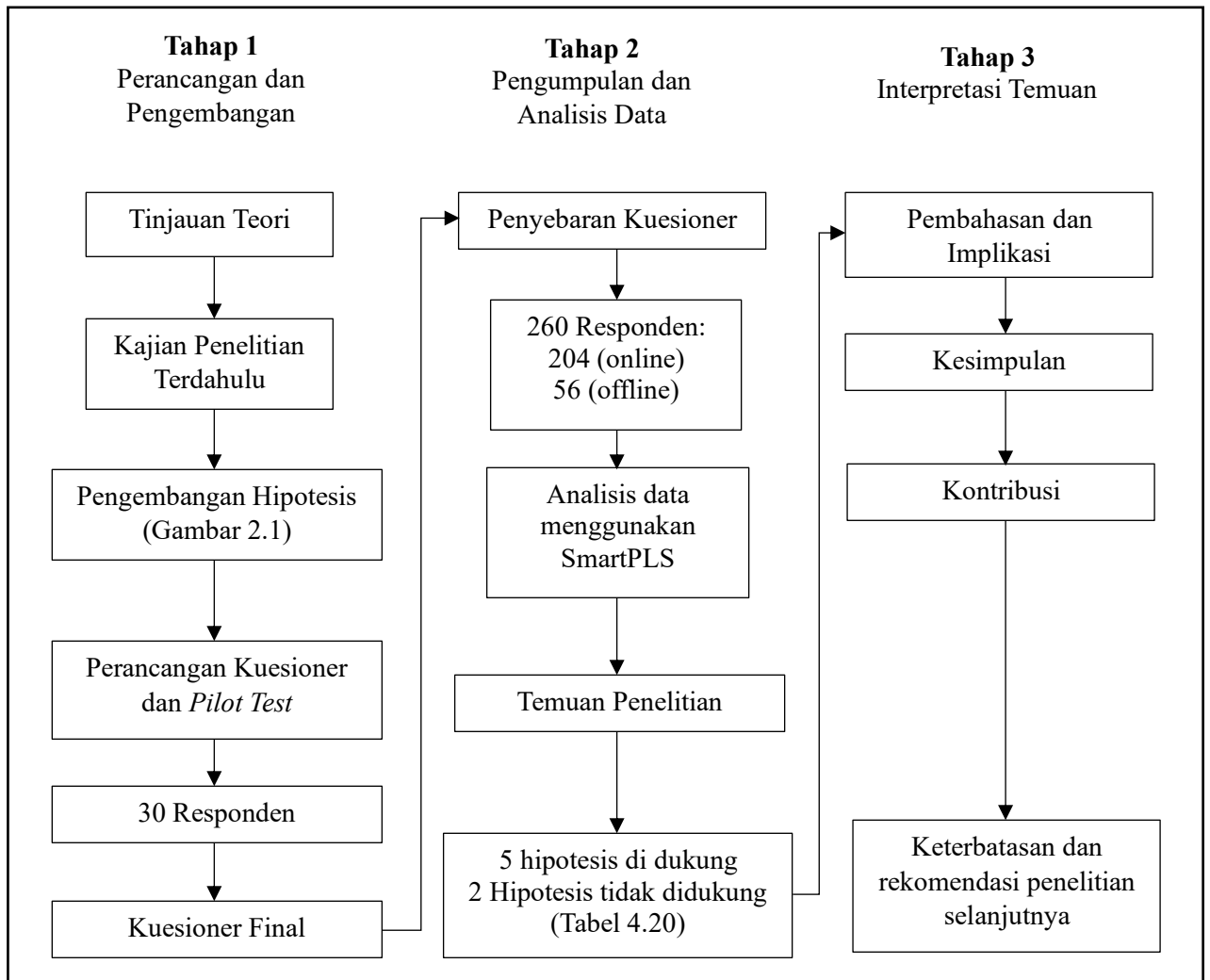
Jika sebagian besar (atau jumlah yang sama) indikator dalam analisis PLS-SEM menghasilkan error prediksi yang lebih kecil dibandingkan LM, maka ini menunjukkan daya prediktif sedang.

4. PLS-SEM < LM untuk semua indikator:

Jika semua indikator dalam analisis PLS-SEM memiliki nilai RMSE (atau MAE) yang lebih rendah dibandingkan tolok ukur LM yang sederhana, maka model memiliki daya prediktif tinggi.

3.10 Design Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang tersusun secara sistematis, sehingga untuk memperjelas alur dan keterkaitan antar tahapan tersebut maka disajikan sebuah *flowchart* desain penelitian. Dapat dilihat pada yang menggambarkan proses penelitian secara keseluruhan Gambar 4.1 Design Penelitian.



Gambar 3.2 Flowchart Design Penelitian

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data dan temuan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh Dimensi Budaya Hofstede dan Kepribadian Machiavellianisme terhadap niat individu dalam melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara. Pembahasan dalam bab ini didasarkan pada kerangka teoritis, perumusan masalah, serta hipotesis penelitian yang telah diuraikan pada Bab II. Oleh karena itu, analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan, guna menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Hasil pengujian tersebut selanjutnya dibahas secara sistematis dalam bab ini.

4.1 *Pilot Test*

Sebelum dilakukan penyebaran kuesioner secara keseluruhan pada sampel penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan *pilot test* dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada 30 responden. Terdiri dari 12 orang responden laki-laki dan 18 orang responden perempuan, selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data hasil sebaran *pilot test* tersebut.

4.1.1 Uji Validitas Tahap *Pilot Test*

Uji Validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana item-item pertanyaan dalam kuesioner penelitian tahap *pilot test* mampu menjelaskan indikator-indikator yang diteliti. Terdiri atas uji validitas konvergen yang diukur dengan *loading factor* ≥ 0.70 dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) ≥ 0.50 . Serta, uji validitas diskriminan yang diukur dengan nilai ambang batas *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) yang lebih konservatif

yaitu 0,85 (Hair *et al.*, 2019; Henseler *et al.*, 2015). Hasil pengujian validitas konvergen dan diskriminan tahap *pilot test* dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Validitas Konvergen pada Tahap *Pilot Test*

Variabel	Item	Kode	Loading Factor	AVE
Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan	Pimpinan sebaiknya membuat keputusan sendiri tanpa perlu banyak bertanya pada karyawan.	PDI 1	0.806	0.567
	Pimpinan sebaiknya tidak terlalu sering meminta pendapat karyawan.	PDI 2	0.818	
	Pimpinan sebaiknya menjaga jarak dalam bergaul dengan karyawan.	PDI 3	0.677	
	Pimpinan sebaiknya tidak memberikan tugas pengambilan keputusan kepada karyawan.	PDI 4	0.715	
	Pimpinan dapat memaksakan keputusannya untuk diikuti oleh karyawan.	PDI 5	0.740	
Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian	Ketidakpastian dalam proses hukum membuat orang memilih jalan cepat dengan memberi suap atau hadiah.	UAI 1	0.790	0.590
	Aturan yang tidak pasti (tidak jelas) membuat orang jadi merasa tidak terlalu bersalah saat melanggar aturan.	UAI 2	0.742	
	Ketidakpastian dalam penegakan aturan membuat orang sulit menolak ajakan melanggar aturan dari atasan.	UAI 3	0.879	
	Orang tetap mengikuti aturan meski tahu ada hal yang tidak transparan di dalamnya.	UAI 4	0.773	
	Sebagian orang cenderung mengikuti atasan/pimpinan yang melanggar aturan karena ketidakpastiaan dalam penegakkan	UAI 5	0.636	
	Kepentingan bersama harus diutamakan daripada kepentingan pribadi.	COL 1	0.877	
	Kesejahteraan pribadi juga penting, namun setelah mempertimbangkan kesejahteraan kelompok.	COL 2	0.843	

Tabel 4.1 Lanjutan

Variabel	Item	Kode	Loading Factor	AVE
Dimensi Budaya Kolektivisme	Keberhasilan kelompok lebih penting daripada keberhasilan individu.	COL 3	0.889	0.632
	Seseorang harus tetap bersama kelompoknya meski ada kesulitan	COL 4	0.897	
	Tujuan pribadi sebaiknya dicapai, setelah mempertimbangkan pencapaian tujuan kelompok.	COL 5	0.844	
	Loyalitas kepada kelompok penting meski tujuan pribadi terabaikan.	COL 6	0.086	
Dimensi Budaya Maskulinitas	Laki-laki sering dipandang lebih membutuhkan karir profesional daripada perempuan.	MAS 1	0.632	0.632
	Laki-laki dianggap lebih logis sedangkan perempuan dianggap intuitif (menggunakan perasaan) saat menyelesaikan masalah.	MAS 2	0.775	
	Laki-laki dianggap lebih memiliki sikap tegas yang dapat menyelesaikan masalah sulit.	MAS 3	0.833	
	Beberapa pekerjaan dianggap lebih baik dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan.	MAS 4	0.913	
Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang	Saya melakukan pengelolaan uang dengan cermat dan digunakan secara bijaksana.	LTO 1	0.830	0.789
	Saya tetap berusaha menyelesaikan masalah meskipun menghadapi tantangan.	LTO 2	0.930	
	Saya tetap tenang dan berusaha meskipun menghadapi rintangan.	LTO 3	0.934	
	Saya memiliki kebiasaan membuat rencana jangka panjang.	LTO 4	0.909	
	Saya dapat mengorbankan kesenangan hari ini demi kesuksesan di masa depan.	LTO 5	0.917	
	Saya bekerja keras demi kesuksesan di masa depan.	LTO 6	0.802	

Tabel 4.1 Lanjutan

Variabel	Item	Kode	Loading Factor	AVE
Dimensi Budaya Pemuasan Diri	Saya merasa kehidupan saat ini terasa membahagiakan secara keseluruhan.	IND 1	0.764	0.541
	Saya merasa memiliki kebebasan dan kendali penuh dalam menjalani kehidupan.	IND 2	0.677	
	Saya memiliki kebebasan melakukan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup.	IND 3	0.811	
	Saya sering meluangkan waktu untuk bersenang-senang.	IND 4	0.745	
	Orang lain tidak bisa menghalangi saya untuk melakukan apa yang saya inginkan.	IND 5	0.671	
Kepribadian Machiavellianisme	Orang umumnya tidak mau bekerja keras kecuali jika terpaksa.	MCV 1	0.909	0.670
	Orang cenderung percaya jika diberi ucapan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.	MCV 2	0.893	
	Orang cenderung menyembunyikan kesalahan kerja untuk menjaga kepercayaan pimpinan.	MCV 3	0.870	
	Orang cenderung kesulitan untuk maju dan berkembang tanpa melakukan jalan pintas.	MCV 4	0.763	
	Kepercayaan penuh pada orang lain berisiko menimbulkan kesulitan.	MCV 5	0.828	
	Semua orang memiliki sisi jahat dan itu akan terlihat ketika mereka memiliki kesempatan.	MCV 6	0.608	
Niat Melakukan Praktik Korupsi	Seseorang dapat memiliki keinginan untuk mengubah laporan keuangan.	CIn 1	0.874	0.726
	Seseorang dapat memiliki kecenderungan memanipulasi laporan keuangan terlihat lebih baik.	CIn 2	0.897	
	Seseorang dapat memiliki kesempatan untuk menggunakan/meminjam uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi.	CIn 3	0.851	

Tabel 4.1 Lanjutan

Variabel	Item	Kode	Loading Factor	AVE
	Seseorang dapat memiliki keinginan menambahkan jam kerja lebih dari yang sebenarnya untuk klaim lembur.	CIn 4	0.759	
	Seseorang dapat memiliki keinginan menggunakan aset perusahaan untuk keperluan pribadi.	CIn 5	0.839	
	Seseorang dapat memiliki keinginan untuk mengambil beberapa aset kantor tanpa izin atasan.	CIn 6	0.887	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil pengujian validitas konvergen pada tahap *pilot test* dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden, menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai AVE di atas 0.50. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item dianggap sudah cukup mewakili variabel laten yang hendak diukur. Meskipun masih terdapat item dengan nilai *loading factor* dibawah 0.70. Namun item tersebut dapat dipertimbangkan selama nilai AVE memadai (Hair *et al.*, 2019)

Tabel 4.2

Hasil Pengujian Validitas Diskriminan pada Pilot Test

	PDI	UAI	COL	MAS	LTO	IND	MACH	CInt
PDI								
UAI	0.260							
COL	0.260	0.171						
MAS	0.318	0.228	0.205					
LTO	0.205	0.308	0.369	0.226				
IND	0.358	0.331	0.270	0.303	0.185			
MCV	0.298	0.233	0.238	0.222	0.293	0.324		
CIn	0.395	0.577	0.314	0.197	0.218	0.454	0.187	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil pengujian validitas diskriminan dengan menggunakan nilai HTMT. Diketahui bahwasannya nilai HTMT antar variabel secara keseluruhan

berada dibawah nilai 0.85. Hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian memiliki validitas diskriminan yang baik, artinya setiap konstruk mengukur sesuatu yang berbeda dan tidak terlalu beririsan satu dengan yang lain. Sehingga, berdasarkan uji validitas pada tahap *pilot test* dinyatakan valid untuk didistribusikan ke seluruh sampel responden.

4.1.2 Uji Reliabilitas *Pilot Test*

Uji Reliabilitas digunakan untuk menilai tingkat konsistensi dan kestabilan alat ukur dalam merepresentasikan suatu konstruk di berbagai waktu, situasi, serta pada responden atau sampel yang berbeda (Sekaran & Bougie, 2016). Pendekatan reliabilitas yang lebih disarankan yaitu *composite reliability* dengan standar nilai reliabilitas secara umum adalah sebesar 0.70 atau lebih (Hair *et al.*, 2019). Hasil pengujian reliabilitas tahap *pilot test* dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Reliabilitas pada *Pilot Test*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan	0.867	Reliabel
Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian	0.877	Reliabel
Dimensi Budaya Kolektivisme	0.899	Reliabel
Dimensi Budaya Maskulinitas	0.871	Reliabel
Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang	0.957	Reliabel
Dimensi Budaya Pemuasan Diri	0.854	Reliabel
Kepribadian Machiavellianisme	0.923	Reliabel
Niat Melakukan Praktik Korupsi	0.941	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil pengujian reliabilitas tahap *pilot test*, diketahui bahwasannya nilai *composire reliability* berada diatas 0.70. Hal ini menggambarkan

bahwa item-item yang mengukur model penelitian memiliki tingkat konsistensi dan kestabilan yang baik. Sehingga, berdasarkan uji reliabilitas pada tahap *pilot test* dinyatakan reliabel untuk didistribusikan ke seluruh sampel responden.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif data primer yang diperoleh dari survei kuesioner. Kuesioner ditujukan kepada individu atau karyawan yang bekerja pada perusahaan publik dan non-publik di Provinsi Maluku Utara, yang disebar secara *online* melalui *Google Form* maupun secara *offline* melalui kunjungan langsung peneliti terhadap responden. Rincian informasi mengenai responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Rincian Kuesioner Penelitian

Kuesioner Online	Jumlah	%	Kuesioner Offline	Jumlah	%
Kuesioner yang disebar	204	100	Kuesioner yang disebar	60	100
Kuesioner yang dikembalikan	204	100	Kuesioner yang dikembalikan	56	93,3
Kuesioner yang tidak kembali	0	0	Kuesioner yang tidak kembali	4	6,67
Total kuesioner <i>online</i>				204	78,5
Total kuesioner <i>offline</i>				56	21,5
Total kuesioner yang dapat diolah				260	100

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai rincian kuesioer penelitian, diketahui bahwasannya kuesioner penelitian disebar secara langsung (*offline*) maupun tidak langsung (*online*). Kuesioner yang disebar secara *online* melalui media sosial berhasil mengumpulkan sebanyak 204 responden. Sedangkan, sebanyak 60 kuesioner yang

disebar secara *offline* berhasil menjaring 56 responden untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner. Dengan demikian persentase umpan balik kuesioner secara *online* lebih besar yaitu 78,5%, sementara kuesioner yang disebar secara *offline* sebesar 21,5%. Sehingga, total kuesioner yang layak untuk dianalisis sebesar 260 kuesioner.

4.3 Deskripsi Responden

4.3.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari dua kategori, yaitu responden dengan jenis kelamin laki-laki dan responden dengan jenis kelamin perempuan. Informasi mengenai klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Reponden	%
Laki-Laki	115	44,23
Perempuan	145	55,77
Total	260	100

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Table 4.5 diketahui bahwasannya responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 115 orang setara dengan 44,23%. Sementara responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 145 orang setara dengan 55,77%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwasannya responden dalam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

4.3.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia yang dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jumlah Reponden	%
17 – 25 Tahun	125	48,08
26 – 30 Tahun	40	15,38
31 – 40 Tahun	38	14,62
41 – 45 Tahun	13	5,00
46 – 49 Tahun	20	7,69
≥ 50 Tahun	24	9,23
Total	260	100

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwasannya responden terbagi kedalam berbagai kelompok usia. Kelompok usia dengan rentang 17-25 tahun memiliki 125 responden dengan persentase sebesar 48,08%. Sehingga, dapat disimpulkan responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berada pada kelompok usia 17-25 tahun.

4.3.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan kelompok tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Reponden	%
SD/Sederajat	0	0,00
SMP/Sederajat	6	2,31
SMA/Sederajat	116	44,62
D3	4	1,54
S1	101	38,85
S2	24	9,23
S3	9	3,46
Total	260	100

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwasannya mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat, sebesar 116 orang setara dengan 44,62% dari total persentase responden.

4.3.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Organisasi

Responden dalam penelitian ini terbagi dalam 2 kategori jenis organisasi atau instansi tempat mereka bekerja meliputi jenis organisasi sektor publik dan jenis organisasi non-publik (swasta). Informasi klasifikasi responden berdasarkan jenis organisasi dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Organisasi

Jenis Organisasi	Jumlah Reponden	%
Organisasi Sektor Publik	86	33,08
Organisasi Sektor Swasta	174	66,92
Total	260	100

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwasannya responden dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam 2 jenis organisasi tempat bekerja. Adapun Jenis organisasi swasta sebesar 174 orang setara 66,92%. Sementara, jenis organisasi publik berkisar 86 orang setara 33,08%. Sehingga disimpulkan bahwa responden yang bekerja di organisasi swasta lebih mendominasi dalam penelitian ini.

4.3.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Domisili

Penelitian ini juga mengelompokkan responden berdasarkan domisili atau tempat tinggal saat ini ke dalam 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, informasi mengenai klasifikasi responden berdasarkan domisili dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Klasifikasi Responden Berdasarkan Domisili

Kabupaten/Kota	Jumlah Reponden	%
Kabupaten Halmahera Barat	16	6,15
Kabupaten Halmahera Selatan	27	10,38
Kabupaten Halmahera Tengah	18	6,92
Kabupaten Halmahera Timur	16	6,15
Kabupaten Halmahera Utara	14	5,38
Kabupaten Kepulauan Sula	12	4,62
Kabupaten Pulau Morotai	12	4,62
Kabupaten Pulau Taliabu	19	7,31
Kota Ternate	110	42,31
Kota Tidore Kepulauan	16	6,15
Total	260	100

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwasannya mayoritas responden berdomisili di Kota Ternate sebanyak 110 orang setara 42,31%. Meskipun memiliki selisih yang cukup besar, namun responden yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Selatan juga cukup mendominasi sebesar 27 orang setara 10,38%.

4.4 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji model pengukuran digunakan untuk menjelaskan hubungan antara setiap konstruk dengan indikator-indikator yang merepresentasikannya. Melalui tahapan seperti uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan dan uji reliabilitas.

4.4.1 Pengujian Validitas Konvergen

Uji Validitas konvergen digunakan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam suatu konstruk saling berkorelasi dan mampu menjelaskan varians yang terkandung dalam item-item tersebut. Secara empiris dievaluasi menggunakan ukuran *Average Variance Extracted* (AVE) $\geq 0,50$ (Hair *et al.*, 2019). Selain itu, nilai *loading*

factor menunjukkan bahwa setiap indikator tersebut mampu merepresentasikan konstruk secara memadai dengan nilai ideal lebih dari 0,7. Hasil pengujian validitas konvergen dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Validitas Konvergen Awal

Variabel	Kode	Loading Factor	AVE
Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan	PDI 1	0.852	0.659
	PDI 2	0.890	
	PDI 3	0.898	
	PDI 4	0.770	
	PDI 5	0.614	
Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian	UAI 1	0.751	0.565
	UAI 2	0.773	
	UAI 3	0.738	
	UAI 4	0.747	
	UAI 5	0.748	
Dimensi Budaya Kolektivisme	COL 1	0.819	0.648
	COL 2	0.892	
	COL 3	0.873	
	COL 4	0.916	
	COL 5	0.844	
	COL 6	0.322	
Dimensi Budaya Maskulinitas	MAS 1	0.802	0.614
	MAS 2	0.854	
	MAS 3	0.716	
	MAS 4	0.754	
Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang	LTO 1	0.817	0.563
	LTO 2	0.574	
	LTO 3	0.808	
	LTO 4	0.890	
	LTO 5	0.781	
	LTO 6	0.570	
Dimensi Budaya Pemuasan Diri	IND 1	0.538	0.504
	IND 2	0.642	
	IND 3	0.734	
	IND 4	0.811	
	IND 5	0.787	
Kepribadian Machiavellianisme	MCV 1	0.736	0.527
	MCV 2	0.697	
	MCV 3	0.830	

Tabel 4.10 Lanjutan

Variabel	Kode	Loading Factor	AVE
	MCV 4	0.730	
	MCV 5	0.726	
	MCV 6	0.623	
Niat Melakukan Praktik Korupsi	CIn. 1	0.760	0.683
	CIn. 2	0.825	
	CIn. 3	0.873	
	CIn. 4	0.798	
	CIn. 5	0.872	
	CIn. 6	0.825	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.10 yang menunjukkan hasil uji validitas konvergen awal, diketahui bahwasannya ditemukan berbagai indikator yang memiliki nilai *loading* dibawah 0.70. Namun, dalam hal ini Shmueli *et al.* (2019) menyebutkan nilai loading sebesar 0.50 atau lebih dianggap signifikan secara praktis. Sehingga masih dapat dipertahankan. Sementara, nilai loading yang berada dibawah 0.50 akan dihilangkan agar nilai AVE tidak dipengaruhi oleh item yang tidak relevan. Selanjutnya setelah item yang tidak memenuhi syarat dihilangkan, maka dilakukan pengujian kembali sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Validitas Konvergen Final

Variabel	Kode	Loading Factor	AVE	Keterangan
Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan	PDI 1	0.852	0.659	Valid
	PDI 2	0.890		
	PDI 3	0.898		
	PDI 4	0.770		
	PDI 5	0.614		
Dimensi Budaya Ketidakpastian	UAI 1	0.751	0.565	Valid
	UAI 2	0.773		
	UAI 3	0.738		
	UAI 4	0.747		

Tabel 4.11 Lanjutkan

Variabel	Kode	Loading Factor	AVE	Keterangan
	UAI 5	0.748		
Dimensi Budaya Kolektivisme	COL 1	0.840	0.809	Valid
	COL 2	0.921		
	COL 3	0.909		
	COL 4	0.937		
	COL 5	0.886		
Dimensi Budaya Maskulinitas	MAS 1	0.802	0.614	Valid
	MAS 2	0.854		
	MAS 3	0.717		
	MAS 4	0.754		
Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang	LTO 1	0.817	0.563	Valid
	LTO 2	0.575		
	LTO 3	0.808		
	LTO 4	0.890		
	LTO 5	0.781		
	LTO 6	0.570		
Dimensi Budaya Pemuasan Diri	IND 1	0.538	0.503	Valid
	IND 2	0.642		
	IND 3	0.734		
	IND 4	0.811		
	IND 5	0.787		
Kepribadian Machiavellianisme	MCV 1	0.736	0.528	Valid
	MCV 2	0.697		
	MCV 3	0.830		
	MCV 4	0.730		
	MCV 5	0.726		
	MCV 6	0.623		
Niat Melakukan Praktik Korupsi	CIn. 1	0.760	0.683	Valid
	CIn. 2	0.825		
	CIn. 3	0.873		
	CIn. 4	0.797		
	CIn. 5	0.872		
	CIn. 6	0.825		

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.11 yang menunjukkan hasil uji validitas konvergen akhir dengan menghilangkan indikator yang tidak relevan. Maka semua nilai *loading* berada

diatas 0.70 dan nilai AVE berada di atas 0.50. Sehingga, dapat disimpulkan bahwasannya semua konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas konvergen dengan baik.

4.4.2 Pengujian Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu konstruk dapat dibedakan secara empiris dari konstruk-konstruk lain dalam model (Hair *et al.*, 2019). Secara empiris dinilai dengan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) nilai ambang batas yang lebih konservatif yaitu 0,85 (Henseler *et al.*, 2015).

Tabel 4.12
Hasil Pengujian *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT)

	PDI	UAI	COL	MAS	LTO	IND	MCV	CIn
PDI								
UAI	0.205							
COL	0.101	0.129						
MAS	0.126	0.283	0.102					
LTO	0.083	0.164	0.160	0.136				
IND	0.084	0.149	0.131	0.257	0.104			
MCV	0.102	0.309	0.289	0.280	0.063	0.133		
CIn	0.133	0.329	0.139	0.288	0.123	0.171	0.314	

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwasannya setiap variabel dapat memenuhi nilai ideal HTMT yaitu dibawah 0.85. Dengan demikian, semua konstruk dinyatakan memenuhi validitas diskriminan dengan baik. Uji validitas diskriminan juga dapat dilihat dari nilai *cross loading* sebagaimana Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Hasil Pengujian *Cross Loading*

	PDI	UAI	COL	MAS	LTO	IND	MCV	CIn
PDI 1	0.852	0.192	-0.109	-0.009	0.096	-0.077	-0.043	-0.121
PDI 2	0.890	0.192	-0.120	-0.081	0.055	-0.057	-0.100	-0.094
PDI 3	0.898	0.173	-0.082	-0.091	-0.024	-0.050	-0.056	-0.159

Tabel 4.13 Lanjutan

	PDI	UAI	COL	MAS	LTO	IND	MCV	CIn
PDI 4	0.770	0.133	-0.022	0.003	0.089	-0.026	0.016	-0.076
PDI 5	0.614	0.071	0.057	0.029	0.023	-0.104	0.113	0.050
UAI 1	0.195	0.751	0.080	-0.145	0.137	0.033	-0.157	-0.214
UAI 2	0.123	0.773	0.137	-0.228	0.098	0.002	-0.185	-0.184
UAI 3	0.129	0.738	0.059	-0.145	0.137	0.070	-0.273	-0.191
UAI 4	0.102	0.747	0.041	-0.171	0.008	-0.130	-0.186	-0.222
UAI 5	0.226	0.748	0.085	-0.191	0.074	-0.140	-0.178	-0.252
COL 1	-0.060	0.148	0.840	0.035	0.190	-0.015	0.188	0.078
COL 2	-0.104	0.094	0.921	0.033	0.071	-0.034	0.264	0.147
COL 3	-0.107	0.084	0.909	0.113	0.120	0.005	0.238	0.107
COL 4	-0.105	0.083	0.937	0.111	0.101	-0.012	0.252	0.139
COL 5	-0.137	0.088	0.886	0.030	0.114	-0.003	0.248	0.130
MAS 1	-0.076	-0.222	0.148	0.802	0.054	0.098	0.258	0.242
MAS 2	-0.075	-0.177	0.044	0.854	0.134	0.195	0.135	0.237
MAS 3	0.123	-0.144	0.049	0.717	0.088	0.109	0.170	0.086
MAS 4	-0.077	-0.172	-0.025	0.754	0.118	0.228	0.150	0.223
LTO 1	0.010	0.143	0.144	0.113	0.817	0.138	-0.032	0.065
LTO 2	-0.017	0.062	0.281	0.000	0.575	0.009	0.097	-0.013
LTO 3	0.019	0.063	0.064	0.090	0.808	0.032	-0.000	0.053
LTO 4	0.095	0.062	0.080	0.143	0.890	0.077	0.073	0.166
LTO 5	-0.033	0.153	0.167	-0.000	0.781	0.103	-0.000	0.075
LTO 6	0.035	0.107	0.117	0.117	0.570	0.007	0.050	0.027
IND 1	-0.020	0.068	-0.092	0.087	0.087	0.538	-0.046	0.013
IND 2	0.009	-0.080	-0.117	0.186	0.048	0.642	0.006	0.046
IND 3	0.021	-0.099	-0.157	0.141	0.025	0.734	-0.015	0.057
IND 4	-0.086	-0.003	0.028	0.207	0.115	0.811	0.108	0.176
IND 5	-0.031	-0.064	0.043	0.105	0.061	0.787	0.111	0.141
MCV 1	0.004	-0.099	0.218	0.165	0.029	0.055	0.736	0.219
MCV 2	-0.056	-0.218	0.112	0.221	0.039	0.167	0.697	0.194
MCV 3	-0.106	-0.250	0.247	0.179	0.028	0.088	0.830	0.337
MCV 4	-0.053	-0.099	0.295	0.124	-0.018	0.010	0.730	0.157
MCV 5	-0.067	-0.246	0.156	0.150	0.055	0.062	0.726	0.215
MCV 6	-0.028	-0.180	0.113	0.159	-0.034	0.026	0.623	0.091
CIn 1	-0.152	-0.242	0.195	0.281	0.146	0.112	0.313	0.760
CIn 2	-0.064	-0.221	0.142	0.282	0.021	0.131	0.274	0.825
CIn 3	-0.125	-0.208	0.122	0.231	0.157	0.197	0.243	0.873
CIn 4	-0.182	-0.226	0.087	0.196	0.166	0.126	0.216	0.797
CIn 5	-0.146	-0.271	0.050	0.200	0.075	0.159	0.232	0.872
CIn 6	-0.115	-0.251	0.066	0.146	0.076	0.111	0.232	0.825

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.13 menyajikan hasil uji *cross loading* yang menunjukkan bahwasannya setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukur dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa model pengukuran telah memenuhi kriteria validitas diskriminan.

4.4.3 Pengujian Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi dan kestabilan alat ukur di berbagai waktu, situasi, serta pada responden atau sampel yang berbeda (Sekaran & Bougie, 2016; Saunders *et al.*, 2019). Dalam penelitian ini nilai *composite reliability* merupakan metode pendekatan reliabilitas yang lebih disarankan. Dengan nilai *reliability* yang dianggap memenuhi standar reliabilitas secara umum adalah sebesar 0,70 atau lebih (Hair *et al.*, 2019). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
PDI	0.919	Reliabel
UAI	0.866	Reliabel
COL	0.955	Reliabel
MAS	0.864	Reliabel
LTO	0.896	Reliabel
IND	0.817	Reliabel
MCV	0.854	Reliabel
CIn	0.928	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.14 yang menunjukkan hasil pengujian reliabilitas, dapat diketahui bahwasannya nilai *composite reliability* yang disajikan menunjukkan nilai diatas 0.70. Hal ini menandakan terpenuhinya nilai reliabilitas dalam konstruk penelitian, sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

4.5 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Uji model struktural atau *inner model* bertujuan untuk menilai hubungan atau jalur struktural antar konstruk. Melalui beragam analisis seperti uji kolinearitas, uji koefisien determinasi (R^2), uji ukuran efek (f^2), uji blindfolding (Q^2) dan uji PLS *Predict*.

4.5.1 Pengujian Kolinearitas

Uji kolinearitas bertujuan untuk menilai bahwasannya konstruk prediktor dalam model struktural menunjukkan tidak terdapat masalah kolinearitas. Didasarkan pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) = 1 menunjukkan nilai kolinearitas yang ideal. (Hair *et al.*, 2019). Hasil pengujian kolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Hasil Pengujian Kolinearitas

	VIF
PDI → CIn	1.074
UAI → CIn	1.227
COL → CIn	1.159
MAS → CIn	1.152
LTO → CIn	1.058
IND → CIN	1.062
MCV → CIn	1.219

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.15 yang menunjukkan hasil pengujian kolinearitas melalui nilai VIF. Diketahui bahwasannya nilai VIF untuk setiap konstruk sama dengan 1, sehingga mengindikasikan tidak terdapat masalah kolinearitas yang berarti.

4.5.2 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk ukuran kemampuan prediktif dalam sampel (*in-sample predictive power*). Nilai R^2 berkisar antara 0 - 1 dengan nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan sedangkan nilai 1 menunjukkan hubungan sempurna. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar daya penjelas dari model struktural

PLS. Oleh karena itu, semakin baik kemampuan prediksi terhadap konstruk endogen (Hair *et al.*, 2019). Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

	<i>R-Square</i>	<i>R-square adjusted (R^2)</i>
CIn	0.610	0.688

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.16 disajikan hasil pengujian koefisien determinasi dengan nilai *R-square adjusted* sebesar 0.688 atau setara dengan 68% yang dikategorikan moderat (Hair *et al.*, 2019). Hal ini menunjukkan konstruk eksogen memiliki kemampuan yang moderat sebesar 68% dalam menjelaskan konstruk endogen. Sedangkan 32% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar kontstruk yang dibangun.

4.5.3 Pengujian Ukuran Efek (f^2)

Ukuran efek (f^2) digunakan untuk mengetahui apakah menghapus suatu konstruk prediktor dari model struktural memberikan dampak substantif terhadap konstruk endogen (Hair *et al.*, 2019). Hasil pengujian ukuran efek (f^2) dapat dilihat dari Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Ukuran Efek (f^2)

	CIn	Keterangan
PDI	0.208	Efek Sedang
UAI	0.344	Efek Sedang
COL	0.327	Efek Sedang
MAS	0.321	Efek Sedang
LTO	0.217	Efek Sedang
IND	0.211	Efek Sedang
MCV	0.334	Efek Sedang

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.17 yang menyajikan hasil pengujian ukuran efek (f^2), diketahui bahwasannya nilai f^2 pada konstruk memiliki rentang nilai antara 0.16-0.34. Merujuk pada kriteria nilai f^2 oleh Cohen (1988) bahwasannya nilai $f^2 = 0.02$ efek kecil, 0.15 efek sedang dan 0.35 efek besar. Maka nilai f^2 pada konstruk penelitian berada pada kriteria efek sedang ($0.15 > f^2 < 0.35$). Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel prediktor memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan variabel endogen.

4.5.4 Pengujian *Blindfolding* (Q^2)

Uji *Blindfolding* (Q^2) digunakan untuk mengukur kemampuan prediktif model atau yang dikenal sebagai relevansi prediktif (*predictive relevance*) (Hair *et al.*, 2019). Sebagai acuan, nilai $Q^2 \geq 0$ menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang memadai terhadap konstruk endogen. Adapun metode yang dianggap lebih unggul untuk menghitung Q^2 yaitu *cross-validated redundancy* (Cohen, 1988). Hasil pengujian *blindfolding* (Q^2) dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Hasil Pengujian *Blindfolding* (Q^2)

	<i>Blindfolding</i> (Q^2)	Keterangan
CIn 1	0.143	Prediktif Memadai
CIn 2	0.073	Prediktif Memadai
CIn 3	0.087	Prediktif Memadai
CIn 4	0.078	Prediktif Memadai
CIn 5	0.066	Prediktif Memadai
CIn 6	0.044	Prediktif Memadai

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.18 yang menyajikan hasil pengujian *blindfolding* (Q^2), diketahui bahwasannya nilai *blindfolding* (Q^2) didalam konstruk berada di atas 0 (nol) secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan konstruk yang dibangun memiliki relevansi prediktif yang memadai terhadap konstruk endogen.

4.6 PLS Predict

Uji PLS-Predict bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu model yang dikembangkan dapat memiliki kekuatan prediksi (*predictive power*) dari nilai-nilai data baru (*out-of-sample prediction*), bukan hanya menjelaskan data yang ada (Shmueli *et al.*, 2016). Dengan *rules of thumb* jika PLS-SEM < LM (*Linear Regression Model*) untuk tidak satu pun indikator maka model tidak memiliki daya prediktif. Jika PLS-SEM < LM untuk sebagian kecil indikator maka model memiliki daya prediktif rendah. Jika PLS-SEM < LM untuk sebagian besar indikator maka ini menunjukkan daya prediktif sedang. Serta, jika PLS-SEM < LM untuk semua indikator maka model memiliki daya prediktif tinggi (Shmueli *et al.*, 2019). Hasil pengujian PLS Predict dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Hasil Pengujian PLS Predict

	PLS_SEM RMSE	PLS_SEM MAE	LM_RMSE	LM_MAE
CIn 1	1.067	0.891	1.149	0.942
CIn 2	1.175	0.979	1.278	1.044
CIn 3	1.231	1.024	1.274	1.049
CIn 4	1.106	0.898	1.187	0.948
CIn 5	1.188	0.987	1.257	1.014
CIn 6	1.323	1.020	1.360	1.094

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.19 disajikan hasil pengujian PLS Predict pada setiap item dalam kostruk variabel Niat Melakukan Praktik Korupsi (CInt). Maka diketahui bahwasannya nilai PLS-SEM RMSE memiliki nilai lebih kecil dari nilai LM-RMSE secara keseluruhan, begitu juga nilai PLS-SEM MAE memiliki nilai lebih kecil dari nilai LM-MAE secara keseluruhan. Maka, secara keseluruhan model dapat dianggap memiliki nilai daya prediktif tinggi.

4.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan besaran dan signifikansi koefisien jalur (*path coefficients*) dalam model struktural. Dimana suatu koefisien jalur dinyatakan memiliki pengaruh signifikan jika nilai *t-statistic* ≥ 1.96 dan nilai signifikansi atau *p values* $\leq 0,05$ (Hair *et al.*, 2019). Hasil pengujian hipotesis bisa dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20
Hasil Pengujian Hubungan Antar Konstruk

	Hubungan Konstruk	<i>Path Coefficients</i>	<i>t- statistics</i>	<i>p- values</i>	Keterangan
H1.a	PDI → CIn	0.084	1.017	0.309	Tidak Didukung
H1.b	UAI → CIn	0.205	3.080	0.002	Didukung
H1.c	COL → CIn	0.277	2.174	0.040	Didukung
H1.d	MAS → CIn	0.239	2.651	0.005	Didukung
H1.3	LTO → CIn	-0.318	2.623	0.005	Didukung
H1.f	IND → CIn	0.097	1.285	0.199	Tidak Didukung
H2	MCV → CIn	0.183	2.637	0.008	Didukung

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.20 yang memuat pengujian hubungan antar variabel (uji hipotesis), maka diketahui bahwasannya tidak semua konstruk dapat memiliki hubungan yang signifikan, diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi memiliki nilai koefisien 0.084 dengan nilai *t-statistik* 1.017 dan *p-values* 0.309. Hal ini mengindikasikan bahwasannya meskipun nilai koefisien menunjukkan arah yang positif namun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya bahwa meskipun seseorang hidup ditengah masyarakat yang memiliki budaya jarak

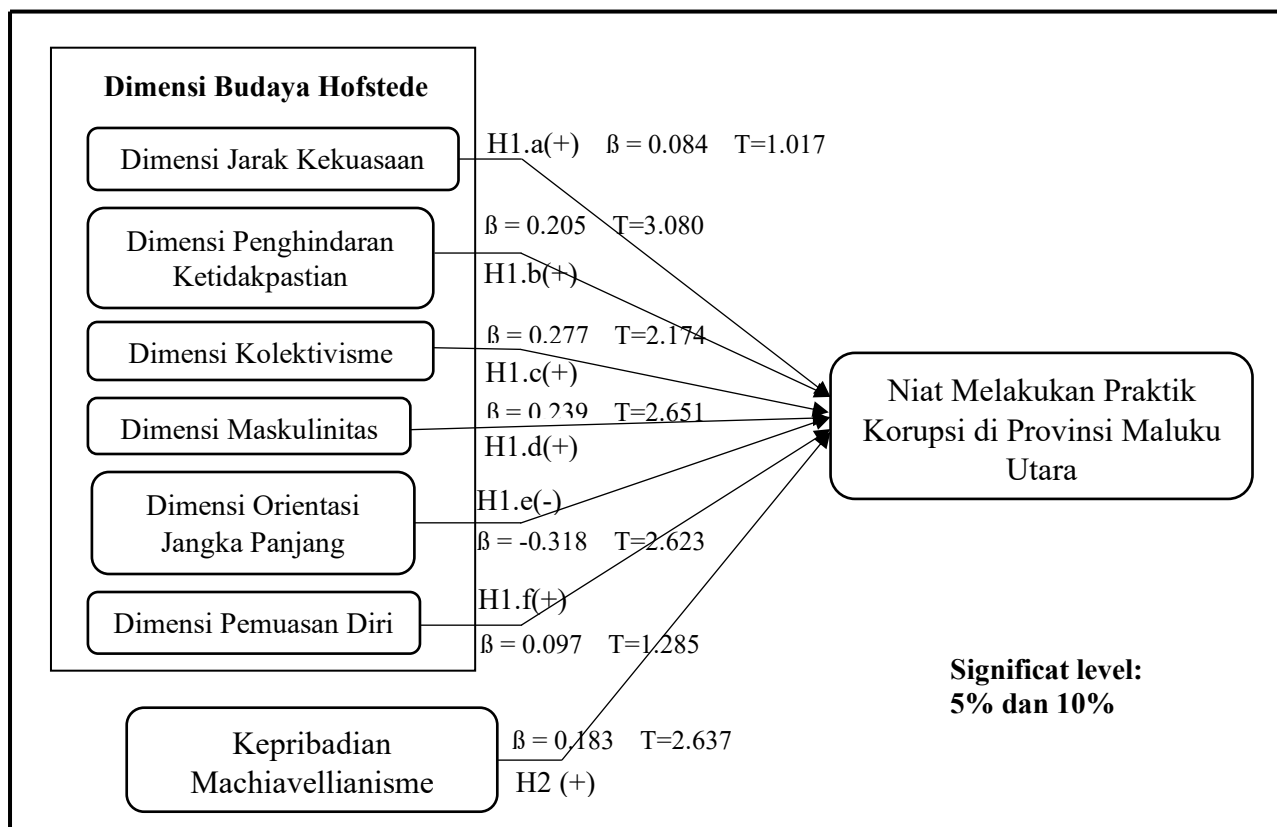
kekuasaan yang tinggi, hal tersebut tidak meningkatkan niat melakukan praktik korupsi. Sehingga, hipotesis H1.a **tidak didukung**.

2. Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi memiliki nilai koefisien 0.205 dengan nilai t-statistik 3.080 dan *p-values* 0.002. Hal ini mengindikasikan bahwasannya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi. Artinya meningkatnya Niat Melakukan Praktik Korupsi oleh seseorang dapat disebabkan karena Budaya Penghindaran Ketidakpastian yang tinggi. Maka hipotesis H1.b **didukung**.
3. Dimensi Budaya Kolektivisme terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi memiliki nilai koefisien 0.277 dengan nilai t-statistik 2.174 dan *p-values* 0.040. Hal ini mengindikasikan bahwasannya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Dimensi Budaya Kolektivisme terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi. Artinya, semakin tinggi Budaya Kolektivisme di tengah masyarakat maka Niat Melakukan Praktik Korupsi juga akan semakin meningkat. Sehingga, hipotesis H1.c **didukung**.
4. Dimensi Budaya Maskulinitas terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi memiliki nilai koefisien 0.239 dengan nilai t-statistik 2.651 dan *p-values* 0.005. Hal ini mengindikasikan bahwasannya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Dimensi Budaya Maskulinitas terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi. Artinya, seseorang yang tinggal ditengah budaya maskulinas yang tinggi, akan meningkatkan niat melakukan praktik korupsi dalam dirinya. Sehingga, hipotesis H1.d **didukung**.
5. Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi memiliki nilai koefisien -0.318 dengan nilai t-statistik 2.623 dan *p-values* 0.005. Hal

ini mengindikasikan bahwasannya terdapat hubungan yang negatif yang signifikan antara Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi. Artinya, seseorang yang berada di tengah budaya orientasi jangka panjang yang tinggi dapat menurunkan niatnya melakukan praktik korupsi. Sehingga, hipotesis H1.e **didukung**.

6. Dimensi Budaya Pemuasan Diri terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi memiliki nilai koefisien 0.097 dengan nilai t-statistik 1.285 dan *p-values* 0.199. Hal ini mengindikasikan bahwasannya meskipun terdapat hubungan yang positif antara Dimensi Budaya Pemuasan Diri terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi. Namun, hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Artinya, budaya pemuasan diri yang tinggi tidak sepenuhnya dapat meningkatkan niat seseorang untuk melakukan praktik korupsi. Sehingga, hipotesis H1.f **tidak didukung**.
7. Kepribadian Machiavellianisme terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi memiliki nilai koefisien 0.183 dengan nilai t-statistik 2.637 dan *p-values* 0.008. Hal ini mengindikasikan bahwasannya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kepribadian Machiavellianisme terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi. Artinya, seseorang dengan kepribadian machiavellianisme yang tinggi akan meningkatkan niat melakukan praktik korupsi dalam dirinya. Sehingga, hipotesis kedua (H2) **didukung**.

Hasil model penelitian yang menunjukkan ringkasan dari koefisien jalur, dapat dilihat pada Gambar 4.1



Gambar 4.1 Hasil Model Penelitian

4.8 Pengujian *Multigroup Analysis* (MGA)

Multi-Group Analysis (MGA) merupakan bagian dari analisis lanjutan untuk menguji perbedaan efek lintas kelompok (Cheah *et al.*, 2020). Penelitian ini menggunakan jenis organisasi untuk mendukung pengaruh Dimensi Budaya Hofstede (DBH) dan Kepribadian Machiavellianisme (MCV) terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi (CIn). Sebelum melakukan analisis multikelompok, peneliti memastikan bahwa telah memenuhi syarat invariansi pengukuran dimana konstruk laten memiliki validitas dan kesetaraan pengukuran di seluruh kelompok yang dibandingkan. Caranya dengan melakukan prosedur MICOM (*Measurement Invariance of Composite Model*) yang terdiri dari tahapan *compositional invariance* dan *composite equality* (Henseler *et al.*, 2016).

Compositional invariance ialah tahapan untuk memastikan bahwa *composit* (konstruk) dibentuk dengan indikator yang sama untuk seluruh kelompok. Caranya dengan membandingkan nilai setiap kelompok (*original correlation*) dengan nilai batas bawah 5% ($OC \geq 5\%$). Serta, *permutation p-values* $\geq 0,05$ (insignifikan) (Cheah *et al.*, 2020). Hasil uji *composite invariance* dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21
Hasil Pengujian *Composite Invariance*

Konstruk	<i>Original Correlation</i>	5%	<i>Permutation p- values</i>	Keterangan
CIn	0.860	-0.804	0.814	Invariant
DBH	0.981	0.843	0.574	Invariant
MCV	0.999	0.993	0.717	Invariant

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.21 terkait dengan hasil uji *composite invariance*, diketahui bahwasannya seluruh konstruk memiliki nilai *original correlation* diatas 5%. Artinya nilai perbandingan antara kelompok jenis organisasi publik dan swasta berada diatas ambang batas 5% pada semua konstruk. Selain itu nilai *permutation p-values* berada diatas 0.05 (insignifikan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa invariansi komposisional telah tercapai dan akan dilakukan uji *composite equality*.

Uji *composite equality* digunakan untuk menilai kesetaraan nilai rata-rata (*mean*) dan varians dari konstruk yang dibandingkan. Caranya dengan memastikan bahwa nilai setiap konstruk berada dalam interval kepercayaan 95%. Hal ini dilakukan dengan membandingkan nilai *mean original difference* dengan interval kepercayaan 2,5% dan 97,5%. Serta, *permutation p-values* $\geq 0,05$ (insignifikan). Jika kondisi ini terpenuhi maka invariansi pengukuran penuh (*full measurement invariance*) dapat diklaim. Namun,

apabila kesetaraan nilai rata-rata (*mean*) dan varians komposit tidak terpenuhi, maka peneliti masih dapat mengklaim invariansi pengukuran parsial dan melanjutkan analisis multikelompok (MGA) (Cheah *et al.*, 2020; Shmueli *et al.*, 2019). Hasil uji *composite equality* dapat dilihat pada Tabel 4.22 dan 4.23.

Tabel 4.22 Hasil Pengujian *Composite Equality (Mean)*

Konstruk	Mean				Keterangan
	<i>Original Correlation</i>	2.5%	97.5%	<i>Permutation p- values</i>	
CIn	-0.050	-0.238	0.256	0.697	Setara
DBH	-0.128	-0.282	0.262	0.325	Setara
MCV	-0.225	-0.253	0.252	0.085	Setara

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.22 yang menyajikan hasil uji *composite equality* untuk nilai rata-rata (*mean*). Diketahui bahwasannya seluruh konstruk memiliki nilai *original correlation* diantara interval kepercayaan 2,5% dan 97,5%. Serta nilai permutasi p yang insignifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kesetaraan komposit *mean* terpenuhi.

Tabel 4.23 Hasil Pengujian *Composite Equality (Variance)*

Konstruk	Variance				Keterangan
	<i>Original Correlation</i>	2.5%	97.5%	<i>Permutation p- values</i>	
CIn	0.555	-0.540	0.576	0.053	Setara
DBH	0.420	-0.462	0.420	0.072	Setara
MCV	0.326	-0.342	0.375	0.083	Setara

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.23 yang menyajikan hasil uji *composite equality* untuk nilai *variance*. Diketahui bahwasannya seluruh konstruk memiliki nilai *original correlation* diantara interval kepercayaan 2,5% dan 97,5%. Serta nilai permutasi p yang insignifikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesetaraan komposit *variance* terpenuhi. Dengan demikian karena nilai komposit *mean* dan *variance* terpenuhi maka pengukuran invariansi pengukuran penuh (*full measurement invariance*) dapat diklaim. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk telah memenuhi syarat invariansi pengukuran dimana konstruk laten memiliki validitas dan kesetaraan pengukuran di seluruh kelompok yang dibandingkan.

Hasil MICOM yang menunjukkan *full measurement invariance* terpenuhi, maka *Multi-Group Analysis* (MGA) dapat dilakukan secara valid untuk membandingkan koefisien jalur antar kelompok. Analisis MGA dalam penelitian ini didasarkan pada uji permutasi karena kemampuannya dalam mengendalikan kesalahan interpretasi serta sifatnya yang relatif lebih konservatif (Cheah *et al.*, 2020). Hasil Uji Permutasi dapat dilihat pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24 Hasil Pengujian MGA (*Permutation Test*)

Konstruk	Path Koeffisien	Permutation p- values	Keterangan
DBH → CIn	0.203	0.005	Signifikan
MCV → CIn	0.109	0.005	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.24 yang menyajikan hasil pengujian *Multi-Group Analysis* (MGA) menggunakan pendekatan uji permutasi, diketahui bahwasannya hubungan DBH terhadap CIn dan MCV terhadap CIn memiliki nilai permutation p-value sebesar 0.005, dengan jalur hubungan yang positif. Artinya kelompok jenis organisasi publik dan swasta dapat memoderasi hubungan antara DBH terhadap CIn sebesar 0.203. Serta memoderasi hubungan antara MCV terhadap CIn sebesar 0.109 Sehingga disimpulkan bahwa jenis

organisasi berperan sebagai variabel pemoderasi yang membedakan kekuatan pengaruh kedua hubungan tersebut antar kelompok.

Meskipun uji permutasi telah dilakukan untuk menilai koefisien jalur antar kelompok, peneliti melakukan uji tambahan menggunakan *Welch-Satterthwaite Test* untuk memastikan bahwa hubungan tersebut konsisten pada masing-masing kelompok. Hasil pengujian *welch-satterthwaite* dapat dilihat pada tabel 4.25.

Tabel 4.25 Hasil Pengujian MGA *Welch-Satterthwaite Test*

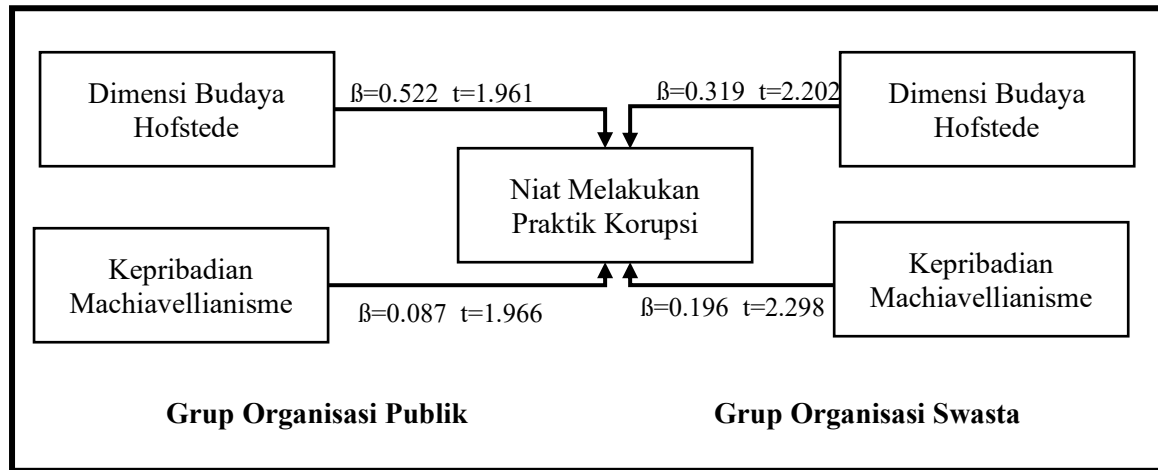
Konstruk	Perusahaan Publik		Perusahaan Non-Publik (Swasta)		Keterangan
	<i>Path Coeffisien</i>	<i>p-values</i>	<i>Path Coeffisien</i>	<i>p-values</i>	
DBH → CIn	0.522	0.005	0.319	0.030	Signifikan
MCV → CIn	0.087	0.005	0.196	0.022	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.25 yang menyajikan hasil pengujian *Welch-Satterthwaite*, diketahui bahwa hubungan DBH terhadap CIn dan MCV terhadap CIn menunjukkan nilai koefisien jalur yang positif dan signifikan baik pada perusahaan publik maupun perusahaan non-publik. Artinya, kelompok jenis organisasi publik dapat memoderasi hubungan antara DBH terhadap CIn dan MCV terhadap CIn masing-masing sebesar 0.522 dan 0.087. Kelompok jenis organisasi swasta juga dapat memoderasi hubungan antara DBH terhadap CIn dan MCV terhadap CIn masing-masing sebesar 0.319 dan 0.196. Hal ini mengindikasikan bahwa Dimensi Budaya Hofstede dan Kepribadian Machiavellianisme memiliki pengaruh yang konsisten terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi pada masing-masing kelompok perusahaan. Dengan demikian, jenis organisasi terbukti dapat memoderasi hubungan antara Dimensi Budaya Hofstede dan Kepribadian

Machiavellianisme terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi, baik antar kelompok maupun masing-masing kelompok. Maka, H4 dan H5 **didukung**.

Selanjutnya disajikan model penelitian yang menunjukkan ringkasan dari koefisien jalur MGA, yang dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Model Jalur Berdasarkan Jenis Organisasi

4.9 Pembahasan dan Implikasi

4.9.1 Pengaruh Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Maluku Utara

Hasil pengujian hipotesis (H1.a) menunjukkan bahwasannya Dimensi Budaya Jarak Kekuasaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Provinsi Maluku Utara dengan budaya jarak kekuasaan yang tinggi tidak secara langsung meningkatkan niat melakukan praktik korupsi seseorang.

Dimensi budaya jarak kekuasaan sendiri merujuk kepada sejauh mana anggota organisasi atau masyarakat yang memiliki posisi lebih rendah menerima dan menganggap wajar distribusi kekuasaan yang tidak merata (Geert *et al.*, 2010; Hofstede, 2011). Dalam

masyarakat dengan jarak kekuasaan yang tinggi, ketimpangan kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang normal, sehingga tindakan atau keputusan yang merugikan pihak yang kurang berkuasa jarang dipertanyakan. Struktur kekuasaan yang hierarkis dan tidak seimbang cenderung mendorong bawahan untuk patuh dan enggan mempertanyakan otoritas atasan (Park, 2015).

Temuan dalam penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Amalia dan Handayani (2019); Gayg dan Lajunen (2022); Im dan Chen (2020); Nainggolan (2022) yang menyatakan bahwasannya dimensi budaya jarak kekuasaan memiliki pengaruh positif terhadap niat melakukan praktik korupsi. Hal ini karena dalam budaya jarak kekuasaan yang tinggi, posisi pimpinan berada pada tingkat kekuasaan yang berbeda dengan karyawan. Pada tingkat kekuasaan tersebut maka pimpinan merasa harus selalu dipatuhi serta ditaati, kondisi ini sangat rentan disalahgunakan. Karena karyawan pada umumnya menjadi segan dan takut untuk menegur atau menentang tindakan tidak etis yang dilakukan pimpinan. Namun, budaya jarak kekuasaan yang tinggi tidak menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan niat melakukan praktik korupsi. Hal ini dijelaskan dalam penelitian oleh Chen *et al.* (2011) bahwasannya masih terdapat pimpinan yang bijaksana dan bermoral, dengan kecenderungan memandang pemeliharaan keharmonisan interpersonal sebagai bagian dari kewajiban. Sehingga akan melakukan perlindungan terhadap sumber daya organisasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab yang dimiliki, bukan sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan pribadi.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan konsep *perceived behavior control* dalam teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara niat dan

perilaku aktual, yaitu seseorang merasa memiliki kontrol atas suatu tindakan didasarkan pada faktor internal seperti informasi yang dimiliki, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pribadi (Ajzen, 2012). Dengan demikian, meskipun masyarakat berada dalam budaya jarak kekuasaan yang tinggi, individu yang memiliki kontrol diri, kesadaran moral, serta pemahaman yang memadai terhadap konsekuensi perilaku cenderung mampu menahan niat untuk terlibat dalam praktik korupsi.

Implikasi dari hasil penelitian ini menekankan upaya pencegahan tidak dapat hanya difokuskan pada perubahan struktur hierarkis semata. Sebaliknya, diperlukan penguatan nilai-nilai etika, integritas kepemimpinan, serta mekanisme kontrol internal yang mampu membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, peningkatan literasi etika, transparansi pengambilan keputusan, dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (*whistle-blower*) menjadi penting untuk mengurangi rasa takut dan keengganan karyawan dalam menyuarkan penyimpangan yang dilakukan oleh pimpinan.

4.9.2 Pengaruh Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Hasil pengujian hipotesis (H1.b) menunjukkan bahwasannya Dimensi Budaya Penghindaran Ketidakpastian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Melakukan Praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara. Temuan ini mengindikasikan bahwa budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi pada masyarakat di Provinsi Maluku Utara dapat meningkatkan niat individu untuk melakukan praktik korupsi.

Budaya penghindaran ketidakpastian sendiri mengacu pada sejauh mana individu dalam suatu masyarakat merasa terancam oleh peristiwa yang tidak pasti atau tidak

diketahui (Hofstede, 2011). Individu dengan penghindaran ketidakpastian yang tinggi menginginkan kepastian atau jaminan keamanan dalam kehidupannya, sehingga dapat mendorong dirinya untuk mencari berbagai instrumen atau cara yang dapat memberikan kepastian di masa depan, termasuk melakukan aktivitas melawan hukum (Park, 2015).

Temuan dalam penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Boateng *et al.* (2024) yang menyatakan bahwasannya budaya penghindaran ketidakpastian memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap niat melakukan praktik korupsi, hal ini karena Individu dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi akan cenderung merasa gelisah dalam situasi yang tidak jelas dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, lebih memilih untuk mempertahankan cara-cara lama dan cenderung menolak reformasi, karena adanya ketakutan terhadap masa depan yang tidak pasti. Selain itu penelitian oleh Amalia dan Handayani, (2019); Im dan Chen, (2020) juga mendukung hasil temuan dalam penelitian ini, dengan menyebutkan bahwasannya meskipun aturan dan regulasi secara intuitif tampak sebagai faktor yang dapat mencegah praktik korupsi, namun banyaknya aturan yang terbentuk justru tidak diiringi dengan kepedulian untuk melaksanakannya. Sehingga tidak dapat meminimalisir niat seseorang untuk melakukan praktik korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *attitude toward the behavior* dalam teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku terbentuk melalui keyakinan individu akan menghasilkan suatu konsekuensi dari perilakunya (Ajzen, 2020). Dengan demikian, individu yang merasa cemas terhadap situasi tidak pasti cenderung memiliki niat melakukan praktik korupsi sebagai cara aman untuk mengurangi risiko dimasa depan, terlebih jika lingkungan sosial menoleransi praktik tersebut.

Implikasi dari hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum, regulasi, dan aturan dalam masyarakat dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi tidak cukup hanya bersifat formal dan ketat, tetapi harus disertai dengan kepastian penegakan, konsistensi sanksi, serta mekanisme pengawasan yang aktif dan efektif. Individu dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi cenderung mencari rasa aman dan kepastian, sehingga lemahnya implementasi aturan justru membuka peluang munculnya niat melakukan praktik korupsi sebagai strategi untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang baik, transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting dalam meminimalisir niat melakukan praktik korupsi.

4.9.3 Pengaruh Dimensi Budaya Kolektivisme Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Hasil pengujian hipotesis (H1.c) menunjukkan bahwasannya Dimensi Budaya Kolektivisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Provinsi Maluku Utara dengan budaya kolektivisme yang tinggi dapat meningkatkan niat individu untuk melakukan praktik korupsi.

Budaya kolektivisme merujuk kepada individu yang sejak lahir menjadi bagian dari suatu kelompok yang erat seperti keluarga besar, saling melindungi dengan syarat adanya loyalitas penuh (Hofstede, 2011). Loyalitas dan kepatuhan penuh terhadap kelompok diperlukan untuk mempertahankan kesesuaian dengan kelompok. Sehingga, dapat memberikan tekanan kepada individu untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok

yang ada dan secara signifikan memengaruhi niatnya melakukan praktik korupsi (Park, 2015).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Guritno *et al.* (2021); Nainggolan (2022); Putra dan Sihombing (2024) yang menyatakan bahwasannya dimensi budaya kolektivisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan praktik korupsi. Hal ini karena masyarakat kolektif cenderung memiliki persepsi bahwa seseorang dapat melakukan perilaku korup dan merasa dilindungi oleh kelompok sebagai imbalan atas loyalitas yang diberikan. Selain itu adanya istilah "saling menguntungkan" dalam menyalahgunakan kekuasaan/kepentingan publik demi kepentingan kelompok, yang tidak dianggap sebagai bentuk korupsi. Penelitian lain oleh Amalia dan Handayani (2019; Im dan Chen (2020) juga mendukung hasil penelitian ini dengan menyakatakan bahwasannya loyalitas terhadap kelompok mendorong individu untuk melakukan tindakan tanpa memerdulikan baik atau buruknya. Selain itu, berbagai kejahatan keuangan yang sulit dicegah umumnya dilakukan secara bersama-sama. Sehingga budaya kolektivisme ini dapat meningkatkan niat melakukan praktik korupsi individu.

Temuan ini sejalan dengan *subjective norm* didalam teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwasannya individu memiliki persepsi mengenai adanya tekanan sosial yang mendorong untuk melakukan atau menghindari suatu perilaku tertentu. Ketika individu memiliki sikap negatif terhadap suatu perilaku dapat tetap merasakan desakan sosial untuk melaksanakannya (Ajzen, 1991). Dengan demikian individu cenderung menyesuaikan tindakannya dengan desakan atau harapan kelompok. Apabila korupsi dianggap hal yang lumrah atau dipandang sebagai bentuk kewajiban demi menjaga

solidaritas serta kepentingan bersama, maka tekanan sosial tersebut akan memperbesar kecenderungan individu untuk berniat melakukan tindakan korupsi.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya berfokus pada aspek individu semata, tetapi juga perlu memperhatikan konteks budaya yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Tingginya budaya kolektivisme mengindikasikan bahwa pengaruh kelompok memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk niat dan perilaku individu. Oleh karena itu, strategi antikorupsi perlu diarahkan pada perubahan norma sosial kelompok, bukan hanya pada peningkatan kesadaran moral individu.

4.9.4 Pengaruh Dimensi Budaya Maskulinitas Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Hasil pengujian hipotesis (H1.d) menunjukkan bahwasannya Dimensi Budaya Maskulinitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Maluku Utara. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Provinsi Maluku Utara yang memiliki budaya maskulinitas yang tinggi dapat meningkatkan niat individu untuk melakukan praktik korupsi.

Dimensi budaya maskulinitas merujuk pada ciri khas suatu masyarakat secara umum dengan pendekatan yang berbeda. Nilai-nilai yang tegas dan kompetitif disebut maskulin, sementara nilai yang peduli dan rendah hati disebut feminin (Hofstede, 2011). Masyarakat yang maskulin, cenderung berfokus pada pencapaian pribadi, kesuksesan materi dan status sosial. Sehingga, berpotensi untuk meningkatkan niat melakukan praktik korupsi (Guritno *et al.*, 2021).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Gayg dan Lajunen (2022); Guritno *et al.* (2021) yang menyatakan bahwasannya dimensi budaya maskulinitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan praktik korupsi. Hal ini karena masyarakat maskulin memiliki tuntutan akan kesuksesan karir atau pencapaian materi tertentu yang dapat menciptakan tekanan tersendiri pada seseorang. Tekanan tersebut kemudian meningkatkan niat seseorang untuk melakukan praktik korupsi. Penelitian lain yang juga mendukung hasil penelitian ini ialah oleh Im dan Chen (2020); Yeganeh (2014) yang menyatakan bahwa masyarakat maskulin memiliki persepsi bahwa kesuksesan material dapat membuatnya dihargai ditengah masyarakat. Hal in mendorong seseorang untuk fokus pada pencapaian materi tanpa memperdulikan orang lain. Sehingga meningkatkan niat melakukan praktik korupsi dalam diri seseorang sebagai jalan cepat.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori perilaku terencana, yang menjelaskan bahwasannya faktor utama dalam teori ini adalah niat (*intention*) individu untuk melakukan suatu perilaku, yang dipandang sebagai representasi dari faktor-faktor motivasional yang memengaruhi tindakan tersebut (Ajzen, 2012; Ajzen, 2020). Sehingga niat melakukan praktik korupsi yang tinggi oleh individu yang berada di tengah masyarakat maskulin akan meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terakit status sosial dan pencapaian materi. Hal ini dapat membuat seseorang melihat korupsi sebagai jalan cepat untuk mencapai kesuksesan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di masyarakat dengan tingkat budaya maskulinitas yang tinggi perlu diarahkan pada pengendalian tekanan sosial terkait pencapaian status, kesuksesan karier dan materi.

Orientasi yang berlebihan pada keberhasilan material dan pengakuan sosial dapat mendorong individu untuk menghalalkan berbagai cara, termasuk melakukan praktik korupsi, sebagai sarana mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan antikorupsi tidak cukup hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga perlu menanamkan nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab sosial sebagai indikator keberhasilan yang sama pentingnya dengan pencapaian materi.

4.9.5 Pengaruh Dimensi Orientasi Jangka Panjang Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Hasil pengujian hipotesis (H1.e) menunjukkan bahwasannya Dimensi Budaya Orientasi Jangka Panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara. Hal ini mengindikasikan bahwasannya masyarakat di Provinsi Maluku utara memiliki budaya orientasi jangka panjang yang tinggi yang dapat menurunkan niat seseorang untuk melakukan praktik korupsi.

Dimensi budaya orientasi jangka panjang merujuk pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai kehidupan mencakup ketekunan, hemat, mengatur hubungan yang baik dan memiliki rasa malu (Hofstede, 2011). Selain itu, masyarakat dengan budaya orientasi jangka panjang menggambarkan masyarakat yang memprioritaskan nilai-nilai berkaitan dengan masa depan seperti ketekunan dan hidup hemat. Sehingga, mereka cenderung memikirkan secara matang setiap keputusan yang diambil saat ini, karena adanya keyakinan bahwa keputusan tersebut akan membawa konsekuensi penting di masa depan (Amalia & Handayani, 2019).

Hasil penelitian mendukung penelitian terdahulu oleh Amalia dan Handayani, 2019; Masliza *et al.* (2024) yang menjelaskan bahwasannya dimensi budaya orientasi

jangka panjang tidak terbukti secara statistik meningkatkan niat melakukan praktik korupsi. Hal ini karena masyarakat dengan orientasi jangka panjang cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam pekerjaannya seperti kejujuran, akuntabilitas dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta memiliki tujuan jangka panjang yang jelas. Sehingga, individu memiliki kemampuan untuk menilai dan menanggapi risiko secara proaktif. Serta, menghindari diri dari perilaku yang dapat merusak masa depannya. Penelitian lain oleh Im dan Chen (2020) juga mendukung hasil penelitian ini dengan menyatakan bahwasannya masyarakat dengan orientasi jangka panjang yang tinggi cenderung percaya bahwa kesuksesan berasal dari usaha yang dilakukan hari ini. Sehingga akan melakukan perencanaan masa depan yang visioner untuk kepastian di masa depan. Hal ini membentuk individu mengetahui apa yang akan dilakukan dengan lebih jelas antara diri mereka saat ini dan masa depan sehingga cenderung tidak terlibat dalam perilaku yang tidak etis seperti memiliki niat melakukan praktik korupsi.

Hasil penelitian ini relevan dengan *perceived behavior control* di dalam teori perilaku terencana, yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki seperangkat keyakinan dapat melakukan kontrol atas suatu tindakan yang akan dilakukan, ia dapat memiliki kuasa untuk memilih berusaha dan bertahan untuk mencapainya (Ajzen, 2012). Sehingga, seseorang yang memiliki budaya orientasi jangka panjang cenderung tidak memiliki niat untuk melakukan praktik korupsi, karena ketekunan dan keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan jangka panjang yang sudah direncanakan.

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan budaya orientasi jangka panjang dapat menjadi salah satu strategi kunci dalam upaya pencegahan niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara. Masyarakat yang memiliki

pandangan jangka panjang cenderung mempertimbangkan konsekuensi masa depan dari setiap keputusan yang diambil, sehingga perilaku yang berpotensi merusak reputasi, karier, dan keberlanjutan hidup—seperti korupsi—akan dihindari. Oleh karena itu, kebijakan antikorupsi perlu diarahkan pada pembentukan pola pikir visioner, ketekunan, dan perencanaan masa depan yang berkelanjutan.

4.9.6 Pengaruh Dimensi Budaya Pemuasan Diri Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Hasil pengujian hipotesis (H1.f) menunjukkan bahwasannya Dimensi Budaya Pemuasan Diri berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara. Hal ini mengindikasikan bahwasannya budaya pemuasan diri yang tinggi pada masyarakat di Provinsi Maluku Utara tidak serta merta menjadi faktor yang mendukung meningkatkan niat melakukan praktik korupsi seseorang. Dimensi budaya pemuasan diri sendiri merujuk kepada masyarakat yang mengizinkan pemenuhan keinginan dan kesenangan pribadi secara relatif bebas, terutama yang berkaitan dengan menikmati hidup dan bersenang-senang (Hofstede, 2011).

Hasil temuan dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Amalia dan Handayani (2019); Nainggolan, (2022) yang menyatakan bahwasannya pada masyarakat dengan tingkat pemuasan diri yang tinggi, individu lebih berorientasi pada pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Orientasi tersebut dapat mendorong individu untuk menghalalkan berbagai cara demi mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, dorongan yang dimiliki tidak secara signifikan meningkatkan niat melakukan praktik korupsi. Hal ini berdasarkan pada penelitian oleh Baatour dan Saada (2021);

Guritno *et al.* (2021) yang menjelaskan bahwasannya individu dengan kondisi pemuasan diri dinilai dapat menikmati kehidupan. yang tercermin melalui sikap optimis serta dominasi emosi positif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi psikologis tersebut berperan dalam membantu individu mengelola tekanan dan dorongan internal secara lebih adaptif, sehingga mampu menahan kecenderungan untuk memiliki niat melakukan tindakan yang tidak etis maupun perilaku yang berpotensi merugikan orang lain.

Temuan dalam penelitian ini relevan dengan teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwasannya semakin kuat niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan, semakin besar kemungkinan tindakan tersebut akan terwujud. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa niat hanya dapat diwujudkan apabila perilaku yang dimaksud berada dalam lingkup kendali volisional individu (Ajzen, 2012; Ajzen, 2020). Sehingga, dimensi budaya pemuasan diri bukan merupakan faktor yang cukup kuat untuk meningkatkan niat melakukan praktik korupsi, terutama ketika seseorang masih memiliki kontrol diri, pertimbangan moral, serta batasan normatif yang membatasi realisasi perilaku tersebut.

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi budaya pemuasan diri tidak dapat dipandang sebagai determinan utama niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak perlu memusatkan perhatian secara berlebihan pada pembatasan pemenuhan kebutuhan pribadi, melainkan pada penguatan mekanisme pengendalian diri, internalisasi nilai etika, serta pembentukan norma sosial yang mendorong perilaku bertanggung jawab.

4.9.7 Pengaruh Kepribadian Machiavellianisem Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Hasil pengujian hipotesis (H2) menunjukkan bahwasannya Kepribadian Machiavellianisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa individu yang tinggal di Provinsi Maluku Utara dengan kepribadian machiavellianisme yang tinggi dapat meningkatkan niat melakukan praktik korupsi dalam dirinya.

Kepribadian machiavelliansme sendiri merujuk kepada individu yang memiliki ambisi kuat dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu (Wijayanti *et al.*, 2023). Kepribadian ini juga cenderung mengabaikan norma-norma sosial seperti kehormatan, kesopanan dan kepercayaan dalam berperilaku. Individu dengan ciri kepribadian ini sering menunjukkan sikap manipulatif dan memprioritaskan kepentingan pribadi di atas nilai-nilai moral. Serta senang mengendalikan, mempengaruhi, memperdaya dan mengeksploitasi orang lain demi keuntungan sendiri (McLaughlin, 1970).

Hasil temuan dalam penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Basri *et al.* (2023); Carré *et al.* (2020); Maharani *et al.* (2024); Mulyadi *et al.* (2023); Parawansa dan Winarto (2024); Setyaki dan Andreas (2022); Suryandari dan Valentin (2021); Triantoro *et al.* (2020); Utami *et al.* (2019) yang menyatakan bahwasannya kepribadian machiavellianisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan praktik korupsi. Hal ini disebabkan karena sifat machiavellian memiliki komitmen ideologis yang rendah, ego yang tinggi, bersifat manipulatif, serta agresif. Selain itu, kepribadian machiavellian cenderung membenarkan (merasionalisasi) kebohongan demi keuntungan

pribadi tanpa mempertimbangkan moral maupun etika. Ketika kepribadian ini telah tertanam dalam diri seseorang, maka ia mampu memanipulasi orang lain untuk mengikuti kehendaknya dalam melakukan tindakan tidak etis guna mencapai manfaat yang diharapkan. Dengan demikian telah terbukti secara empiris bahwa individu dengan kepribadian machiavellianisme lebih cenderung memiliki niat melakukan praktik praktik korupsi.

Temuan dalam penelitian ini sejalan konsep *attitude toward the behavior* dalam teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa sikap dapat dipahami sebagai kecenderungan individu untuk secara konsisten menampilkan perilaku tertentu, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan (Kumar *et al.*, 2025). Maka seorang machiavellian lebih mungkin memiliki niat melakukan praktik korupsi, karena adanya sikap permisif terhadap perilaku koruptif. Orientasi ini menyebabkan individu machiavellian cenderung menilai praktik korupsi sebagai tindakan yang dapat diterima selama mampu memberikan manfaat pribadi dan tidak menimbulkan risiko yang signifikan bagi dirinya. Akibatnya, evaluasi terhadap perilaku koruptif lebih didasarkan pada pertimbangan untung-rugi dibandingkan pertimbangan moral atau kepatuhan terhadap norma hukum.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara tidak dapat hanya berfokus pada penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga perlu memperhatikan aspek psikologis dan karakter individu. Kepribadian Machiavellianisme terbukti menjadi faktor internal yang signifikan dalam membentuk niat melakukan praktik korupsi, sehingga pendekatan

pencegahan korupsi perlu diarahkan pada pembentukan karakter, integritas, dan nilai moral individu sejak dini.

4.9.8 Pengaruh Jenis Organisasi dalam Memoderasi Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) dan hipotesis keempat (H4) berdasarkan uji *multigroup analysis* menunjukkan bahwasannya jenis organisais terbukti secara positif dan signifikan dapat memoderasi hubungan antara Dimensi Budaya Hofstede dan Kepribadian Machiavellianisme terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa niat melakukan praktik korupsi dapat terjadi baik pada organisasi sektor publik maupun sektor swasta, dengan adanya nilai-nilai budaya Hofstede dan kepribadian machiavellianisme yang dimiliki oleh seseorang. Hubungan moderasi tersebut tidak terlepas dari karakteristik struktural dan tata kelola yang melekat pada masing-masing jenis organisasi, seperti lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang efektif, serta adanya akses istimewa terhadap sistem atau sumber daya tertentu. Sehingga mendorong kondisi atau celah (*opportunity*) seseorang untuk memiliki niat melakukan praktik korupsi (Salihu, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Gayg dan Lajunen (2022); Putra dan Sihombing (2024); Salihu (2025) yang menjelaskan bahwasannya niat melakukan praktik korupsi pada perusahaan publik dapat disebabkan karena adanya hubungan pertemanan atau kekerabatan yang membangun hubungan komitmen sosial. Hal didasarkan pada doktrin budaya yang mengatur dinamika sosial dalam hubungan tersebut, karena doktrin budaya sendiri merupakan pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota suatu kelompok atau kategori manusia dari kelompok

lainnya(Hofstede, 1997). Sehingga cenderung mendorong preferensi berupa keberpihakan kepada kelompok dalam (*ingroup love*). Sedangkan pada perusahaan non publik (swasta) niat melakukan praktik korupsi dapat disebabkan karena adanya kecenderungan untuk memiliki kekayaan dalam bentuk dan cara yang mengesampingkan hak-hak manusia lainnya, sehingga dapat memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu. Adapun pada perusahaan swasta sering terjadi praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi kepada oknum pemerintah agar tujuan perusahaan dapat dengan mudah terlaksana (Meilytia & Sudarti, 2023). Hal ini relevan dengan kepribadian machiavellianisme yang cenderung manipulatif dan berorientasi hasil. Pada tingkat kepribadian machiavellian yang tinggi seseorang cenderung mengabaikan norma etika ketika dihadapkan pada persoalan moral. Mendorong terjadinya perilaku tidak etis dan pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja yang lebih buruk (Basri *et al.*, 2023; Sartor & Beamish, 2019; Triantoro *et al.*, 2020). Dengan demikian, nilai-nilai budaya hofstede dan kepribadian machiavellianisme dapat mempengaruhi niat melakukan praktik baik pada perusahaan publik maupun perusahaan non publik (swasta).

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya upaya pencegahan niat melakukan praktik korupsi tidak dapat diseragamkan, melainkan perlu disesuaikan dengan karakteristik jenis organisasi. Pada perusahaan publik, penguatan tata kelola yang menekankan transparansi, independensi pengawasan, serta pengelolaan konflik kepentingan menjadi krusial untuk menekan pengaruh nilai budaya yang mendorong favoritisme. Sementara itu, pada perusahaan non-publik, pengendalian internal yang ketat, pembatasan akses terhadap sumber daya strategis, serta penanaman nilai etika

organisasi menjadi penting untuk mereduksi pengaruh kepribadian Machiavellianisme yang berorientasi pada hasil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor budaya dan kepribadian dalam mendukung niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara. Faktor budaya secara khusus dalam penelitian ini merujuk kepada Dimensi Budaya Hofstede, yang terdiri dari 6 dimensi budaya seperti dimensi budaya jarak kekuasaan, dimensi budaya penghindaran ketidakpastian, dimensi budaya kolektivisme, dimensi budaya maskulinitas, dimensi budaya orientasi jangka panjang dan dimensi budaya pemuasan diri. Sedangkan faktor kepribadian merujuk kepada kepribadian Machiavellianisme. Penelitian ini juga menguji apakah niat melakukan praktik korupsi dapat dimoderasi oleh jenis organisasi tempat seseorang bekerja, yaitu jenis organisasi publik maupun swasta. Sebanyak 260 sampel yang berdomisili di Provinsi Maluku Utara digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, dengan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Dimensi budaya jarak kekuasaan terbukti berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara. Temuan ini mengindikasikan bahwasannya dimensi budaya jarak kekuasaan yang tinggi tidak diiringi dengan peningkatan niat melakukan praktik korupsi seseorang. Karena masih terdapat pimpinan yang bijaksana dan bermoral, dengan kecenderungan memandang pemeliharaan keharmonisan interpersonal sebagai bagian dari kewajiban. Sehingga akan melakukan perlindungan terhadap sumber daya organisasi sebagai bentuk

kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab yang dimiliki, bukan sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan pribadi.

2. Dimensi budaya penghindaran ketidakpastian terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan praktik korupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwasannya dimensi budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi dapat diiringi dengan meningkatnya niat melakukan praktik korupsi seseorang. Karena Individu dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi akan cenderung merasa gelisah dalam situasi yang tidak jelas dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, lebih memilih untuk mempertahankan cara-cara lama dan cenderung menolak reformasi, karena adanya ketakutan terhadap masa depan yang tidak pasti. Selain itu meskipun aturan dan regulasi secara intuitif tampak sebagai faktor yang dapat mencegah praktik korupsi, namun banyaknya aturan yang terbentuk justru tidak diiringi dengan kepedulian untuk melaksanakannya. Sehingga tidak dapat meminimalisir niat seseorang untuk melakukan praktik korupsi.
3. Dimensi budaya kolektivisme terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan praktik korupsi seseorang. Temuan ini mengindikasikan bahwasannya meningkatkan niat melakukan praktik korupsi seseorang disebabkan dimensi budaya kolektivisme yang tinggi ditengah masyarakat. Karena masyarakat kolektif cenderung memiliki persepsi bahwa seseorang dapat melakukan perilaku korup dan merasa dilindungi oleh kelompok sebagai imbalan atas loyalitas yang diberikan. Selain itu, loyalitas terhadap kelompok mendorong individu untuk melakukan tindakan tanpa memerdulikan baik atau buruknya. Selain itu, berbagai kejahatan keuangan yang sulit dicegah umumnya dilakukan secara bersama-sama.

Sehingga budaya kolektivisme ini dapat meningkatkan niat melakukan praktik korupsi individu.

4. Dimensi budaya maskulinitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan praktik seseorang. Temuan ini mengindikasikan bahwasannya semakin tinggi budaya maskulinitas suatu masyarakat maka akan meningkatkan niat melakukan praktik korupsi seseorang. Karena masyarakat maskulin memiliki tuntutan akan kesuksesan karir atau pencapaian materi tertentu selain itu persepsi bahwa kesuksesan material dapat membuatnya dihargai ditengah masyarakat dapat menciptakan tekanan tersendiri pada seseorang. Tekanan tersebut kemudian meningkatkan niat seseorang untuk melakukan praktik korupsi sebagai jalan cepat.
5. Dimensi budaya orientasi jangka panjang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat melakukan praktik korupsi seseorang. Temuan ini mengindikasikan bahwasannya tingginya budaya orientasi jangka panjang menunjukkan lemahnya niat melakukan praktik korupsi seseorang. Karena masyarakat dengan orientasi jangka panjang cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai moril dalam pekerjaannya seperti kejujuran, akuntabilitas dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta memiliki tujuan jangka panjang yang jelas. Sehingga, individu memiliki kemampuan untuk menilai dan menanggapi risiko secara proaktif. Serta, menghindari diri dari perilaku yang dapat merusak masa depannya.
6. Dimensi budaya pemuasan diri terbukti berpengaruh positif tidak signifikan terhadap niat melakukan praktik korupsi seseorang. Temuan ini mengindikasikan bahwasannya tingginya budaya pemuasan diri seseorang, tidak diiringi dengan niat melakukan praktik korupsi dalam dirinya. Karena meskipun masyarakat dengan

tingkat pemuasan diri yang tinggi cenderung berorientasi pada pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Hal ini tidak secara signifikan meningkatkan niat melakukan praktik korupsi. Disebabkan dengan kondisi pemuasan diri yang tinggi dinilai dapat menikmati kehidupan. yang tercermin melalui sikap optimis serta dominasi emosi positif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi psikologis tersebut berperan dalam membantu individu mengelola tekanan dan dorongan internal secara lebih adaptif, sehingga mampu menahan kecenderungan untuk memiliki niat melakukan tindakan yang tidak etis maupun perilaku yang berpotensi merugikan orang lain.

7. Kepribadian machiavellianisme terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan praktik korupsi seseorang. Temuan ini mengindikasikan bahwasannya seseorang dengan kepribadian machiavellianisme cenderung memiliki niat melakukan praktik korupsi yang tinggi. Karena sifat machiavellian memiliki komitmen ideologis yang rendah, ego yang tinggi, bersifat manipulatif, serta agresif. Selain itu, kepribadian machiavellian cenderung membenarkan (merasionalisasi) kebohongan demi keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan moral maupun etika. Ketika kepribadian ini telah tertanam dalam diri seseorang, maka ia mampu memanipulasi orang lain untuk mengikuti kehendaknya dalam melakukan tindakan tidak etis guna mencapai manfaat yang diharapkan.
8. Jenis organisasi terbukti berpengaruh secara signifikan dalam memoderasi niat melakukan praktik korupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwasannya individu yang bekerja di organisasi sektor publik maupun organisasi sektor non-publik (swasta) dapat memiliki niat melakukan praktik korupsi, dengan adanya nilai-nilai

budaya Hofstede dan kepribadian machiavellianisme yang dimiliki oleh seseorang. Niat melakukan praktik korupsi yang sering terjadi di lingkungan perusahaan publik dapat disebabkan karena adanya hubungan pertemanan atau kekerabatan yang membangun hubungan komitmen sosial, yang didasarkan pada doktrin budaya dalam mengatur dinamika sosial. Sehingga cenderung mendorong preferensi berupa keberpihakan kepada kelompok dalam (*ingroup love*). Sedangkan pada perusahaan non publik (swasta) niat melakukan praktik korupsi dapat disebabkan karena adanya kecenderungan untuk memiliki kekayaan dalam bentuk dan cara yang mengesampingkan hak-hak manusia lainnya, sehingga dapat memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu. Adapun pada perusahaan swasta sering terjadi praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi kepada oknum pemerintah agar tujuan perusahaan dapat dengan mudah.

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dan memiliki implikasi yang nyata secara praktis, terutama dalam mengkaji niat melakukan praktik korupsi seseorang karena adanya dorongan budaya dan kepribadian.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas penerapan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dalam konteks niat melakukan praktik korupsi dengan mengintegrasikan Dimensi Budaya Hofstede dan kepribadian Machiavellianisme sebagai determinan utama niat perilaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya tidak bersifat homogen dalam memengaruhi niat korupsi, pada beberapa dimensi budaya seperti dimensi penghindaran ketidakpastian, kolektivisme, dan maskulinitas terbukti berpengaruh signifikan,

sementara jarak kekuasaan dan pemuasan diri tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, orientasi jangka panjang justru berperan sebagai faktor protektif yang menurunkan niat melakukan praktik korupsi. Hasil ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa pengaruh budaya terhadap niat koruptif bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakter sosial masyarakat setempat.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dengan menunjukkan peran kepribadian Machiavellianisme sebagai faktor psikologis internal yang secara konsisten dan signifikan meningkatkan niat melakukan praktik korupsi. Sehingga kebaruan yang terletak pada integrasi aspek kepribadian dan budaya dalam satu model empiris memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembentukan niat koruptif, dibandingkan pendekatan yang hanya menitikberatkan pada faktor struktural atau kelembagaan semata.

Adapun implikasi praktis dalam penelitian ini terletak pada bagaimana perumusan kebijakan dan strategi pencegahan korupsi di Provinsi Maluku Utara dilakukan. Temuan bahwa budaya penghindaran ketidakpastian, kolektivisme, dan maskulinitas meningkatkan niat melakukan praktik korupsi mengindikasikan bahwa upaya antikorupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum formal. Pemerintah dan organisasi perlu memperkuat kepastian penegakan aturan, konsistensi sanksi, serta transparansi dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi kecemasan terhadap ketidakpastian yang mendorong perilaku menyimpang. Implikasi praktis lainnya berkaitan dengan kuatnya pengaruh budaya kolektivisme, yang menunjukkan bahwa tekanan sosial dan loyalitas kelompok dapat mendorong niat melakukan praktik korupsi. Oleh karena itu, program pencegahan korupsi perlu diarahkan pada perubahan norma sosial dan budaya

organisasi, seperti menumbuhkan budaya integritas kolektif, keberanian menyampaikan pelanggaran, serta perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (*whistle-blower*). Temuan mengenai budaya maskulinitas juga mengindikasikan perlunya pengendalian tekanan sosial terkait pencapaian status, karier, dan kesuksesan material. Organisasi perlu menggeser indikator keberhasilan tidak hanya pada capaian materi, tetapi juga pada integritas, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap etika.

Implikasi hasil penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis karakter dalam pencegahan korupsi. Mengingat kepribadian Machiavellianisme terbukti meningkatkan niat melakukan praktik korupsi, maka upaya pencegahan perlu mencakup penguatan pendidikan karakter, etika profesi, serta sistem rekrutmen dan pengawasan yang mampu meminimalisir ruang bagi perilaku manipulatif dan oportunistik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil temuan, sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional*, sehingga hanya mampu menangkap niat melakukan praktik korupsi pada satu waktu tertentu dan belum dapat menjelaskan perubahan niat perilaku secara dinamis.
2. Pengukuran variabel didasarkan pada data persepsi responden melalui kuesioner, yang berpotensi mengandung bias subjektivitas dan *social desirability* yaitu kecenderungan untuk memberikan jawaban yang dianggap “baik”, “wajar”, atau dapat diterima secara sosial, bukan jawaban yang benar-benar mencerminkan sikap, niat, atau perilaku mereka yang sebenarnya., terutama karena topik korupsi merupakan isu sensitif.

3. Ruang lingkup penelitian yang terbatas pada Provinsi Maluku Utara membatasi generalisasi hasil ke wilayah atau konteks budaya lain di Indonesia.

5.4 Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, maka berikut rekomendasi dari peneliti untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan desain longitudinal agar mampu menangkap perubahan niat dan perilaku koruptif secara dinamis dari waktu ke waktu.
2. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya mengandalkan data persepsi melalui kuesioner, tetapi juga dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif atau teknik pengukuran alternatif guna meminimalkan *social desirability bias*.
3. Penelitian mendatang juga disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan karakteristik responden, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas.
4. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan variabel lain seperti kepemimpinan etis, iklim etika organisasi, tekanan ekonomi, serta nilai moral personal. Sehingga dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat dan perilaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2024). *The Nations Occupational Fraud 2024 : A Report To the Nations*. ACFE.
- Aiman, R. (2024). Persistensi Korupsi Sektor Publik : Dari Motivasi Individu Sampai Normalisasi Dalam Budaya Organisasi. *Journal of Economic And Business*, 3(1), 23–38. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v3i1.156>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Psychological Bulletin*, 84(5), 179–211. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.84.5.888>
- Ajzen, I. (2012). The Theory of Planned Behavior. In *Handbook of theories of social psychology*. Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22>
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior : Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2, 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Alipour, A., & Yaprak, A. (2024). National culture and firms ' cash holdings : The role of indulgence and its boundaries. *Journal of Business Research*, 172(November 2023), 114414. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114414>
- Allport, G. W. (1937). *Personality: a psychological interpretation*. H. Holt.
- Amalia, N., & Handayani, R. S. (2019). Budaya Nasional dan Risiko Fraud. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 360–374. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.67>
- Ambari, M. (2023). Perairan Maluku Utara: Besar Potensinya, Namun Sedikit Perhatiannya. In *Mongabay*.
- Anandya, D., & Ramdhana, K. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi*. Indonesia Corruption Watch.
- Arifin, J. (2020). *Fraud, Mendeteksi dan Mengatasinya Pendekatan Akuntansi Forensik & Audit Investigatif* (Edisi Pert). Ekonisia.
- Aslam, N. (2021). Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 359–372. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818>
- Baatour, K., & Saada, M. Ben. (2021). Regulatory accounting environment , cultural values and board efficacy in developing countries. *PSU Research Review*, 8(2), 428–442. <https://doi.org/10.1108/PRR-07-2021-0036>
- Barros, A. do N. F., Rodrigues, R. N., & Panhoca, L. (2019). Information on the fight against corruption and corporate governance practices : evidence of organized hypocrisy. *International Journal of Disclosure and Governance*, 16(2), 145–160. <https://doi.org/10.1057/s41310-019-00060-2>
- Barros, A. do N. F., Santos, M. R. L. dos, Melo, I. de A., Santos, M. P. D. dos, & Silva, S. M. da. (2021). Are politically connected firms in Brazil worried about anti-

- corruption disclosure ? *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(2), 100–317. <https://doi.org/10.1108/jaee-05-2020-0118>
- Basri, Y. M., Yasni, H., Mariana, Nurmayanti, P., & Indrawati, N. (2023). The effect of Morality and Machiavellianism on Government Fraud : The Moderating Role of Education. *Problems and Perspectives in Management*, 21(3), 100–112. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(3\).2023.08](https://doi.org/10.21511/ppm.21(3).2023.08)
- Benedict, R. (1971). *Patterns of Culture* (Fifth Edit). Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Bicchieri, C., & Ganegoda, D. (2017). Determinants of Corruption : A Sociopsychological Analysis. In *Thinking about Bribery* (p. 179). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316450765.008>
- Boateng, A., Wang, Y., Ntim, C. G., & Elmagrhi, M. (2024). Institutions and corruption relationship : Evidence from African countries. *Journal of International Management*, 30(3), 101136. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2024.101136>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Analisis Isu Terkini Provinsi Maluku Utara* (Vol. 6).
- Carré, J. R., Jones, D. N., & Mueller, S. M. (2020). Personality and Individual Differences Perceiving opportunities for legal and illegal profit : Machiavellianism and the Dark Triad. *Personality and Individual Differences*, 162(April), 109942. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.109942>
- Cheah, J., Thurasamy, R., Memon, M. A., Chuah, F., & Ting, H. (2020). Multigroup Analysis using SmartPLS : Step-by-Step Guidelines for Business Research. *Asian Journal of Business Research*, 10(3), 1–19. <https://doi.org/10.14707/ajbr.200087>
- Chen, X., Eberly, M. B., Chiang, T.-J., Farh, J.-L., & Cheng, B.-S. (2011). Affective Trust in Chinese Leaders : Linking Paternalistic Leadership to Employee Performance. *Journal of Management*, 20(10), 1–24. <https://doi.org/10.1177/0149206311410604>
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (Second Edi). NJ: Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Çollaku, L., Ramushi, A. S., & Aliu, M. (2024). Fraud Intention And The Relationship With Selfishness: The Mediating Role of Moral Justification in The Accounting Profession. *International Journal of Ethics and Systems*, pp. <https://doi.org/10.1108/ijoes-10-2023-0220>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2011). *Business Research Methods* (Eleventh E). McGraw-Hill.
- Debski, J., Jetter, M., Mosle, S., & Stadelmann, D. (2018). Gender and corruption : The neglected role of culture. *European Journal of Political Economy*, 55(September 2016), 526–537. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.05.002>
- Dian, N. E. Z., & Rinaldi. (2020). Pengaruh Teori Perilaku Terencana Terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intra Kampus. *Riset Aktual Psikologi*, 11(2), 150–167. <https://doi.org/10.24036/rapun.v11i2.109966>

- Djaali, H. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara.
- Echavarria, M. F. (2025). The Four Causes of Personality : A Thomistic Approach to Personality Theory. *ScientiaetFides*, 13(1), 256–233. <https://doi.org/10.12775/setf.2025.012>
- Fan, J. P. H., Wei, K. C. J., & Xu, X. (2011). Corporate Finance and Governance in Emerging Markets : A Selective Review and An Agenda For Future Research. *Journal of Corporate Finance*, 17(2), 207–214. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.12.001>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh machiavellian dan love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486.
- Farooq, U., Ahmed, J., Ashfaq, K., Khan, G. ul H., & Khan, S. (2020). National Culture and Firm Financial Performance : A Mediating Role of Firm Financing Decision. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1858640>
- Fearon, J. D. (2003). Ethnic and Cultural Diversity by Country. *Journal of Economic Growth*, 8(2), 195–222. <http://www.jstor.org/stable/40215943> .
- Feist, J., & Feist, G. J. (2008). *Theories of Personality* (Seventh Ed). McGraw Hill.
- Gayg, E., & Lajunen, T. (2022). Cultural values , national personality characteristics , and intelligence as correlates of corruption : A nation level analysis. *Heliyon*, 8(December 2021). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09506>
- Geert, H., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and Organizations Software Of The Mind* (Third Edit). McGraw-Hill.
- Gerlack, P., & Eriksson, K. (2021). Measuring Cultural Dimensions : External Validity and Internal Consistency of Hofstede ' s VSM 2013. *Frontiers in Psychology*, 12, 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.662604>
- Goncalves, M. K., & Campbell, L. (2014). The Dark Triad and the derogation of mating competitors. *Personality and Individual Differences*, 67, 42–46. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.02.003>
- Guritno, D. C., Kurniawan, M. L. A., Mangkunegara, I., & Samudro, B. R. (2021). Is there any relation between Hofstede ' s cultural dimensions and corruption in developing countries ? *Journal of Financial Crime*, 28(1), 204–213. <https://doi.org/10.1108/jfc-06-2020-0115>
- Hannan, A., & Syarif, Z. (2023). Tinjauan sosiologi hukum terhadap pengaturan sanksi sosial bagi pelaku korupsi di indonesia kontemporer. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Hukum Islam*, 14, 177–201.
- Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research : updated guidelines. *Industrial Management & Data System*, 116(1), 2–20. <https://doi.org/10.1108/imds-09-2015-0382>

- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-based A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43, 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Hiariej, E. O. S. (2020). Korupsi di sektor swasta dan tanggung jawab pidana korporasi. *Journal of Criminal Law*, 49(4), 333–344.
- Hofstede, G. (1997). *Cultures and Organizations Software of the mind*. McGraw-Hill.
- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures : The Hofstede Model in Context. *Psychology and Culture*, 2(1), 1–26.
- Hofstede, G., & Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. *Organizational Dynamics*, 16(4), 5–21. [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(88\)90009-5](https://doi.org/10.1016/0090-2616(88)90009-5)
- Honingman, J. J. (1959). *The World of Man*. Harper & Row.
- Husted, B. W. (1999). Wealth , Culture , and Corruption Wealth , culture , and corruption. *Journal of International Business Studies*, 30(2), 339–359. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490073>
- Husted, B. W. (2018). Wealth, Culture and Corruption. *Journal of International Business Studies*, 30(2), 339. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490073>
- Ibrahim, A., Bau, S. O., & Safi, J. (2023). Mari Moi Ngone Futuru Sebagai Identitas Kultural : Makna Dan Imlementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat Maluku Utara. *Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakr*, 7(1).
- Ilmi, M., Muchtar, S., & Ilyas, A. (2022). Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 493–507.
- Im, H., & Chen, C. (2020). Cultural dimensions as correlates of favoritism and the mediating role of trust. *Cross Cultural & Strategic Management*, 27(3), 417–445. <https://doi.org/10.1108/ccsm-09-2019-0165>
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 6–7.
- Jr, J. F. H., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., Black, W. C., & Anderson, R. E. (2019). *MULTIVARIATE DATA ANALYSIS*. Cengage Learning EMEA.
- Kassem, R., & Higson, A. (2017). Combating fraud : Is Egypt Ready ? Insights from the literature Combating Fraud : Is Egypt Ready ? Insights from the Literature. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Science*, 6(5), 290.
- Kessing, R. M., & Strathern, A. J. (1998). *Cultural Anthropology A Contemporary Perspective* (Third Edit). Harcourt Brace College.
- Khamboonruang, A. (2025). Applying a polytomous Rasch model to investigate Likert

- scale functioning and L2 writing strategy use. *Research Methods in Applied Linguistics*, 4(3), 100240. <https://doi.org/10.1016/j.rmal.2025.100240>
- Koay, K. Y., Lim, W. M., Khoo, K. L., & Xavier, J. A. (2024). Consumers' motivation to purchase second-hand clothing : a multimethod investigation anchored on belief elicitation and theory of planned behavior. *Journal of Product & Brand Management*, 33(5), 502–515. <https://doi.org/10.1108/jpbm-05-2023-4512>
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi* (E. Kelima (ed.)). Aksara Baru.
- Koo, M., & Yang, S. (2025). Likert-Type Scale. *Encyclopedia*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia5010018>
- KPK. (2019). *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Edukasi Anti Korupsi.
- Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). *Culture: A Critical Review Of Concepts And Definitions*. The Museum.
- Kumar, P., Yadav, M., Ahlawat, P., Sharma, V., & Saini, M. (2025). Do financial socialization , financial behavior , and knowledge determine consumers' attitude and behavioral intention toward buy-now-pay-later (BNPL) usages ? *Journal of Financial Regulation and Compliance*. <https://doi.org/10.1108/JFRC-11-2024-0237>
- Kurniawan, A., & Anjarwati, A. (2020). Does Love of Money , Machiavellian , Religiosity , Socioeconomic Status , and Understanding of the Accountant's Code of Ethics Affect the Ethical Perception of Accounting Students ? *Advances in Economics, Business and Management Research*, 123(Icemer 2019), 33–37.
- Kwarteng, J. T., & Servoh, M. W. K. (2024). A reasoned action approach to understanding anti-corruption intentions among MBA (accounting) students in Ghana. *Heliyon*, 10(5), pp. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26752>
- Lamaau, N. (2024). Eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di Vonis 8 Tahun Penjara. In *detiksulsel*. detik.com. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7558943/eks-gubernur-maluku-utara-abdul-gani-kasuba-divonis-8-tahun-penjara?utm>
- Machiavelli, N. (1921). *The Prince*. Oxford University Press.
- Maharani, I. A. S., Suaryana, I. G. N. A., Budiasih, I. G. A. N., & Krisnadewi, K. A. (2024). Moderation of spiritual intelligence : Machiavellian personality , ethical organizational culture and whistleblowing system on fraud intention. *Tennessee Research International of Social Science*, 6(2), 164–176.
- Mahsun, M. (2023). *Akuntansi Forensik* (Pertama). Deepublish.
- Manara, M. U., Gils, S. van, Nubold, A., & R.H.Zijstra, F. (2020). Corruption , Fast or Slow ? Ethical Leadership Interacts With Machiavellianism to Influence Intuitive Thinking and Corruption. *Frontier in Psychology*, 11, 419–578. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.578419>
- Masliza, W., Mohammad, W., & Roseli, E. S. (2024). Bridging the green gap : Unveiling

- the complex interplay of national cultural dimensions , management effectiveness and corruption in driving green innovations. *Journal of Climate Finance*, 9, 100050.
- McLaughlin, B. (1970). Incidental Learning and Machiavellianism. *Journal of Social Psychology*, 82(1), 109–116. <https://doi.org/10.1080/00224545.1970.9919935>
- Meilytia, A., & Sudarti, E. (2023). Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Journal of Criminal Law*, 4(2), 266–276.
- Mihret, D. G. (2014). National Culture and Fraud Risk: Exploratory Evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12(2), 161–176. <https://doi.org/10.1108/jfra-10-2012-0049>
- Minkov, M., & Hofstede, G. (2011). The Evolution of Hofstede ’s Doctrine. *Cross Culture Management: An International Journal*, 18(1), 10–20. <https://doi.org/10.1108/13527601111104269>
- Montesdeoca, M. R., Medina, A. J. S., & Santana, F. B. (2019). Research Topics in Accounting Fraud in the 21st Century : A State of the Art. *Sustainability*, 11(6), 1–30. <https://doi.org/10.3390/su11061570>
- Mulyadi, G., Suranta, E., Fachruzzaman, F., & Midiastuty, P. (2023). The Influence of Law Enforcement , Pressure , Religious Beliefs , Rationality , Machiavellian Nature on Fraud Intention. *Atlantis Press*. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-328-3>
- Murphy, P. R. (2012). Attitude , Machiavellianism and the rationalization of misreporting. *Accounting, Organizations and Society*, 37(4), 242–259. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.04.002>
- Nainggolan, E. E. (2022). Prediksi perilaku korupsi dalam perspektif dimensi budaya model Hofstede Pendahuluan. *Journal of Psychological Research*, 1(4), 163–178.
- Nuralam, C. Y. (2024). Stevi Thomas Didakwa Suap Gubernur Nonaktif Malut untuk Kebutuhan Harita Group. In *Metro TV*.
- Pacherie, E., & Haggard, P. (2010). *What Are Intentions ?* University College London. <https://doi.org/10.1093/acprof>
- Parawansa, K. I., & Winarto, W. W. A. (2024). The Role of Islamic Work Ethics in Moderating Influence Love of Money and Machiavellian Nature to Fraud Accounting in Management of Village Funds. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i1.319>
- Pardede, R. (2023). Korupsi Hantui ”Bumi Kie Raha” Maluku Utara. In *Kompas.id*. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/20/korupsi-hantui-cita-cita-otonomi-daerah?status=sukses_login&login=1736856392902&open_from=header_button&loc=header_button
- Park, H. (2015). Determinants of Corruption : A Cross-National Analysis. *Multinational Business Review*, 11(2), 29–48. <https://doi.org/10.1108/1525383X200300010>

- Parsons, T. (1972). Culture and Social System. *American Sociological Review*, 53(2), 253–266.
- Perkasa, G. S. (2025). Maluku Utara: Pemekaran, Kekayaan Gubernur, dan Perkembangan Wilayah. In *Indonewstoday*.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Edisi 7). Rajawali Press.
- Putra, I. P. M., & Sihombing, R. P. (2024). The potential of corruption based on Hofstede cultural dimensions and institutional quality : an international evidence. *Journal Financial Crime*, 31(4), 823–836. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2023-0039>
- Riauroikha, H. S., Juniati, R., Simanjuntak, V. A., Sitohang, J., & Efridadewi, A. (2023). Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Sektor Swasta dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Studi Perbandingan Malaysia). *Unes Law Review*, 6(1), 2790–2798.
- Robertson, C. J., & Hoffman, J. J. (2000). How Different Are We ? An Investigation Of Confucian Values In The United States. *Journal of Managerial*, 12(1), 34–47.
- Rohlfer, S., & Zhang, Y. (2016). Culture studies in international business : paradigmatic shifts. *European Business Review*, 28(1), 39–62. <https://doi.org/10.1108/EBR-07-2015-0070>
- Rojas-Saffie, J. P., García-Matte, N., & Silva-Beyer, V. (2024). Allport, Aristotle and Aquinas : An interdisciplinary definition of personality. *New Ideas in Pshychology*, 75, 101096. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2024.101096>
- Said, J., Alam, M. M., Karim, Z. A., & Johari, R. J. (2018). Integrating religiosity into fraud triangle theory : findings on Malaysian police officers. *Journal of Criminological Research Policy and Practice*, 4(2), 111–123. <https://doi.org/10.1108/jcrpp-09-2017-0027>
- Salihu, A. S. (2025). Re-examining the fraud hexagon through corruption deterrence by regulatory undertakings and corporate disclosures in Nigerian financial institutions. *Journal of Financial Crime*, 32(5), 1014–1029. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2024-0262>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS SEM)* (A. V. Christian Homburg, Martin Klarmann (ed.)). Handbook of Market Research. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8>
- Sartor, M. A., & Beamish, P. W. (2019). Private Sector Corruption , Public Sector Corruption and the Organizational Structure of Foreign Subsidiaries. *Journal of Business Ethics*, 167, 725–744. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04148-1>
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). *Research Methods For Business Studies* (Seventh Ed). Pearson Education Limited.
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods For Business Students* (Eight Edit). Pearson.

- Sawal, R. (2023). Gubernur Malut Terjerat Kasus Korupsi, Bos Tambang Nikel Pulau Obi Ikut Terseret. In *Mongabay*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business A Skill Building Approach* (Seventh Ed). Wiley.
- Setyaki, R. S., & Andreas, H. H. (2022). Does Personality Impact Academic Fraud ? *Review of Integrative Business and Economic Research*, 11(3), 81–98.
- Setyaningrum, P. (2022). Tradisi Sasi, Kearifan Lokal untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Maluku Utara. In *Kompas.id*.
- Shiddiq. (2023). Indonesia untuk Pertama Kali Produksi Bahan Baterai Kendaraan Listrik, NCKL. In *Media Nikel Indonesia*.
- Shields, S. A., & Kappas, A. (2006). Magda B . Arnold ' s Contributions to Emotions Research. *Cognition and Emotion*, 20(7), 898–901. <https://doi.org/10.1080/02699930600615736>
- Shmueli, G., Ray, S., Estrada, J. M. V., & Chatla, S. B. (2016). The elephant in the room : Predictive performance of PLS models. *Journal of Business Research*, 69(10), 4552–4564. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.049>
- Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J.-H., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM : guidelines for using PLSpredict. *European Journal of Marketing*, 53(11), 2322–2347. <https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189>
- Silverstone, H., & Sheetz, M. (2007). *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Expert* (Second Edi). John Wiley & Sons.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (Fourth Edi). John Wiley & Sons.
- Suryandari, E., & Valentin, L. (2021). Determinan Fraud Dana Desa : Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 55–78. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Tampubolon, P., Mompang, L. P., & Tampubolon, M. (2024). Kajian Kriminologi Korupsi di Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 4(2), 211–234.
- Taras, V., Steel, P., & Stackhouse, M. (2023). A comparative evaluation of seven instruments for measuring values comprising Hofstede ' s model of culture. *Journal of World Business*, 58(1), 101386. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2022.101386>
- Tirtasari, I. D. A., & Hartomo, O. D. (2020). Pengaruh GCG Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 17(2), 131–149. <https://doi.org/10.24167/jab.v17i2.2337>
- Triantoro, H. D., Utami, I., & Joseph, C. (2020). Whistleblowing system , Machiavellian personality , fraud intention An experimental study. *Journal of Financial Crime*,

- 27(1), 202–216. <https://doi.org/10.1108/jfc-01-2019-0003>
- Urban, B., & Ratsimanetrimanana, F. A. (2015). Culture and entrepreneurial intentions of Madagascan ethnic groups. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 7(2), 86–114. <https://doi.org/10.1108/jeee-01-2015-0008>
- Utami, I., Wijono, S., Noviyanti, S., & Mohamed, N. (2019). Fraud diamond , Machiavellianism and fraud intention. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 531–544. <https://doi.org/10.1108/ijoes-02-2019-0042>
- Waas, E. (2025). Maluku Utara, Provinsi Terkorup di Indonesia Versi KPK. In *Titastory*.
- Walizer, M. H., & Wienir, P. L. (1978). *Research Method and Analysis: Searching for Relationship*. Harper & Row.
- Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan (Studi Kasus Korupsi Wisma Atlet). *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 1–23.
- Wijayanti, D. M., Senjani, Y. P., & Farah, W. (2023). The role of Machiavellian Personality, Altruistic Personality, Religiosity, Whistleblowing System , and Accounting Firm Size in Mitigating Fraud Intention. *Journal Financial Crime*, 31(1), 119–134. <https://doi.org/10.1108/jfc-02-2023-0034>
- Wirawan, N. A. (2024). Benteng Tolukko, Jejak Eksplorasi Rempah Portugis di Maluku Utara. In *Good News From Indonesia*.
- Wormley, A. S., Scott, M., Grimm, K., Li, N. P., Choy, B. K. C., & Cohen, A. B. (2021). Loosening the definition of culture: An investigation of gender and cultural tightness . *Ecology and Social Psychology*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.cresp.2021.100021>
- Wu, W.-Y., & Hwang, C.-H. (2013). Motives and Likelihood of Bribery: An Experimental Study of Managers in Taiwan. *Ethics and Behavior*, 23(4), 278–298. <https://doi.org/10.1080/10508422.2012.755126>
- Yeganeh, H. (2014). A Current Application of Hofstede's, Schwartz's and Inlehart's Frameworks. *International Journal of Development Issues*, 13(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/ijdi-04-2013-0038>
- Yoo, B., Donthu, N., & Lenartowicz, T. (2011). Measuring Hofstede ' s Five Dimensions of Cultural Values at the Individual Level: Development and Validation of CVSCALE. *Journal of International Consumer Marketing*, 193–210. <https://doi.org/10.1080/08961530.2011.578059>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

**ANALISIS PENGARUH DIMENSI BUDAYA HOFSTEDE DAN KEPERIBADIAN
MACHIAVELLIANISME
TERHADAP NIAT MELAKUKAN PRAKTIK KORUPSI
DI PROVINSI MALUKU UTARA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2025

Assalamualaikum Wr. Wb.

Perkenalkan, saya Fajra Fajria Rusdin, mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian Tugas Akhir yang berjudul **“Pengaruh Dimensi Budaya Hofstede dan Kepribadian Machiavellianisme Terhadap Niat Melakukan Praktik Korupsi di Provinsi Maluku Utara”**.

Responden penelitian ini adalah mereka yang berusia minimal 17 tahun dan telah bekerja baik di perusahaan publik maupun non-publik (swasta) serta berdomisili di Provinsi Maluku Utara. Kuesioner penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) bagian. bagian pertama berisikan mengenai informasi identitas diri dan informasi penunjang, sedangkan delapan bagian terakhir berisikan faktor-faktor yang mempengaruhi niat melakukan praktik korupsi di Provinsi Maluku Utara.

Sehubungan dengan perihal tersebut, saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk berpartisipasi dalam penelitian ini serta mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya dan apa adanya demi membantu kesuksesan penelitian ini. **Seluruh data responden hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya.** Terima kasih atas waktu dan kesedian Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Jika ada pertanyaan mengenai penelitian ini, Anda bisa menghubungi peneliti melalui email 23919033@students.uui.ac.id atau melalui *contact person* 082199430099.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Salam homat,

Fajra Fajria Rusdin

Dosen Pembimbing

Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com., Ph.D.

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

1. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/I membaca dengan teliti setiap pertanyaan yang diajukan sehingga dapat dimengerti.
2. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/I menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan sebenar-benarnya.
3. Perlu dijadikan catatan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak bermaksud untuk menyudutkan atau memojokkan siapapun dan pihak manapun.
4. Jika ada hal yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan kepada peneliti melalui email 23919033@students.uui.ac.id atau melalui *contact person* 082199430099.

Alamat e-mail/No. Handphone Bapak/Ibu/Saudara/i:

Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i telah bekerja dan berada pada rentang usia 17-60 tahun?

- ☐ Ya (Mohon untuk melanjutkan)
☐ Tidak (Terima kasih, silahkan berhenti sampai di sini)

Apakah saat ini Bapak/Ibu/Saudara/I berdomisili di Provinsi Maluku Utara?

- ☐ Ya (Mohon untuk melanjutkan)
☐ Tidak (Terima kasih, silahkan berhenti sampai di sini)

Bagian 1

Identitas Diri dan Informasi Penunjang

1. Nama/Inisial (opsional):
2. Jenis Kelamin: ☐ Perempuan ☐ Laki-Laki
3. Tahun Kelahiran

☐ 1961-1980
☐ 1981-1995
☐ 1995-2009
4. Usia:

☐ 17-20 ☐ 26-30 ☐ 36-40 ☐ 50 tahun ke atas
☐ 21-25 ☐ 31-35 ☐ 41-45
5. Pendidikan Terakhir:

☐ SD/Sederajat ☐ S1
☐ SMP/Sederajat ☐ S2
☐ SMA/Sederajat ☐ S3
☐ D3
6. Pekerjaan (opsional):
7. Perusahaan/Instansi tempat bekerja:

☐ Perusahaan/instansi Publik
☐ Perusahaan/instansi Non-Publik (swasta)

8. Domisili saat ini:

- | | |
|--|---|
| ☐ Kabupaten Halmahera Barat | ☐ Kabupaten Kepulauan Sula |
| ☐ Kabupaten Halmahera Selatan | ☐ Kabupaten Pulau Morotai |
| ☐ Kabupaten Halmahera Tengah | ☐ Kabupaten Pulau Taliabu |
| ☐ Kabupaten Halmahera Timur | ☐ Kota Ternate |
| ☐ Kabupaten Halmahera Utara | ☐ Kota Tidore Kepulauan |

Silahkan jawab pernyataan-pernyataan di bawah dengan memberi tanda ceklis (✓) pada tempat yang tersedia (□) untuk jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan silahkan menggunakan skala sebagai berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana Anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini, silahkan menggunakan skala di atas.

Bagian 2*		Kode: DBH1				
		1	2	3	4	5
1	Pimpinan sebaiknya membuat keputusan sendiri tanpa perlu banyak bertanya pada karyawan.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Pimpinan sebaiknya tidak terlalu sering meminta pendapat karyawan.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Pimpinan sebaiknya menjaga jarak dalam bergaul dengan karyawan.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Pimpinan sebaiknya tidak memberikan tugas pengambilan keputusan kepada karyawan.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Pimpinan dapat memaksakan keputusannya untuk diikuti oleh karyawan.	☐	☐	☐	☐	☐

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana Anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini, silahkan menggunakan skala di atas.

Bagian 3*		Kode: DBH2				
		1	2	3	4	5
1	Ketidakpastian dalam proses hukum membuat orang memilih jalan cepat dengan memberi suap atau hadiah.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Aturan yang tidak pasti (tidak jelas) membuat orang merasa tidak terlalu bersalah saat melanggar aturan.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Ketidakpastian dalam penegakan aturan membuat orang sulit menolak ajakan melanggar aturan dari atasan.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Orang tetap mengikuti aturan meski tahu ada hal yang tidak transparan di dalamnya.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Sebagian orang cenderung mengikuti atasan/pimpinan yang melanggar aturan karena ketidakpastiaan dalam penegakkan aturan.	☐	☐	☐	☐	☐
Bagian 4		Kode: DBH3				
		1	2	3	4	5
1	Kepentingan bersama harus diutamakan daripada kepentingan pribadi.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Kesejahteraan pribadi juga penting, namun setelah mempertimbangkan kesejahteraan kelompok.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Keberhasilan kelompok lebih penting daripada keberhasilan individu.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Seseorang harus tetap bersama kelompoknya meski ada kesulitan.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Tujuan pribadi sebaiknya dicapai, setelah mempertimbangkan pencapaian tujuan kelompok.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Loyalitas kepada kelompok penting meski tujuan pribadi terabaikan.	☐	☐	☐	☐	☐

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana Anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini, silahkan menggunakan skala di atas.

Bagian 5		Kode: DBH4		1	2	3	4	5
1	Laki-laki sering dipandang lebih membutuhkan karir profesional daripada perempuan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Laki-laki dianggap lebih logis sedangkan perempuan dianggap intuitif (menggunakan perasaan) saat menyelesaikan masalah.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Laki-laki dianggap lebih memiliki sikap tegas yang dapat menyelesaikan masalah sulit.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Beberapa pekerjaan dianggap lebih baik dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bagian 6		Kode: DBH5		1	2	3	4	5
1	Saya melakukan pengelolaan uang dengan cermat dan digunakan secara bijaksana.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Saya tetap berusaha menyelesaikan masalah meskipun menghadapi tantangan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Saya tetap tenang dan berusaha meskipun menghadapi rintangan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Saya memiliki kebiasaan membuat rencana jangka panjang.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Saya dapat mengorbankan kesenangan hari ini demi kesuksesan di masa depan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Saya bekerja keras demi kesuksesan di masa depan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana Anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini, silahkan menggunakan skala di atas.

Bagian 7 Kode: DBH6		1	2	3	4	5
1	Saya merasa kehidupan saat ini terasa membahagiakan secara keseluruhan.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Saya merasa memiliki kebebasan dan kendali penuh dalam menjalani kehidupan.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Saya memiliki kebebasan melakukan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Saya sering meluangkan waktu untuk bersenang-senang.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Orang lain tidak bisa menghalangi saya untuk melakukan apa yang saya inginkan.	☐	☐	☐	☐	☐
Bagian 8 Kode: MACH		1	2	3	4	5
1	Orang umumnya tidak mau bekerja keras kecuali jika terpaksa.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Orang cenderung percaya jika diberi ucapan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Orang cenderung menyembunyikan kesalahan kerja untuk menjaga kepercayaan pimpinan.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Orang cenderung kesulitan untuk maju dan berkembang tanpa melakukan jalan pintas.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Kepercayaan penuh pada orang lain berisiko menimbulkan kesulitan.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Semua orang memiliki sisi jahat dan itu akan terlihat ketika mereka memiliki kesempatan.	☐	☐	☐	☐	☐

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Tidak Setuju Netral Setuju Sangat Setuju

Setuju

Sejauh mana Anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini, silahkan menggunakan skala di atas.

Bagian 9		Kode: NPK				
		1	2	3	4	5
1	Seseorang dapat memiliki keinginan untuk mengubah laporan keuangan.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Seseorang dapat memiliki kecenderungan memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Seseorang dapat memiliki kesempatan untuk menggunakan/meminjam uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Seseorang dapat memiliki keinginan menambahkan jam kerja lebih dari yang sebenarnya untuk klaim lembur.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Seseorang dapat memiliki keinginan menggunakan aset perusahaan untuk keperluan pribadi.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Seseorang dapat memiliki keinginan untuk mengambil beberapa aset kantor tanpa izin pimpinan.	☐	☐	☐	☐	☐

**menggunakan skala terbalik*

-- -- Terima Kasih -- --

Lampiran 2: Tabulasi Data Penelitian

No	Jenis Organisasi	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	X7.5	X7.6	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
1	1	4	4	3	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	2	2	4	2	2	1	1	2	2	2	4	4	4	5	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	
2	2	1	4	3	2	4	2	4	3	4	3	3	3	4	4	4	2	2	4	4	4	3	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	2	1	1	1	2	3	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	2	4	2	2	2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	2	2	3	3	4	2	2	2	1	2	2	1	
4	2	4	2	3	2	4	4	3	4	4	2	1	2	2	2	1	5	4	4	3	4	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	4	2	
5	2	2	2	2	2	2	4	2	2	4	2	1	1	1	1	2	4	2	4	4	3	3	4	3	3	4	4	5	4	4	4	5	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	
6	1	2	2	5	4	2	5	5	4	5	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	
7	2	2	2	3	2	2	5	5	5	5	5	2	2	1	1	2	1	2	3	2	1	3	5	5	3	5	5	5	3	5	5	3	3	3	2	5	2	4	1	1	1	3	2	1	
8	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	2	2	4	4	3	3	
9	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	3	2	2	5	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	4	4	2	4	4	4	
10	2	1	2	3	2	2	4	2	5	2	4	4	2	2	4	3	2	2	4	3	1	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	2	3	2	2	1	1	3	1	2	2	2	2	
11	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	2	
12	1	2	2	2	2	1	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	2	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	4	3	4	3	2	4	4	2	
13	2	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	1	4	1	1	2	2	3	1	1	2	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
14	2	2	2	1	3	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
15	1	2	4	4	4	2	3	3	2	2	3	1	1	3	2	1	1	3	2	3	2	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	
16	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	2	2	2	3	2	2	
17	2	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	4	1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
18	1	1	2	2	1	1	5	4	4	3	3	4	4	3	2	3	2	3	2	1	2	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	2	4	4	3	2	1	4	2	1	
19	1	4	2	3	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2		
20	2	2	2	1	2	2	4	1	4	4	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1	1	2	2	3	2	2	3	2	1
21	2	3	3	3	3	3	2	4	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	2	2	3	5	2	2	5	4	4	4	2	5	5	5	5	4	5	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	2	2	2	2	3	1	4	3	4	3	4	4
23	2	3	1	3	1	4	2	2	2	2	1	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	1	4	3	5	3	3	4	4	4	2	4	2	2	2	3	3	4	3	3	2	3	3	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	3	3	4	4	1	4	4	3	4	4	4	
25	2	2	1	1	1	2	4	5	5	4	2	2	1	1	1	2	3	1	2	3	2	3	3	3	4	4	3	5	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
26	2	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	5	4	3	2	2	4	1	2	2	2	4	5	5	4	5	5	4	3	4	3	3	2	3	3	4	4	4	3	2	4	4	4	2	
27	2	2	2	2	2	2	3	4</																																					

No	Jenis Organisasi	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	X7.5	X7.6	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6			
43	2	2	4	1	4	2	4	5	5	4	3	2	2	2	2	2	5	4	2	2	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4		
44	2	5	5	5	3	5	5	2	4	5	5	3	3	3	4	3	3	4	3	5	5	3	4	4	5	5	3	5	4	5	5	4	4	4	5	2	4	4	3	4	4	5	1	3	1		
45	1	5	4	4	5	2	5	1	1	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	2	1	1	2	2	1	4	4	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	2	2	1	1		
46	1	4	4	4	2	4	3	2	2	4	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	
47	1	2	4	5	5	5	5	5	2	5	5	1	2	1	2	2	4	2	2	4	4	2	2	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	4	4	4	4	1	2	2	1	1	
48	2	4	4	4	2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	5	2	1	2	3	2	2	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	5	2	4	1	1	2	1			
49	1	4	4	4	4	4	1	1	2	2	4	4	4	3	5	2	2	2	2	2	2	4	4	4	3	4	2	4	4	4	2	5	2	2	2	2	5	5	2	2	2	2	2	2	2		
50	1	4	4	4	2	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		
51	2	4	4	3	3	5	5	2	2	4	4	5	5	5	4	3	2	1	5	4	3	4	5	4	4	5	1	4	5	4	4	5	2	3	2	2	2	2	4	4	3	2	2	2	1		
52	1	5	4	5	2	5	4	4	4	4	5	1	1	2	2	2	5	1	2	2	2	5	4	4	4	4	2	5	5	5	4	4	3	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4		
53	2	5	5	5	3	3	2	2	3	1	3	3	3	1	2	3	5	2	3	3	3	3	4	3	3	5	1	5	4	4	4	4	5	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	2	1	
54	1	3	3	4	2	3	2	2	2	1	3	1	2	3	2	3	2	2	5	4	2	5	5	5	5	5	1	4	5	5	5	5	5	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
55	2	4	3	3	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	
56	2	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	2	5	4	4	3	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	4	2			
57	1	4	4	5	2	4	4	3	2	4	4	1	1	2	2	2	4	4	2	2	5	5	5	4	4	5	1	4	4	4	4	5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
58	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	2	2	2	3	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
59	1	5	5	4	2	5	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	2	4	2	4	4	4	5	5	5	
60	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
61	2	5	5	5	5	5	3	2	2	3	3	1	1	1	1	1	5	5	4	3	3	5	5	5	1	3	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	2	3	1	1	1	2	1	1	1		
62	2	3	5	5	4	5	5	5	5	1	5	1	1	1	1	1	5	1	3	3	3	4	4	4	2	3	3	3	5	5	5	5	5	1	3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	
63	2	5	5	5	5	5	3	4	3	4	3	1	1	2	1	2	4	2	3	2	3	4	5	5	2	5	5	5	5	5	5	4	5	3	2	3	3	3	3	3	3	2	1	2	1	1	
64	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	1	3	3	3	4	5	2	4	5	3	3	4	3	5	3	3	2	3	3	4	3	2	1	2	2	2	1		
65	2	2	4	4	3	3	4	4	2	4	2	3	3	4	5	4	4	1	2	2	1	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	1	2	2	2	2	2	
66	2	5	5	5	5	3	3	2	5	2	3	3	3	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5	5	3	5	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
67	2	4	4	3	4	4	4	2	4	2	4	3	4	4	4	4	4	2	4	3	4	5	5	5	1	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	2	2	2	4	4	5	5	4	4		
68	1	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	2	3	2	3	4	4	4	1	5	4	3	3	3	3	4	2	5	4	4	4	5	1	1	1	1	1	1	1		
69	1	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	2	2	2	2	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
70	2	4	4	4	4	3	2	1	2	4	2	3	3	2	1	3	4	2	4	2	4	5	5	5	1	5	5	4	4	4	4	4	4	2	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	
71	1	5	4	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	4	2	4	5	4	1	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	4	
72	1	2	4	4	5	4	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	4	2	3	4	2	5	4	4	2	5	5	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	4	2		
73	1	3	4	3	3	2	3	3	3	2	4	1	2	2	2	2	3	4	3	4	4	4	5	5	1	4	4	4	4	4	3	2	3	3	2	3	2	4	3	3	3	4	3	3	4	3	2
74	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	1	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	2	2	2	2	2	2		
75	2	4	5	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	1	1	1	4	5	4	5	5	5	3	4	4	3	4	2	4	2	2	5	5	2	1	1	1	1	1	1	1	
76	1	4	3	4	3	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4		
77	1	4	4	4	2	3	4	2	2	2	4	1	2	2	2	2	4	3	3	3	3	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	3	3	4	3	3	2	1	3	1	1		
78	1	4	4	4	4	5	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	4	2	3	4	2	4	2	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	
79	1	5	5	4	5	3	3	2	2	3	3	1	1	3	1	1	3	3	4	4	5	4	1	4	4	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
80	1	4	4	4	3	4	3	2	3	3	3	1	2	3	2	3	4	3	3	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	2	3	2	2	2		
81	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
82	2	5	4	4	5	4	1	4	4	4	5	1	1	2	2	1	5	1	2	5	4	4	1	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	2	3	1	2	5	5	1	1	1	4	1	1	1	
83	1	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	1	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
84	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	3	1	1	1	1	5	1	5	1	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	
85	2	5	5	5	5	5																																									

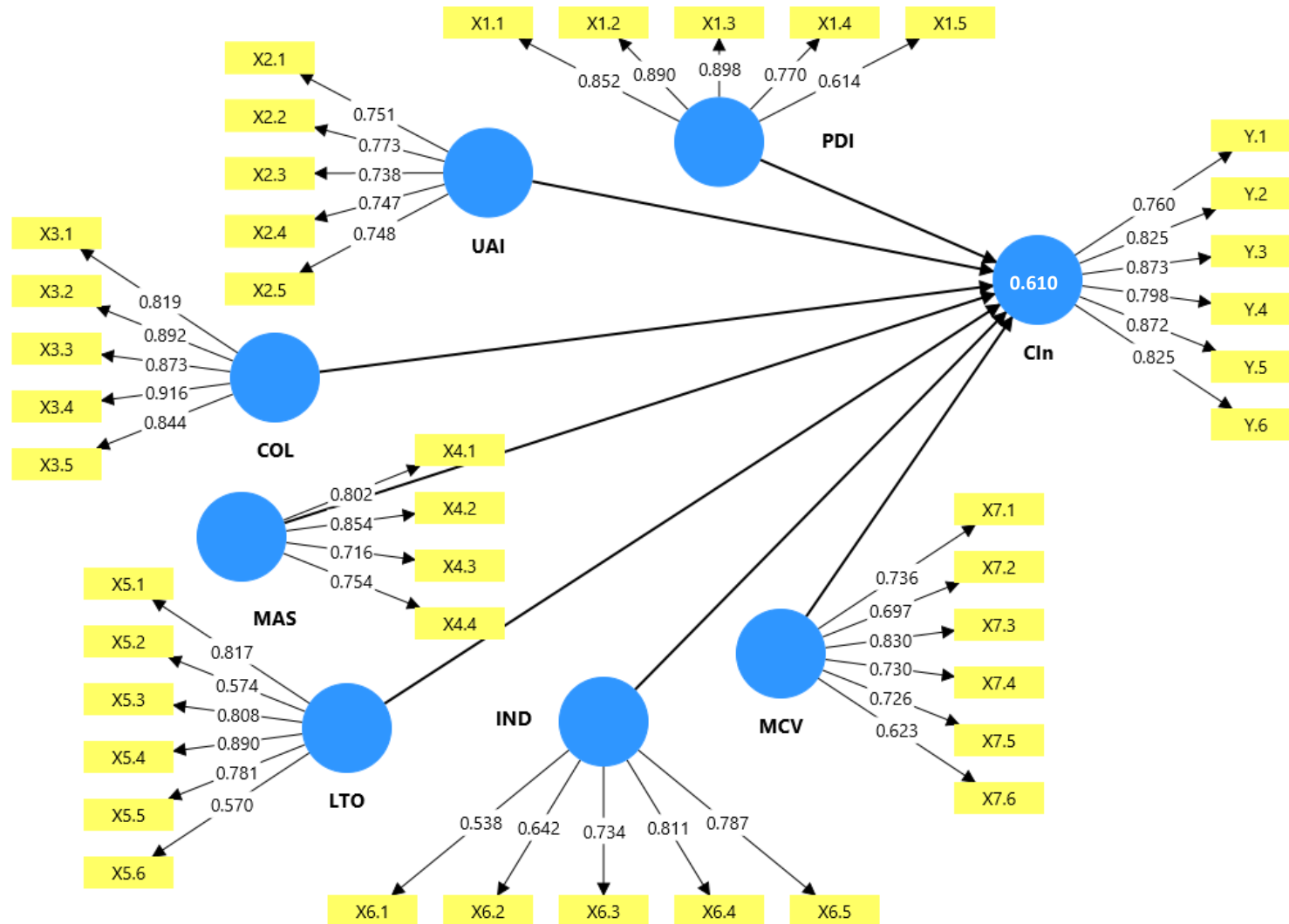
No	Jenis Organisasi	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	X7.5	X7.6	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6				
87	2	5	3	5	3	3	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	5	1	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
88	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5			
89	1	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	3	1	1	1	1	5	1	1	4	4	5	1	5	4	5	3	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
90	2	5	5	5	5	1	5	1	5	1	1	3	1	1	1	1	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	1	5	1	1	1	1	5	5	5	5	5		
91	1	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
92	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	1	1	1	1	5	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
93	2	4	5	5	5	5	5	2	5	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5		
94	2	3	3	3	5	2	2	2	2	4	2	2	2	1	1	1	2	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	4	4	3	5	4	4	4	2	4	4	2	2	3	4	4	4	2	2		
95	2	5	4	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	5	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	1	3	3	3	3	3		
96	1	5	5	4	2	4	5	3	2	4	4	1	1	1	1	5	1	2	1	2	2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	
97	2	4	4	4	3	3	5	3	3	3	5	1	1	1	2	4	1	2	3	3	3	4	5	5	4	5	5	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	1	
98	1	5	3	3	4	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	4	1	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3		
99	2	5	4	4	3	3	5	4	3	4	4	2	2	3	1	3	2	2	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	3	4	4	3	3	4	2	3	3	2	1	2	3	3	3	3	3	1		
100	2	4	2	2	2	4	2	2	3	4	2	1	1	2	1	1	2	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	3	2	3	5	5	4	3	3	3	5	5	3	4	4	1	1	1	1		
101	1	3	4	3	3	3	5	3	2	4	3	1	2	3	3	2	2	2	3	2	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	3	4	2	3	5	3	3	2	2	2	3	3	3		
102	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1		
103	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
104	2	5	5	5	2	3	5	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	5	4	3	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5	
105	1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		
106	1	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	1	3	1	1	1	2	3	3	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	1	4	1	2
107	1	4	4	5	4	4	2	2	2	2	4	1	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
108	2	5	5	5	4	5	3	2	3	3	3	2	1	2	2	2	4	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
109	1	4	3	2	2	2	1	3	1	3	1	1	2	1	1	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	2	2	2	3	2	2	2	2	
110	1	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	1	1	1	1	2	4	1	2	2	2	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	1	2	2	5	2	5	1	1	1	2	1	1	1	1		
111	2	5	4	5	2	4	5	2	2	2	4	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	
112	2	4	2	4	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	4	5	4	5	3	4	4	4	5	5	5	3	4	4	4	3	2	4	5	3	5	4	3	4	2	4	3	4	3	2		
113	2	5	4	5	4	4	5	4	3	3	5	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
114	1	5	4	5	4	4	4	4	4	2	4	1	1	1	1	1	4	3	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	2	2	4	4	2	2	1	2	2	2	1	2	1	
115	2	3	5	3	4	4	5	3	1	4	4	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	1	2	2	2	1	2	
116	2	4	4	5	5	5	2	1	4	1	1	1	3	1	1	1	5	1	3	2	5	4	5	5	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
117	2	4	4	5	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	5	2	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	4	2	4	2	4	5	4	5	4	4	4		
118	1	5	5	3	3	3	4	4	4	4	4	2	2	2	3	3	4	3	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	2	3	3	2	2	2	2	
119	1	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	4	3	3	2	1	5	5	4	4	3	4	3	2	3	5	3	4	1	4	1	4	3	4	5	2	5	2	5	2	4	4	
120	2	5	5	3	5	5	5	5	4	4	4	1	1	1	1	1	5	1	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	2	2	5	1	2	1	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	
121	1	5	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	1	2	3	2	2	3	3	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	2	5	3	3	4	4	3	1	1	2	2	2	2	2	
122	2	4	4	4	4	5	4	2	2	4	2	1	2	2	1	2	5	5	5	5	5	3	3	5	5	1	1	4	5	5	5	5	5	4	5	2	4	4	2	4	2	4	2	4	2	1	2	
123	2	4	4	4	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	1	2	3	2	2	2	3	2	2	4	4	2	2	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
124	1	5	5	5	3	5	1	1	1	3	4	1	1	1	1	2	4	2	5	5	4	2	1	5	5	1	5	3	4	4	2	2	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
125	2	5	5	5	4	5	5	3	4	4	4	1	1	1	1	1	5	3	5	5	4	1	1	4	1	1	5	4	4	4	4	3	2	4	2	4	2	2	5	3	4	2	2	2	2	2	2	
126	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	4	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	4	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	
127	1	3	3	4	3	4	4	2	2	3	3	2	3	3	2	3	4	2	4	3	3	3	2	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1	2	2	2	1	2	
128	2	2	3</																																													

No	Jenis Organisasi	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	X7.5	X7.6	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
131	2	3	4	4	3	4	2	2	2	3	2	1	2	2	3	2	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	3	5	3	3	2	4	4	5	3	5	5	4	4	2	1	1	1	
132	1	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	1	2	1	2	2	4	2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	2	2	4	4	2	2	1	2	2	1	
133	2	4	5	5	5	5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	2	3	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
134	1	3	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	4	4	4	4	3	1	2	1	1	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
135	2	4	3	4	4	4	1	2	2	1	5	1	2	3	1	2	3	5	5	5	3	3	3	2	1	1	5	3	4	4	4	3	2	2	2	2	2	4	5	2	4	2	3	4	2
136	2	3	3	4	3	5	2	2	3	2	4	2	2	3	3	2	4	3	5	4	3	1	1	2	3	1	5	3	4	4	3	5	3	4	2	3	4	3	2	4	4	4	4	3	
137	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	1	2	1	2	3	4	4	3	4	3	1	2	2	3	2	1	2	3	5	3	5	4	5	4	3	4	2	3	4	2	4	4	5	
138	2	1	4	4	4	4	5	2	4	3	1	3	2	2	1	1	5	1	1	5	1	1	1	1	1	1	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	1	2	1	5	
139	2	5	5	5	4	5	5	1	1	3	2	1	2	1	1	1	4	3	4	4	3	1	1	1	1	1	1	4	4	4	2	3	4	4	5	3	4	5	3	3	3	4	4	3	
140	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
141	2	5	3	3	3	3	2	2	2	4	2	2	3	2	2	2	4	4	3	4	4	2	1	2	2	1	1	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	3	3	
142	2	2	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
143	1	5	4	5	5	5	5	4	5	4	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	1	2	2	2	2	2	3	
144	2	2	2	4	4	4	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	5	4	4	3	4	2	4	2	3	4	3	1	1	1	1	1	2	
145	1	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	1	1	1	2	2	4	1	1	2	2	1	1	2	1	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	2	2	2	1
146	1	3	2	4	4	4	4	2	2	2	4	1	2	2	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
147	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
148	2	5	5	4	5	5	4	2	5	5	5	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
149	2	4	3	5	5	5	5	2	3	2	2	1	1	2	1	2	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	3	3	4	5	4	4	
150	1	3	3	3	3	3	2	2	3	5	5	1	1	1	2	3	3	1	2	3	2	4	4	5	5	5	5	4	4	4	3	3	2	2	2	2	3	3	1	3	4	3	2	2	
151	2	4	3	3	4	4	5	2	4	4	2	2	2	2	1	2	4	2	4	4	4	2	2	2	2	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	2	2	4	2	2
152	2	4	3	4	4	5	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	4	3	4	4	3	2	2	2	2	2	3	3	4	4	3	4	2	4	4	2	4	4	3	2	2	2	2	2	
153	2	2	4	5	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	2	2	2	2	2	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
154	2	3	5	3	4	5	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	4	3	4	1	1	2	3	1	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	2	4	3	3	3	3	3	3	
155	1	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	4	4	4	
156	2	3	3	4	3	4	4	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	2	
157	1	5	5	4	5	4	5	2	2	5	5	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	5	3	4	4	3	5	3	3	2	2	5	5	1	1	1	1	1	1	
158	2	4	4	3	5	5	2	2	2	4	2	1	2	1	1	2	4	3	3	2	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4	
159	2	2	4	4	3	4	5	1	1	4	4	2	2	2	2	3	4	4	2	4	2	2	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4
160	2	3	5	3	3	3	1	2	2	3	2	3	3	4	3	3	3	5	5	3	4	2	1	2	1	1	1	3	4	4	2	3	2	4	3	4	3	5	3	3	2	4	2	2	
161	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	2	2	2	2	2		
162	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	4	4	5	3	5	5	5	5	3	4	2	1	
163	1	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
164	2	3	3	4	5	5	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	2	2
165	1	5	4	5	4	5	1	3	3	2	3	5	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	1	1	3	1	1	5	5	5	5	5	5	2	3	4	3	3	3	3	5	5	3	5	5
166	2	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	2	4	4	5	4	4	
167	2	3	4	3	4	4	2	1	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	4	3	4	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	1	4	4	1	5	5	3	3	4	3	4	3	
168	1	3	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	3	4	4	4	4	4	5	4	2	5	4	4	5	5	5	3	3	2	4	4	2	4	3	4	5	4	4	3	2	4	4	4	
169	2	2	2	4	4	4	2	1	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
170	2	2	4	3	4	3	3	3	3	4	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
171	2	2	3	4	5	4	5	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	1	4	3	3	5	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	2	2	4	5	2	1	1	3	1	1		
172	2	3	3	4	4	3	2	2	3	3	2	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
173	2	3	4	4	5	5	4	2	3	2	2	3	4	3	5	4	4	5	5	5	5	5	3	4	5	3	3	4	2	3	5	5	2	4	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	
174	2	3	3	5	4	3	4	4																																					

No	Jenis Organisasi	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	X7.5	X7.6	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6			
175	2	5	5	3	5	5	4	2	2	5	5	3	5	3	5	5	5	1	1	1	1	4	5	5	4	5	5	1	1	1	1	2	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5			
176	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
177	2	3	2	4	3	4	4	2	3	2	4	3	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3		
178	2	3	4	2	3	4	2	4	3	2	3	4	4	3	5	2	4	4	3	2	1	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	5	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	
179	1	5	4	4	4	4	4	2	3	4	2	5	3	4	4	3	3	5	4	2	3	4	4	4	4	4	5	4	2	3	5	2	5	4	4	3	5	3	5	4	5	5	5	5	5		
180	1	3	4	4	4	3	4	2	3	2	1	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	3	4	5	2	2	1	1	1	1		
181	2	4	3	4	5	5	1	1	1	1	1	5	5	3	5	5	5	5	5	3	5	3	5	5	3	5	4	4	2	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
182	2	4	3	3	4	4	2	2	2	4	4	2	2	3	2	2	4	2	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2		
183	2	3	3	4	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	2	2	3	2	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	2	3	3	4	4	4	2	2	4	3	2		
184	2	4	4	5	4	5	1	1	2	2	1	3	2	2	1	2	4	5	4	4	5	3	4	4	3	4	5	3	3	4	3	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	3	4	2	2		
185	1	5	2	3	4	4	5	2	2	1	4	5	2	2	2	2	4	4	5	4	3	5	5	5	4	5	5	3	3	2	3	3	4	4	5	4	4	4	3	2	1	1	2	1	1	1	
186	1	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4		
187	2	2	3	2	5	5	2	1	1	2	1	2	2	3	2	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
188	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	
189	1	4	4	2	5	5	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
190	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
191	2	4	2	3	4	4	4	2	2	2	2	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	2	4	4	4	
192	2	5	3	3	4	5	5	2	2	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	1	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	2	3	3	3	4	5	2	2	1	3	1	1	1	1	
193	2	4	4	3	4	4	4	4	3	3	2	4	4	3	5	5	5	2	2	2	2	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	
194	2	2	5	5	5	5	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	
195	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	5	5	5	4	4	2	4	4	4	3	2	5	4	4	2	2	1	4	2	2	2	
196	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	2	2	4	2	2	2	1	1	4	2	2	2	
197	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	3	4	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	1	1	
198	2	4	4	4	5	5	5	2	2	5	5	2	2	3	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
199	2	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	2	3	2	3	3	2	2	4	2	5	5	5	3	5	5	4	5	3	3	3	5	5	5	5	4	5	2	5	2	5	2	5	2	2	
200	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	3	2	2	4	2	2	4	2	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	
201	1	4	4	4	4	4	2	2	3	5	2	5	3	4	3	4	4	1	4	4	3	3	4	5	5	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	4	3	1	1	2	1	1	1	1	
202	1	2	2	3	4	5	5	5	4	4	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	2	3	3	4	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	
203	1	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	5	5	3	3	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	
204	2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	2	3	3	3	2	3	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4		
205	2	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	
206	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
207	2	3	3	3	3	3	4	4	5	2	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
208	2	5	4	2	5	4	5	2	2	4	4	3	3	2	3	2	2	3	3	4	4	5	4	5	5	4	4	3	2	3	2	3	5	3	5	4	5	3	1	1	1	2	1	1	1	1	
209	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	
210	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3
211	2	4	4	2	3	5	4	2	3	3	4	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
212	2	3	3	5	4	5	4	4	4	4	5	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	2	3	1	3	3	4	4	
213	2	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
214	1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
215	2	3	3	4	5	5	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
216	2	5	3	4	4	4	5	3	4	5	5	4	4	4	5	4	5	1	3	4	5	3	3	3	4	5	5	3	5	2	1	5	4														

No	Jenis Organisasi	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4	X6.5	X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	X7.5	X7.6	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
219	2	5	4	3	5	5	3	3	4	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	1	4	4	4	4	5	5	4	3	3	5	5	5	3	5	3	3	3	3	3	3	1	3	1	
220	2	4	5	4	5	4	5	2	4	1	5	4	5	3	5	5	4	3	2	5	3	5	3	4	5	4	3	1	3	2	4	5	4	5	3	5	3	5	1	2	1	5	3	5	
221	2	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	2	3	4	4	2	2	
222	2	3	4	5	4	4	4	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	1	1	1	1	1	1	
223	1	5	4	4	4	5	3	4	3	3	4	5	1	1	2	1	3	2	2	2	3	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	2	3	2	2	2
224	2	4	3	4	4	4	5	5	5	4	3	5	5	4	4	4	4	2	2	2	3	5	5	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	3	4	3	5	4	2	2	3	2	2	2	
225	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	3	2	2	4	4	3	3	3	3	2	2	
226	1	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	5	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	3	4	2	2	2	2
227	1	5	4	5	5	5	4	4	2	2	4	5	3	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	3	4	3	4	2	1	1	2	1	2	
228	2	4	4	5	3	3	5	3	3	2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	2	4	5	4	3	5	5	5	5	4	3	5	5	4	4	5	2	5	4	4	1	2	2	1	
229	2	4	4	5	3	3	5	3	3	2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	2	4	5	4	3	5	5	5	5	4	3	5	5	4	4	5	2	5	4	4	1	2	2	1	
230	2	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	3	3	4	5	5	1	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	1	3	3	3	4	5	
231	1	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	3	4	4	4	4	4	5	3	3	4	4	2	1	
232	2	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
233	2	3	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2	3	4	4	4	4	5	3	3	5	5	5	2	3	5	3	3	4	4	2	4	4	4	4	
234	2	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	3	4	5	5	4	3	4	3	4	3	5	4	5	4	3	4	5	2	1	4	5	3	2	4	5	4	3	3	4	
235	2	3	4	2	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	1	2	3	5	4	5	3	5	5	3	2	1	4	4	3	2	5	3	4	4	3	2	3	3	2	5	
236	2	5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
237	2	5	4	4	5	5	2	4	3	2	4	5	4	4	4	4	5	1	1	3	4	5	5	4	3	5	5	4	5	5	5	5	4	3	4	2	3	4	2	4	4	3	4	2	
238	2	4	3	4	4	4	1	3	3	2	3	4	3	4	3	5	4	2	1	2	12	5	3	5	5	3	4	5	1	3	5	5	5	5	4	4	4	3	4	3	3	5	5	4	2
239	2	4	3	4	4	4	5	3	3	4	3	4	3	4	3	5	4	2	1	2	1	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	5	5	4	5
240	2	3	4	4	5	4	5	4	4	3	5	4	5	5	4	3	4	4	4	3	5	5	3	4	4	5	4	5	2	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
241	2	5	4	4	3	5	5	5	3	4	3	4	3	4	3	5	4	2	1	2	1	4	5	3	5	5	4	4	1	1	4	5	5	5	4	2	2	3	3	3	5	5	4	4	
242	1	4	4	3	5	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	1	3	3	5	4	5	5	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	5	4	4	4	3	3	3	4	3	3	
243	2	4	3	4	4	5	4	4	3	5	4	4	4	3	4	3	5	3	3	4	3	4	3	4	4	3	5	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	5	4	5	5	5	5	4	
244	2	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	2	2	2	4	2	1	
245	2	4	4	4	4																																								

Lampiran 3: Konseptual Model dalam PLS



Lampiran 4: Hasil Olah Data SmartPLS

1. Hasil Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

a. Outer Loading – Awal

	X1.	X2.	X3.	X4.	X5.	X6.	X7.	Y.
X1.1	0.852							
X1.2	0.890							
X1.3	0.898							
X1.4	0.770							
X1.5	0.614							
X2.1		0.751						
X2.2		0.773						
X2.3		0.738						
X2.4		0.747						
X2.5		0.748						
X3.1			0.819					
X3.2			0.892					
X3.3			0.873					
X3.4			0.916					
X3.5			0.844					
X3.6			0.322					
X4.1				0.802				
X4.2				0.854				
X4.3				0.716				
X4.4				0.754				
X5.1					0.817			
X5.2					0.574			
X5.3					0.808			
X5.4					0.890			
X5.5					0.781			
X5.6					0.570			
X6.1						0.538		
X6.2						0.642		
X6.3						0.734		
X6.4						0.811		
X6.5						0.787		
X7.1							0.736	

	X1.	X2.	X3.	X4.	X5.	X6.	X7.	Y.
X7.2							0.697	
X7.3							0.830	
X7.4							0.730	
X7.5							0.726	
X7.6							0.623	
Y.1								0.760
Y.2								0.825
Y.3								0.873
Y.4								0.798
Y.5								0.872
Y.6								0.825

b. Outer Loading – Final

	X1.	X2.	X3.	X4.	X5.	X6.	X7.	Y.
X1.1	0.852							
X1.2	0.890							
X1.3	0.898							
X1.4	0.770							
X1.5	0.614							
X2.1		0.751						
X2.2		0.773						
X2.3		0.738						
X2.4		0.747						
X2.5		0.748						
X3.1			0.840					
X3.2			0.921					
X3.3			0.909					
X3.4			0.937					
X3.5			0.886					
X4.1				0.802				
X4.2				0.854				
X4.3				0.717				
X4.4				0.754				
X5.1					0.817			
X5.2					0.575			

	X1.	X2.	X3.	X4.	X5.	X6.	X7.	Y.
X5.3					0.808			
X5.4					0.890			
X5.5					0.781			
X5.6					0.570			
X6.1						0.538		
X6.2						0.642		
X6.3						0.734		
X6.4						0.811		
X6.5						0.787		
X7.1							0.736	
X7.2							0.697	
X7.3							0.830	
X7.4							0.730	
X7.5							0.726	
X7.6							0.623	
Y.1								0.760
Y.2								0.825
Y.3								0.873
Y.4								0.797
Y.5								0.872
Y.6								0.825

c. Konstruk Reliabiliti dan Validiti

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1.	0.899	0.788	0.905	0.659
X2.	0.809	0.812	0.866	0.565
X3.	0.941	0.965	0.955	0.809
X4.	0.798	0.813	0.864	0.614
X5.	0.878	1.108	0.883	0.563
X6.	0.809	0.859	0.832	0.503
X7.	0.827	0.880	0.869	0.528
Y.	0.907	0.909	0.928	0.683

d. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	Y
X1								
X2	0.205							
X3	0.101	0.129						
X4	0.126	0.283	0.102					
X5	0.083	0.164	0.160	0.136				
X6	0.084	0.149	0.131	0.257	0.104			
X7	0.102	0.309	0.289	0.280	0.063	0.133		
Y	0.133	0.329	0.139	0.288	0.123	0.171	0.314	

e. Nilai Cross Loading

	X1.	X2.	X3.	X4.	X5.	X6.	X7.	Y.
X1.1	0.852	0.192	-0.109	-0.009	0.096	-0.077	-0.043	-0.121
X1.2	0.890	0.192	-0.120	-0.081	0.055	-0.057	-0.100	-0.094
X1.3	0.898	0.173	-0.082	-0.091	-0.024	-0.050	-0.056	-0.159
X1.4	0.770	0.133	-0.022	0.003	0.089	-0.026	0.016	-0.076
X1.5	0.614	0.071	0.057	0.029	0.023	-0.104	0.113	0.050
X2.1	0.195	0.751	0.080	-0.145	0.137	0.033	-0.157	-0.214
X2.2	0.123	0.773	0.137	-0.228	0.098	0.002	-0.185	-0.184
X2.3	0.129	0.738	0.059	-0.145	0.137	0.070	-0.273	-0.191
X2.4	0.102	0.747	0.041	-0.171	0.008	-0.130	-0.186	-0.222
X2.5	0.226	0.748	0.085	-0.191	0.074	-0.140	-0.178	-0.252
X3.1	-0.060	0.148	0.840	0.035	0.190	-0.015	0.188	0.078
X3.2	-0.104	0.094	0.921	0.033	0.071	-0.034	0.264	0.147
X3.3	-0.107	0.084	0.909	0.113	0.120	0.005	0.238	0.107
X3.4	-0.105	0.083	0.937	0.111	0.101	-0.012	0.252	0.139
X3.5	-0.137	0.088	0.886	0.030	0.114	-0.003	0.248	0.130
X4.1	-0.076	-0.222	0.148	0.802	0.054	0.098	0.258	0.242
X4.2	-0.075	-0.177	0.044	0.854	0.134	0.195	0.135	0.237
X4.3	0.123	-0.144	0.049	0.717	0.088	0.109	0.170	0.086
X4.4	-0.077	-0.172	-0.025	0.754	0.118	0.228	0.150	0.223
X5.1	0.010	0.143	0.144	0.113	0.817	0.138	-0.032	0.065
X5.2	-0.017	0.062	0.281	0.000	0.575	0.009	0.097	-0.013
X5.3	0.019	0.063	0.064	0.090	0.808	0.032	-0.000	0.053

	X1.	X2.	X3.	X4.	X5.	X6.	X7.	Y.
X5.4	0.095	0.062	0.080	0.143	0.890	0.077	0.073	0.166
X5.5	-0.033	0.153	0.167	-0.000	0.781	0.103	-0.000	0.075
X5.6	0.035	0.107	0.117	0.117	0.570	0.007	0.050	0.027
X6.1	-0.020	0.068	-0.092	0.087	0.087	0.538	-0.046	0.013
X6.2	0.009	-0.080	-0.117	0.186	0.048	0.642	0.006	0.046
X6.3	0.021	-0.099	-0.157	0.141	0.025	0.734	-0.015	0.057
X6.4	-0.086	-0.003	0.028	0.207	0.115	0.811	0.108	0.176
X6.5	-0.031	-0.064	0.043	0.105	0.061	0.787	0.111	0.141
X7.1	0.004	-0.099	0.218	0.165	0.029	0.055	0.736	0.219
X7.2	-0.056	-0.218	0.112	0.221	0.039	0.167	0.697	0.194
X7.3	-0.106	-0.250	0.247	0.179	0.028	0.088	0.830	0.337
X7.4	-0.053	-0.099	0.295	0.124	-0.018	0.010	0.730	0.157
X7.5	-0.067	-0.246	0.156	0.150	0.055	0.062	0.726	0.215
X7.6	-0.028	-0.180	0.113	0.159	-0.034	0.026	0.623	0.091
Y.1	-0.152	-0.242	0.195	0.281	0.146	0.112	0.313	0.760
Y.2	-0.064	-0.221	0.142	0.282	0.021	0.131	0.274	0.825
Y.3	-0.125	-0.208	0.122	0.231	0.157	0.197	0.243	0.873
Y.4	-0.182	-0.226	0.087	0.196	0.166	0.126	0.216	0.797
Y.5	-0.146	-0.271	0.050	0.200	0.075	0.159	0.232	0.872
Y.6	-0.115	-0.251	0.066	0.146	0.076	0.111	0.232	0.825

2. Hasil Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

a. Kolinieritas VIF

	Y.
X1.	1.074
X2.	1.227
X3.	1.159
X4.	1.152
X5.	1.058
X6.	1.062
X7.	1.219
Y.	

b. Koefisien Determinasi (R^2)

	R-square	R-square adjusted
Y.	0.610	0.688

c. Ukuran Efek (F^2)

	f-square
X1 -> Y	0.208
X2 -> Y	0.344
X3 -> Y	0.327
X4 -> Y	0.321
X5 -> Y	0.217
X6 -> Y	0.211
X7 -> Y	0.334

d. Hasil Pengujian PLS *Predict*

	Q ² predict	PLS-SEM_RMSE	PLS-SEM_MAE	LM_RMSE	LM_MAE
Y.1	0.143	1.067	0.891	1.149	0.942
Y.2	0.073	1.175	0.979	1.278	1.044
Y.3	0.087	1.231	1.024	1.274	1.049
Y.4	0.078	1.106	0.898	1.187	0.948
Y.5	0.066	1.188	0.987	1.257	1.014
Y.6	0.044	1.323	1.020	1.360	1.094

3. Hasil Pengujian *Path Coeffisien*

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1. -> Y.	0.084	0.088	0.083	1.017	0.309
X2. -> Y.	0.205	0.207	0.067	3.080	0.002
X3. -> Y.	0.277	0.276	0.066	2.174	0.040
X4. -> Y.	0.239	0.133	0.064	2.651	0.005
X5. -> Y.	-0.318	0.119	0.073	2.623	0.005

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X6. -> Y.	0.097	0.111	0.075	1.286	0.199
X7. -> Y.	0.182	0.190	0.069	2.637	0.008

4. Hasil Pengujian MGA (*Multigroup Analysis*)

a. MICOM (*Measurement Invariance of Composite Models*)

	Original correlation	Correlation permutation mean	5.0%	Permutation p value
Clnt	0.860	0.316	-0.804	0.814
DBH	0.981	0.952	0.843	0.574
MACH	0.999	0.997	0.993	0.717

	Original difference	Permutation mean difference	2.5%	97.5%	Permutation p value
Clnt	-0.050	-0.001	-0.238	0.256	0.697
DBH	-0.128	-0.005	-0.282	0.262	0.325
MACH	-0.225	0.004	-0.253	0.252	0.085

	Original difference	Permutation mean difference	2.5%	97.5%	Permutation p value
Clnt	0.555	-0.022	-0.540	0.576	0.053
DBH	0.420	-0.017	-0.462	0.420	0.072
MACH	0.326	-0.027	-0.342	0.375	0.083

b. MGA (*Permutation Test*)

	Original (JenisPerusahaan_1)	Original (JenisPerusahaan_2)	Original difference	Permutation mean difference	2.5%	97.5%	Permutation p value
DBH -> Clnt	0.522	0.319	0.203	0.198	-0.889	0.861	0.005
MACH -> Clnt	0.196	0.087	0.109	0.117	-0.279	0.294	0.005

c. Welch-Satterthwaite Test

	Original (JenisPer usahaan_ 1)	Original (JenisPer usahaan_ 2)	Mean (JenisPerusa haan_1)	Mean (JenisPerusa haan_2)	STDEV (JenisPer usahaan_ 1)	STDEV (JenisPer usahaan_ 2)	t value (JenisPerus ahaan_1)	t value (JenisPer usahaan_ 2)	p value (JenisPe rusahaa n_1)	p value (JenisPe rusahaa n_2)
DBH -> CInt	0.319	0.522	0.274	0.160	0.265	0.543	2.202	1.961	0.030	0.005
MACH -> CInt	0.196	0.087	0.214	0.118	0.085	0.124	2.298	1.966	0.022	0.005